



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 /KMK.01/2021

TENTANG

IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan 20 (dua puluh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017, 16 (enam belas) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak 2019, dan 7 (tujuh) Inisiatif Strategis pendukung 87 (delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.01/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan dilakukannya penyesuaian arah Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai implementasi Inisiatif Strategis Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut IS RBTK, yang terdiri atas:
- a. 26 (dua puluh enam) IS RBTK yang mulai diimplementasikan tahun 2019, 2020, dan 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - b. 20 (dua puluh) IS RBTK yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
 - c. 7 (tujuh) IS RBTK pendukung 87 (delapan puluh tujuh) IS RBTK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Implementasi atas IS RBTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh unit Eselon I dan unit Non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi berdasarkan arahan Menteri Keuangan.

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Dalam membantu penyelesaian Implementasi atas IS RBTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, Ketua Tim Pengelola pada Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat dapat membentuk Tim Teknis Penyelesaian Inisiatif Strategis berkenaan.
- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemantauan atas implementasi IS RBTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dan huruf c dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I dan unit Non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, melalui Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*).
- KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat menyerahkan pengelolaan dan pemantauan atas IS RBTK yang dikelola kepada unit Eselon II di lingkungan unit Eselon I berkenaan atau unit yang setara pada unit Non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsi unit berkenaan.
- KEENAM : Dalam hal diperlukan, Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) dapat melakukan pemantauan atas implementasi IS RBTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dan huruf c.
- KETUJUH : Tata kelola implementasi IS RBTK terdiri atas:
- mekanisme perubahan manual implementasi (*change request*);
 - mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Implementasi;
 - mekanisme penyelesaian inisiatif (*initiative closing*);
 - penetapan kriteria penyelesaian inisiatif;
 - penetapan perubahan manual implementasi (*change request*); dan
 - penetapan inisiatif yang dinyatakan selesai, yang dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- ketentuan mengenai manual implementasi inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan; dan
 - ketentuan mengenai tata kelola implementasi IS RBTK, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.01/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; dan
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.01/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*;
5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;
8. Para *Chief* Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (*Central Transformation Office*); dan
9. Para Ketua *Project Management Office* pada unit Eselon I dan unit Non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213.199703.1.001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 /KMK.01/2021 TENTANG IMPLEMENTASI
INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

26 (DUA PULUH ENAM) INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

1. Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi yang sangat penting di Indonesia, memiliki *policy*, instrumen, kinerja, dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
2. Kementerian Keuangan dituntut dapat menyikapi dinamika politik, makro nasional dan dampak dari *digital disruption*. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia.
3. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam merespon dinamika tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan Inisiatif Strategis dalam rangka percepatan transformasi digital.
4. Untuk mewujudkan arah rencana percepatan transformasi digital Kementerian Keuangan, dan untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan eksternal maupun internal, telah ditetapkan visi dan misi Kementerian Keuangan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.
5. Visi dan misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Misi:

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

- a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
- b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

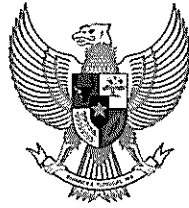
- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
 - d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
 - e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.
6. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, perlu diimplementasikan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan serta Inisiatif Strategis Proyek Data Analitik sesuai peta sebagai berikut:



B. IS RBTK Tema Sentral

IS RBTK Tema Sentral terdiri atas 8 (delapan) Inisiatif, sebagai berikut:

1. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan: *New Ways of Working*;
2. Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan untuk mewujudkan *single source of truth* data Kemenkeu;
3. Layanan Digital Kemenkeu;
4. Implementasi *Office Automation* dalam Rangka Membangun *Digital Workplace*;
5. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. *Modern e-learning* Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Optimalisasi *Emerging Technologies* dalam Kegiatan Pengawasan Itjen untuk Memperkuat GRC Kemenkeu;
8. Optimalisasi *The Enterprise Architecture for Ministry of Finance* (TEAM Finance) Sebagai Basis Transformasi Digital Kemenkeu.

C. IS RBTK Tema Fiskal

IS RBTK Tema Fiskal terdiri dari satu Inisiatif, sebagai berikut:

1. Evaluasi Insentif Fiskal untuk Mewujudkan Kebijakan yang Efektif dan Tepat Sasaran – tema Kebijakan Fiskal

D. IS RBTK Tema Penerimaan

IS RBTK Tema Penerimaan terdiri atas 4 (empat) Inisiatif, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (*Unified Revenue Account Management*);
2. *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan;
3. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax System*); dan
4. Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE).

E. IS RBTK Tema Belanja

IS RBTK Tema Belanja terdiri atas 2 (dua) Inisiatif, sebagai berikut:

1. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran; dan
2. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program Pensiun;

F. IS RBTK Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Pembiayaan

IS RBTK Tema Penganggaran, Kekayaan Negara dan Pembiayaan terdiri atas 6 (enam) Inisiatif, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara;
2. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*);
3. Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Fiskal;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara; dan
6. *Sustainable Development Goals Bond*;

G. *IS Data Analytics Project*

IS Data Analytics Project terdiri atas 5 (lima) inisiatif, sebagai berikut:

1. *Data Analytics* Tema Sentral (Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien);
2. *Data Analytics* Tema Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan;
3. *Data Analytics* Tema Penerimaan Negara yang Optimal;
4. *Data Analytics* Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas; dan
5. *Data Analytics* Tema Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali;

H. Piagam (*charter*) IS RBTK

Gambaran detail 26 (dua puluh enam) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf B sampai dengan huruf G tercantum pada masing-masing piagam (*charter*) IS RBTK sebagai berikut:

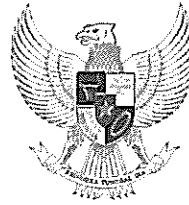


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

1. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: *New Way of Working* – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital, berintegritas, serta menciptakan adaptasi pola kerja baru guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan.		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcome
a. Masih perlunya dorongan untuk perubahan <i>mindset</i> , pola kerja, dan semangat dalam pelaksanaan tugas dalam menghadapi transformasi digital dan tren perubahan mekanisme kerja. b. Mendukung efisiensi birokrasi. c. Era revolusi industri 4.0 serta momentum pandemi Covid19 perlu direspon dengan akselerasi pelaksanaan transformasi digital menuju <i>new normal</i> dan perubahan signifikan di Kemenkeu dalam rangka menciptakan budaya baru Kemenkeu.	a. Budaya Kemenkeu mendorong penguatan nilai – nilai Kemenkeu. b. Menetapkan <i>collaborative working space</i> sebagai alternatif bentuk ruang kerja yang lebih nyaman bagi pegawai dan menghilangkan silo baik secara vertikal maupun horizontal. c. Menetapkan kebijakan terkait <i>flexible working arrangements</i> termasuk <i>remote working</i> untuk mendorong <i>work life balance</i> dan produktivitas kerja. d. Membangun <i>green office</i> yang mendukung efisiensi dan <i>environment friendly</i> (<i>paperless</i> dan <i>energy saving</i>).	Implementasi <i>Flexible Working Arrangement (FWA)</i> melalui penerapan <i>Flexible Working Space (FWS)</i> dan <i>Flexible Working Hour (FWH)</i> pada kondisi <i>new normal</i> .	a. Produktivitas organisasi melampaui target melalui kesadaran pola kerja produktif. b. Terbentuknya budaya pola kerja baru.
Pendukung Kesuksesan	Risiko	Unit Pengelola	
a. Dukungan pimpinan. b. Duta Transformasi Kemenkeu. c. <i>Internal Control</i> untuk memonitor produktivitas dan integritas pegawai. d. Penerapan digital ID dan e-Kemenkeu, serta keandalan keamanan informasi (<i>IT Security</i>). e. <i>Change Management New Way of Working</i> . f. Ketersediaan anggaran. g. Persetujuan KemenPANRB atas implementasi <i>Flexible Working Arrangement</i> .	a. Resistensi dari unit mengenai isu <i>confidentiality</i> . b. Tidak terjaganya kesinambungan program <i>The New Thinking of Working</i> . c. Gap integritas dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan <i>flexible working arrangement</i> berpotensi pada <i>unfairness</i> kinerja antar pegawai. d. Belum mapannya pengendalian atas pola kerja virtual dan secara <i>remote working</i> dapat mempengaruhi kinerja pegawai/unit.	a. <i>Initiative Champion</i> : Sekretaris Jenderal b. <i>Initiative Owner</i> : Seluruh Pejabat Eselon I c. Anggota Tim: 1. SETJEN (Karo Cankeu, Karo Organta, Karo SDM, Karo Madan, Kapusintek, Karo Umum, Karo Hukum, Chief CTO); 2. ITJEN (Ses Itjen, IBI); 3. BPPK (Kapus PSDM, Kapus KU, Dir PKN STAN); 4. Sekretaris UE I/Non; 5. PMO UE I/Non; 6. UKI UE I/Non.	
	Milestones		
	2019 1. <i>Grand Design piloting ABW/green office/digital workspace</i> . 2. Penetapan panduan <i>open space</i> . 3. <i>Piloting open space</i> dan <i>green office</i> pada UEI. 4. Kajian <i>flexible working hour</i> dan <i>flexible working space</i> . 5. Strategi Komunikasi Duta Transformasi. 6. Internalisasi Budaya Organisasi Kemenkeu. 7. Pelaksanaan <i>Culture re-Assessment</i> . 8. Review oleh ITJEN dan UKI atas efisiensi birokrasi. 9. Pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi.	2020 10. Pemanfaatan Penyuluh Antikorupsi. 11. <i>Updating Kajian FWS</i> . 12. Evaluasi piloting <i>open space</i> dan <i>green office</i> . 13. Implementasi <i>open space / co-working space</i> di seluruh UE 1 secara bertahap sesuai tata kelola yang tepat. 14. Penyempurnaan dan implementasi penerapan <i>Integrity Framework</i> .	2021 15. Tata Kelola Implementasi FWS. 16. Fleksibilitas Waktu Bekerja (FWH). 17. Implementasi ABW Kantor Pusat dan Daerah. 18. <i>Piloting Implementasi dan Penyusunan RKMK Integrity Framework</i> .



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

2. Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan Untuk Mewujudkan *Single Source of Truth* Data Kementerian Keuangan – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif		Pemanfaatan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai <i>data driven organization</i> .				
Latar belakang		Terobosan		Output	Outcomes	
a. Adanya <i>grand design</i> SLDK sebagai panduan dalam pengelolaan kumpulan data Kemenkeu sehingga terintegrasi secara bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan <i>single source truth</i> data Kemenkeu. b. Adanya kebutuhan peningkatan kapabilitas SDM pengelola dan pengolah data, penyempurnaan tata kelola data, dan pengembangan SLDK 2.0. c. Adanya kebutuhan katalog data Kemenkeu yang berisikan seluruh data di lingkungan Kemenkeu, termasuk informasi pemilik serta penanggung jawab data.		a. Penguatan kebijakan tata kelola data, standar, proses, kontrol, peraturan, dan kepatuhan dalam mendukung Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dan sebagai dasar hukum untuk praktik data yang baik di Kemenkeu. b. Peningkatan kemampuan SLDK untuk mendukung "program Satu Data", dengan penyediaan <i>environment</i> dan pengembangan portal SLDK. c. Peningkatan kapabilitas SDM pengelola dan pengolah data.		a. Tata kelola data yang baik di lingkungan Kemenkeu. b. Peningkatan kapabilitas SDM pengelola dan pengolah data. c. Tersedianya portal SLD.	a. Peningkatan kualitas data berdasarkan data akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu data pada tahun 2021 (sesuai kamus data). b. Pemanfaatan SLDK untuk mendukung <i>data analytics</i> Kemenkeu tahun 2021. c. Penggunaan SLDK sebagai pendukung pengambilan keputusan Tahun 2021. d. Terwujudnya data driven organization Kemenkeu Tahun 2021.	
		Milestones		Risiko		
		2020		Kesulitan akses data dan pertukaran data.		
Pendukung Kesuksesan		2021		Unit Pengelola		
a. Membentuk tim implementasi SLDK lintas unit. b. <i>Eagerness</i> setiap Unit Eselon I dalam mewujudkan <i>data sharing</i> di lingkungan Kemenkeu. c. Peran aktif CDMO dan Unit Eselon I terkait pelaksanaan <i>change management</i> untuk mengubah pola pikir <i>stakeholder</i> atas pentingnya Satu Data untuk pengambilan keputusan. d. Koordinasi Unit TIK Pusat dan Unit TIK Eselon I untuk membangun infrastruktur yang mendukung SLDK. e. Ketersediaan kompetensi tim pengelola dan pengolah data (<i>database administrator, data engineer, data analyst, data scientist, dsb</i>). f. Pemahaman tim pengelola data terhadap proses bisnis yang menghasilkan data.				a. <i>Initiative Champion</i>: Sekretaris Jenderal b. <i>Initiative Owner</i>: SA OBTI selaku CIO c. Anggota Tim: 1. SETJEN (Ka Pusintek (selaku Unit TIK Pusat), Karo Organta, Karo SDM, Chief CTO); 2. BPPK (Kepala Pusdiklat KU); 3. ITJEN (Ir VII); 4. Unit TIK UE I/Non selaku walidata unit; 5. UE I/Non selaku produsen data termasuk di dalamnya penanggung jawab dan penyedia data.		

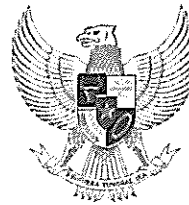


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

3. Layanan Digital Kementerian Keuangan - Tema Sentral

Tujuan Inisiatif		Mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital Kementerian Keuangan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan stakeholder.			
Latar belakang	Terobosan		Output	Outcomes	
a. Proses bisnis layanan Kemenkeu masih tersebar di berbagai sistem UE I. b. Belum optimalnya saluran informasi kepada stakeholder. c. Potensi untuk mewujudkan e-government yang lebih baik khususnya di Kemenkeu.	a. Harmonisasi layanan dari tiap UE I, yang mencakup: Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, dan Government to Government. b. Penyusunan layanan digital Kemenkeu. c. Implementasi portal Layanan Digital terintegrasi yang mengedepankan user centric approach. d. Implementasi omnichannel terintegrasi.		Portal layanan digital Kemenkeu dan contact center Kemenkeu terintegrasi.	a. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan digital Kemenkeu di tahun 2024 (dibandingkan tahun 2023). b. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan stakeholder. c. Tersedianya SLA layanan digital Kemenkeu di tahun 2021 d. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kemenkeu secara keseluruhan. e. Penyederhanaan bisnis proses layanan Kemenkeu.	
	Milestones				Risiko
	Pendukung Kesuksesan	2020 1. Pembentukan task force/tim implementasi. 2. Penyusunan desain high level Layanan Digital Kemenkeu. 3. Penyusun arsitektur BDAT grand design high level Layanan Digital Kementerian Keuangan. 4. Penyusunan desain detail Layanan Digital Kemenkeu untuk tahap I (sesuai roadmap). 5. Integrasi contact center Kementerian Keuangan (quick wins LDK). 2021 6. Penyusunan regulasi yang mengatur integrasi/harmonisasi seluruh layanan Kemenkeu. 7. Pengembangan Layanan Digital Kemenkeu (sesuai roadmap) (2021-2023). 8. Implementasi Layanan Digital Kemenkeu (sesuai roadmap) (2021-2023). 9. Pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Fondasi dan Standarisasi. 2022 10. Pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Stabilisasi. 2023 11. Pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Optimalisasi.			a. Resistensi unit untuk mengintegrasikan platform layanannya. b. Keengganan UE I untuk menutup platform layanannya setelah layanan tersebut diintegrasikan di platform layanan Kemenkeu. c. Kegagalan interkoneksi platform layanan UE I dengan platform layanan Kemenkeu. d. Kegagalan help desk/ pusat bantuan layanan dalam memahami proses bisnis lintas unit eselon I. e. Perbedaan platform sistem layanan UE I.
		Unit Pengelola			
		a. Initiative Champion: Sekretaris Jenderal b. Initiative Owner: Sekretaris Jenderal c. Anggota Tim: 1. SETJEN (Karo KLI, Karo Organta, Ka Pusintek, Karo Hukum, Karo Umum, Karo SDM, Chief CTO); 2. DJPB (Dir. TPB DJP, Dir. PPS DJBC, Dir. SITP DJPb); 3. Sekretaris UE I/Non; 4. Unit Kehumasan UE I/Non; 5. Unit TIK dan Data UE I/Non; 6. UE I/Non Pemilik Layanan.			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

4. Implementasi *Office Automation* dalam Rangka Membangun *Digital Workplace* – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif		Mewujudkan proses bisnis dan layanan yang efisien dari sisi biaya, mutu, dan waktu.		
Latar belakang		Terobosan	Output	Outcomes
a. Saat ini terdapat beberapa aplikasi yang mendukung fungsi <i>e-Office</i> (termasuk <i>Nadine 2.0</i>) di beberapa UE I dan telah terimplementasi. b. Belum terdapat <i>Office Automation</i> yang terintegrasi termasuk <i>collaborative environment</i> dan <i>folder sharing</i>. c. <i>Digital culture</i> seperti <i>video conference</i>, <i>collaborative workplace</i>, dan <i>less paper</i> belum optimal dan menyeluruh.		a. Penerapan <i>e-Kemenkeu</i> (<i>Office Automation</i> Kemenkeu) di seluruh UE I untuk respon kebijakan lebih tanggap dan terpantau b. Terciptakan fitur otomasi perkantoran umum yang dapat mendukung produktivitas dan akuntabilitas kinerja pegawai c. Terciptanya <i>digital collaborative workplace</i> dalam satu platform yang sama, terintegrasi, dan dengan tingkat <i>user experience</i> yang optimal untuk dapat mendukung pembangunan <i>digital culture</i>. d. Mendukung <i>green organization</i>.	Implementasi aplikasi <i>e-Kemenkeu</i> di seluruh Unit Eselon I beserta regulasi pendukungnya.	a. Peningkatan efektifitas bekerja diukur dengan pengurangan norma waktu penyelesaian produk organisasi sesuai probis dalam <i>e-Kemenkeu</i>. b. Peningkatan efisiensi diukur dengan berkurangnya biaya operasional terkait seperti ATK, perjalanan dinas, kurir, dll sebesar 30% pada 2022. c. Peningkatan kepuasan pengguna <i>e-Kemenkeu</i> 15% di 2022. [Baseline T-1 implementasi salah satu modul <i>e-Kemenkeu</i>]
Pendukung Kesuksesan		Milestones	Risiko	
a. Performa seluruh modul <i>e-Kemenkeu</i> yang andal digunakan lebih dari 80 ribu pegawai. b. Ketersediaan infrastruktur IT yang memadai sesuai kebutuhan (termasuk sisi <i>end user</i>). c. Implementasi <i>Single HRIS</i> di seluruh UE I. d. Ketersediaan <i>service desk</i>, tim pendamping, dan penanganan aduan. e. Keandalan performa <i>Digital Signature</i>. f. <i>Data security</i>. g. <i>Executive interface</i>. h. SLA respon/ alert. i. <i>Change management</i>, sosialisasi, dan training. j. Simplifikasi, penyatuan aplikasi, dan <i>phasing out</i> menjadi <i>e-Kemenkeu</i>. k. Komitmen pimpinan.		2019 1. Penyusunan <i>Grand Design</i> <i>e-Kemenkeu</i> 2. Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan framework EA ke dalam ORBUS iServer 3. Penyusunan <i>Service Desk Management Office Automation</i> 4. Penyiapan Aplikasi <i>e-Kemenkeu</i> sesuai <i>Grand Design</i> 5. Penyusunan strategi change management 6. Penyesuaian regulasi pendukung <i>e-Kemenkeu</i> sesuai <i>Grand Design</i> (Tahap I) 2020 7. Pembentukan Task Force <i>e-Kemenkeu</i> (2020-2021) 8. Pemutakhiran <i>Grand Design</i> <i>e-Kemenkeu</i> 2020. 9. Pengembangan modul <i>e-Kemenkeu</i> berdasarkan roadmap 2020. 10. Optimalisasi performansi sistem <i>Digital Signature</i>. 11. Penyempurnaan proses bisnis dan regulasi pendukung 2020. 12. Implementasi strategi <i>change management</i> 2020. 2021 13. Pemutakhiran <i>Grand Design</i> <i>e-Kemenkeu</i> 2021. 14. Pengembangan modul <i>e-Kemenkeu</i> berdasarkan roadmap 2021. 15. Penyempurnaan proses bisnis & regulasi pendukung 2021. 16. Implementasi strategi <i>change management</i> 2021.	a. Proses transisi dari sistem lama ke sistem baru. b. Kesiapan <i>stakeholder</i> eksternal dan perangkat hukum. c. Resistensi kolaborasi data dari pengelola IT UE I. d. <i>IT security</i>. e. Pengadaan terkait infrastruktur IT cenderung kompleks dan membutuhkan waktu panjang. f. Standarisasi sistem nasional yang tidak sesuai dengan arah pengembangan arsitektur Kemenkeu.	
		Unit Pengelola		
		a. <i>Initiative Champion</i>: Sekretaris Jenderal b. <i>Initiative Owner</i>: Sekretaris Jenderal c. Anggota Tim: 1. SETJEN (Karo Organta, Ka Pusintek, Karo SDM, Karo Umum, Karo Hukum, Karo KLI, Karo Madan, Karo Cankeu, Chief CTO); 2. BPPK. 3. ITJEN. 4. Sekretaris UE I/Non. 5. Kepala Unit Probis dan IT UE I/Non.		

28



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

5. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif			Mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang mengadopsi <i>Flatter</i> dan <i>Boundaryless Organization</i> serta <i>Adaptive</i> dan <i>Tech Savvy Human Resources</i> .		
Latar belakang		Terobosan		Output	
a. Perkembangan teknologi informasi memaksa Kemenkeu untuk menjadi organisasi yang adaptif dan efisien. b. Proses birokrasi yang panjang dan memiliki banyak <i>touch points</i> dalam proses bisnisnya. c. Proses bisnis UE I banyak yang masih bersinggungan sehingga perlu adanya <i>alignment</i> fungsi antar UE I. d. Adanya potensi peningkatan koordinasi lintas UE I dalam pengelolaan SMV. e. Tren kenaikan hasil perhitungan ABK tahun 2014 s.d. 2018 sebesar 3% per tahun, potensi jabatan yang hilang sebagai implikasi revolusi industri 4.0, dan anggaran belanja pegawai yang saat ini sudah mencapai 45% dari total pagu belanja Kemenkeu.		a. Pengendalian <i>growth</i> SDM baru secara bertahap, meliputi: (1) pengurangan <i>growth</i> pegawai s.d. 2023, (2) <i>zero/minus-growth</i> pegawai mulai tahun 2020. b. Integrasi fungsi-fungsi Kementerian Keuangan yang berdampak pada efisiensi dan simplifikasi proses bisnis. c. Koordinasi pengelolaan <i>Special Mission Vehicle (SMV)</i> lintas UE I melalui komite SMV sebagai <i>bridging tools</i> pengelolaan fiskal Menkeu.		a. Transformasi fungsi: (1) pengelolaan kas dan pengelolaan utang antara DJPB dan DJPPR; (2) alokasi dan pengawasan ke daerah antara DJA, DJPK, dan DJPB; (3) Fungsi LNSW; (4) Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK; (5) Peningkatan peran/kontribusi SMV terhadap proyek strategis nasional. b. Jumlah SDM Kemenkeu yang efisien dan terkendali (<i>zero/minus growth</i>). c. Indeks Kepuasan pegawai atas pengelolaan organisasi dan SDM (melalui survei) – 2024. d. Indeks <i>engagement</i> pegawai (melalui survei) – 2021.	
		Milestones		Outcomes	
		2019: 1. Mutasi antar Eselon I sampai level pelaksana (2019 - 2020). 2. Kajian <i>alignment</i> empat tema transformasi fungsi. 3. <i>Roadmap</i> Pengelolaan Organisasi (2019 & 2021) 4. <i>Roadmap</i> pengelolaan SDM 2020 – 2024 (2019 - 2020). 5. Operasionalisasi komite SMV. 6. Kajian penyempurnaan kebijakan remunerasi dan grading. 7. Pengendalian <i>Growth</i> Pegawai (2019-2021 & 2023-2024). 8. Akselerasi implementasi JF Kemenkeu sebagai instansi pembina dan JF K/L lain sebagai instansi pengguna (2019 - 2021). 2020: 9. Penyederhanaan Birokrasi/<i>delayering</i> (2020 - 2021). 10. <i>Enhancement</i> HRIS terpusat & migrasi (<i>phase out</i>) (2020 - 2021). 11. <i>Internal job vacancy</i> (2020 - 2021). 2021: 12. Survei <i>engagement</i> pegawai. 13. Kajian <i>job shifting</i> (2021 - 2022). 2023: 14. Survei kepuasan pegawai.		Kemenkeu yang semakin efisien, efektif, produktif, dan berbasis digital.	
Pendukung Kesuksesan				Risiko	
a. Implementasi <i>Enterprise Architecture</i> Kemenkeu. b. Komunikasi yang intens dengan Kemenpan RB terkait rencana penyesuaian fungsi, SDM, organisasi yang progresif. c. Validitas Analisis Beban Kerja. d. Dukungan infrastruktur teknologi informasi. e. Komitmen dari seluruh pimpinan UE I. f. Terbentuknya komite SMV.				a. Potensi resistensi dari UE I atas kebijakan integrasi fungsi, <i>minus growth</i>, dan <i>flatter organization</i> b. <i>Gap</i> kompetensi pegawai yang berasal dari fungsi yang berbeda. c. <i>Deadlock</i> kebijakan dari Kemenpan RB. d. Potensi penurunan kinerja pada masa transisi. e. Potensi kurang optimalnya pemenuhan kapasitas PKN STAN (infrastruktur, dosen) dan ketidaksesuaian kompetensi dan kualifikasi lulusan PKN STAN dengan kebutuhan <i>job owner</i> non-Kemenkeu Mitigasi : 1. <i>Change management program</i>. 2. Pemenuhan <i>gap</i> kompetensi. 3. Koordinasi yang intens dengan Kemenpan RB dan KASN. 4. Optimalisasi strategi komunikasi (kepada semua level).	
				Unit Pengelola	
				a. <i>Initiative Champion</i>: Sekretaris Jenderal b. <i>Initiative Owner</i>: Sekretaris Jenderal c. Anggota Tim: 1. SETJEN (Karo Organta, Karo SDM, Ka Pusintek, Chief CTO); 2. ITJEN (Ir. VI); 3. Ses. UE I/Non; 4. Komite pengarah dan pengelola kebijakan SMV; 5. Unit TIK UE I/Non.	

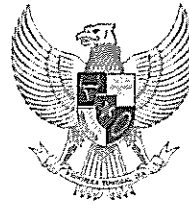


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

6. *Modern e-learning* Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, relevan, aplikatif, berdampak nyata (<i>impactful</i>), dan mudah diakses.		
Latar Belakang	Terobosan	Output	
a. Pelaksanaan <i>e-learning</i> saat ini dilaksanakan melalui <i>Kemenkeu Learning Center</i> (KLC) dengan komposisinya sebesar 15% dari total proporsi pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK. b. Sistem pembelajaran <i>online</i> belum terbangun dengan baik. c. Pelaksanaan training tatap muka berpotensi mengganggu ritme pelaksanaan pekerjaan rutin. d. <i>Repository</i> pengetahuan dalam KLC masih rendah dan belum optimal (belum memadai untuk menggantikan metode pembelajaran klasikal). e. Tingginya biaya pembelajaran klasikal dan perjalanan dinas. f. Kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi/penetrasi/penyebaran pengetahuan dan kemudahan untuk mengakses kembali pengetahuan. g. Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) belum terintegrasi dengan HRIS. h. Jumlah pegawai yang diajukan pada AKP kurang dari 80% dari jumlah pegawai.	a. Penguatan fungsi <i>Learning and Knowledge Management System</i> (LKMS) Kemenkeu dan integrasi LKMS yang tersebar pada UE I ke KLC. b. Penggunaan <i>omnichannel</i> dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan <i>user experience</i> . c. Peningkatan konten digital baik secara kuantitas maupun kualitas. d. Implementasi <i>change management</i> yang komprehensif untuk mendukung budaya pembelajaran modern. e. Penggunaan <i>Kemenkeu Leadership Development Program</i> (KLDP) sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pengembangan SDM.	a. Penghematan biaya penyelenggaraan dan anggaran perjalanan dinas pelatihan sebesar 70%. b. Platform pembelajaran digital yang semakin <i>accessible</i> . c. Integrasi AKP Jabatan dan Individual dengan HRIS/ <i>e-performance</i> .	
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Outcomes	
		a. Perubahan budaya belajar pegawai yang semakin mandiri dan mengarah pada <i>digital learning</i> . b. Pemenuhan <i>gap</i> kompetensi individu.	
		Risiko	
	2019: 1. <i>Governance</i> pelaksanaan <i>full e-learning</i> . 2. Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan framework EA ke dalam ORBUS iServer (penyempurnaan di 2020). 3. Pengembangan interkoneksi antara KLC dan HRIS untuk mendukung otomasi administrasi dan pelaksanaan <i>e-Learning</i> . 4. Penyediaan Infrastruktur TIK dan pembelajaran multimedia. (2019-2021) 5. Implementasi <i>full e-learning</i> : 30% pada 2019, 50% pada 2020, dan 70% pada 2021 (2019-2021). 2020: 6. Digitalisasi materi pembelajaran (kualitas dan kuantitas) (2020-2021). 7. Peningkatan fungsionalitas dan sentralisasi LKMS Kemenkeu (2020-2021). 8. <i>Change management</i> implementasi dan budaya <i>e-learning</i> (2020-2021).	a. Resistensi atas perubahan kultur proses pembelajaran. b. <i>Skill group owners</i> pada UE I tidak dilibatkan dalam pembuatan konten <i>e-learning</i> dan tidak berperan aktif dalam mengisi <i>repository</i> pengetahuan. c. Ketidakselarasan antara strategi pengembangan SDM dengan strategi pembelajaran. d. Belum semua daerah memiliki infrastruktur penunjang KMS yang memadai. e. Ketidakselarasan antara strategi pencapaian kinerja dengan strategi pembelajaran. f. Dampak kebijakan <i>delayering</i> .	
		Unit Pengelola	
		a. <i>Initiative Champion</i> : Kepala BPPK b. <i>Initiative Owner</i> : Kepala BPPK c. Anggota Tim: 1. BPPK (Setban, Kepala Pusdiklat) 2. SETJEN (Karo SDM, Ka. Pusintek, Karo Organta) 3. Sekretaris UE I/Non.	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

7. Optimalisasi *Emerging Technologies* dalam Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan <i>data-driven organization</i> melalui penyampaian informasi kondisi <i>Government Risk and Control</i> (GRC) secara <i>real-time</i> berdasarkan hasil pengawasan berbasis pemanfaatan <i>emerging technologies</i> .		
Latar belakang	Terobosan	Output	
a. Tantangan peningkatan jumlah, kecepatan, kejelasan, dan variasi (<i>4Vs of data</i>) sebagai implikasi digitalisasi proses bisnis internal Kemenkeu maupun mitra eksternal Kemenkeu sebagai peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan Kemenkeu sebagai <i>data-driven organization</i> dalam mendukung kebijakan strategis maupun keputusan operasional. b. Belum terimplementasikannya <i>emerging technologies</i> untuk memfasilitasi peran Itjen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peran Kemenkeu.	a. Penerapan <i>Data Analytics</i> dalam kegiatan pengawasan Itjen dengan melibatkan Unit Eselon I. b. Optimalisasi teknik dan metode berbasis <i>emerging technologies</i> (ET) lainnya dalam analisis dan pengujian data. c. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi Kemenkeu.	a. Enam <i>project</i> CACM (2021). b. Enam <i>project</i> CACM (2022). c. Satu kajian pemanfaatan ET lainnya untuk kegiatan pengawasan (2022). d. Tiga <i>project</i> pemanfaatan ET berupa analisis prediktif dan/atau pemanfaatan ET lainnya untuk menunjang kegiatan pengawasan (2023).	
	Milestones	Outcomes	
Pendukung Kesuksesan	2021: 1. <i>Use case project CA/CM</i> 2021. 2. Risk dan Control Matrix 2021. 3. Bootcamp 2021. 4. Perolehan dan Analisis Data 2021. 5. Finalisasi 2021.	2022: 6. <i>Use case project CA/CM</i> 2022. 7. Risk dan Control Matrix 2022. 8. Perolehan dan Analisis Data 2022. 9. Finalisasi 2022. 10. Kajian pemanfaatan ET lainnya dalam kegiatan pengawasan 2022.	Hasil pengawasan intern yang memberi nilai tambah baik <i>insight</i> maupun <i>foresight</i> melalui kegiatan tepat waktu dan komprehensif (pada area proses bisnis yang menjadi obyek <i>project</i>).
	2023: 11. <i>Use case</i> pemanfaatan ET pengawasan (analisis prediktif). 12. Analisis dan identifikasi kebutuhan data. 13. Perolehan dan analisis data pemanfaatan ET. 14. Finalisasi 2023.		Risiko a. Hambatan koordinasi antar UE I. b. Pemahaman dan <i>awareness</i> tim pengawasan dan/atau klien pengawasan dalam pemanfaatan aplikasi. c. Adanya isu kerahasiaan data. d. Skala prioritas kegiatan dengan IS lainnya.
		Unit Pengelola	
		a. <i>Initiative Champion</i> : Inspektur Jenderal b. <i>Initiative Owner</i> : Inspektur Jenderal c. Anggota Tim: 1. Seluruh UE I/Non, 2. ITJEN (seluruh Inspektur dan Ses ITJEN) dan 3. CIO, CDO	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

8. Pengembangan *The Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Memperkuat pengelolaan <i>Enterprise Architecture</i> (EA) dalam mengorkestrasi transformasi Kementerian Keuangan sebagai organisasi digital yang <i>agile</i> , adaptif, dan berfokus pada nilai tambah.		
Latar belakang	Terobosan	Output	
a. Belum meratanya kapasitas serta peran optimal dari tim arsitek masing-masing Eselon I Kemenkeu. b. Pendekatan <i>Enterprise Architecture</i> belum dimanfaatkan optimal dalam mendukung transisi transformasi digital Kemenkeu yang kompleks. c. Partisipasi dan bentuk peran aktif para pihak dalam <i>Enterprise Architecture</i> belum didukung dengan operasionalisasi tata kelola EA Kemenkeu yang terpadu dan konsisten. d. Belum ada pengukuran atas kematangan pengelolaan EA Kemenkeu serta realisasi obyektif atas arsitektur yang dirancang dengan implementasinya (<i>deliverables management</i>).	a. Terbentuknya tim arsitek melalui mekanisme rekrutmen yang selektif. b. Pelibatan pimpinan tinggi Kemenkeu dalam proses pengelolaan EA. c. Pelaksanaan secara berkala EA <i>Maturity Assessment</i> untuk mengukur level kematangan pengelolaan EA Kemenkeu. d. Pelaksanaan secara berkala <i>Architecture Compliance Review</i> untuk mengukur level kepatuhan pengembangan dan implementasi dengan obyektif dan arsitektur yang dirancang, serta kesesuaian arsitektur dengan standar arsitektur yang telah ditentukan. e. Terbangunnya peran/fungsi konsultatif EA dalam proses implementasi transformasi digital.	Operasionalisasi Tim EA Kemenkeu sesuai pedoman Tata Kelola EA Kemenkeu yang komprehensif.	
	Milestones	Outcomes	
		a. Peningkatan kualitas pengelolaan EA Kemenkeu berdasarkan pengukuran level maturitas yang dilakukan pada tahun 2022. b. Peningkatan kapabilitas dan peran tim arsitek pada proses perencanaan, perancangan, pengembangan, dan evaluasi program transformasi digital di Kemenkeu. c. Peningkatan kualitas artefak pada <i>repository</i> sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut seperti analisis <i>continuous improvement</i>.	
		Risiko	
Pendukung Kesuksesan	2021: 1. Penyempurnaan Tata Kelola EA Kemenkeu yang berfokus pada penguatan tata kelola yang <i>agile</i> serta <i>value realization</i> . 2. Penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan kapabilitas SDM dalam mengelola EA Kemenkeu (2021-2022). 3. Pengembangan arsitektur. 2022: 4. Monitoring dan evaluasi.	a. Kontinuitas peran arsitek pada unit sehubungan dengan proses mutasi/rotasi pegawai. b. Peran arsitek belum merupakan tuisi utama yang bersangkutan. c. Persepsi yang berbeda mengenai EA sehingga ekspektasi <i>stakeholder</i> sulit dikelola. d. Dinamika transformasi digital.	
		Unit Pengelola	
		a. <i>Initiative Champion</i>: Sekretaris Jenderal b. <i>Initiative Owner</i>: Sekretaris Jenderal c. Anggota Tim: 1. SETJEN (Karo Organta, Ka. Pusintek, Chief CTO, Karo SDM); 2. Seluruh Unit Pengelola Proses Bisnis pada UE I/Non; 3. Seluruh Unit Pengelola TIK dan Data UE I/Non; 4.BPPK (Pusdiklat KU)	

48

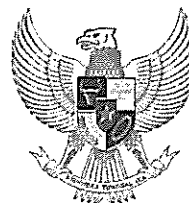


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

9. Evaluasi Insentif Fiskal – Tema Fiskal

Tujuan Inisiatif	Peningkatan efektivitas insentif fiskal bagi perekonomian melalui penyediaan data monitoring dan analisis evaluasi insentif fiskal.		
Latar belakang	Terobosan	Output	
a. Banyaknya insentif fiskal yang telah disediakan oleh pemerintah dan telah dipublikasikannya laporan belanja perpajakan. b. <i>Tax ratio</i> menunjukkan tren yang menurun sehingga upaya perbaikan perlu dilaksanakan dari berbagai sisi. c. Evaluasi insentif fiskal, baik dalam aspek kebijakan maupun tata kelola, perlu untuk dilakukan secara sistematis dan komprehensif dan perlu didokumentasikan dengan baik. d. Instrumen pengawasan dan monitoring evaluasi insentif fiskal perlu dioptimalkan sebagai bahan pendukung untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan.	a. Peningkatan kualitas evaluasi terkait pemberian insentif fiskal, termasuk dampaknya. b. Perbaikan tata kelola insentif fiskal. c. Penyediaan <i>dashboard</i> insentif fiskal. d. Mendorong integritas data untuk kebutuhan evaluasi insentif fiskal. e. Peningkatan kualitas monitoring/pengawasan atas insentif fiskal yang telah diberikan.	a. Evaluasi insentif fiskal yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik. b. Rekomendasi perbaikan regulasi atau prosedur terkait pengelolaan insentif fiskal. c. Adanya payung hukum dan sistem (<i>dashboard</i>) monitoring insentif fiskal yang valid dan handal.	
	Milestones	Outcomes	
	2021: 1. Pembentukan Tim Lintas UE I 2. Grand Design Evaluasi Insentif 3. Identifikasi prioritas kebijakan insentif fiskal yang akan dievaluasi serta kebutuhan data dan informasi 4. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap I 2022: 5. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap II 6. Studi banding (2022-2023) 2023: 7. <i>Dashboard monitoring</i> insentif fiskal I 8. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap III 2024: 9. <i>Dashboard monitoring</i> insentif fiskal II 10. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap IV	a. Belanja perpajakan tepat sasaran sesuai indikator yang diakui. b. Peningkatan <i>tax ratio</i> dalam jangka panjang. c. Peningkatan kepatuhan perpajakan.	
Pendukung Kesuksesan		Risiko	
a. Peningkatan pemahaman teori evaluasi insentif fiskal. b. Komitmen pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu dan K/L terkait. c. Dukungan dari <i>expert</i> terkait.		a. Evaluasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan data. b. Data yang tersedia bukan merupakan data yang valid dan terkini.	
		Unit Pengelola	
		a. <i>Initiative Champion</i>: Kepala BKF b. <i>Initiative Owner</i>: Kepala BKF c. Anggota Tim: 1. DJP, 2.DJBC (Dir Fasilitas Kepabeanan, Dir Teknis dan Fasilitas Cukai), 3. DJPK (Dir Dana Transfer Khusus), 4.DJA, 5.DJPB, 6.DJPPR, 7.LNSW, 8.SA OBTI selaku CIO, 9.SA Kepatuhan Pajak, 10. SA Penerimaan Negara	



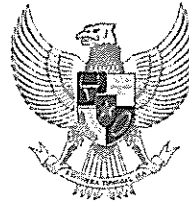
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

10. Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (*Unified Revenue Account Management*) – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif		Terintegrasinya informasi <i>database</i> penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, serta profil risiko Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Wajib Bayar	
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcome
a. Masih belum terintegrasinya <i>database</i> penerimaan untuk keperluan internal Kemenkeu. b. Masih terdapat beberapa sistem yang berbeda untuk mengetahui profil Wajib Pajak yaitu CRM (profil Wajib Pajak) dan SKPJ (profil Pengguna Jasa). c. Masih belum tersedianya sebuah <i>platform</i> tunggal yang menyediakan informasi dan profil risiko WP/Pengguna Jasa/Wajib Bayar secara komprehensif.	a. Integrasi informasi DJP, DJBC, dan DJA (PNBP SDA-KND) dalam <i>Single Stakeholder Information</i> (SSI) untuk layanan perpajakan dan PNBP. b. Pembangunan dan pemanfaatan <i>Single Stakeholder Profile</i> dalam pelaksanaan manajemen risiko, pelayanan perpajakan dan PNBP. c. Pembentukan <i>user interface</i> SSP URAM untuk pimpinan. d. Jaminan pengaliran data yang valid dan <i>realtime</i> dari DJP, DJBC, dan DJA melalui SLDK.	a. Tersedianya joint proses bisnis <i>end-to-end</i> yang dilakukan melalui sistem digital. b. Tersedianya platform <i>single stakeholders profile</i> yang menyediakan informasi penerimaan dan profil risiko WP/ Pengguna Jasa / Wajib Bayar terkait perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP SDA-KND yang komprehensif, valid, dan terkini.	a. Peningkatan kepatuhan WP/Wajib Bayar/Pengguna Jasa b. Peningkatan kepuasan <i>stakeholder</i> (Pimpinan Kemenkeu). c. Optimalisasi penerimaan negara.
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Risiko	
	2019: 1.Kajian penggabungan DC/DRC DJP dengan DC/DRC Pusintek. 2.Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan <i>framework</i> EA ke dalam ORBUS iServer. 3.Pembangunan <i>Single Stakeholder Information</i> (SSI) dan <i>Joint Profile</i> Perpajakan (JPP) (2019-2020). 2020: 4. Pemanfaatan SSI dan JPP untuk manajemen risiko pelayanan dan pengawasan perpajakan (2020-2021). 2021: 5. Pembangunan <i>Single Stakeholder Profile</i> (berdasarkan SSI) untuk keperluan manajemen risiko Pimpinan, dan tindak lanjut di pelayanan perpajakan dan PNBP.	Unit Pengelola a. <i>Initiative Champion</i> : Menteri dan Wakil Menteri Keuangan b. <i>Initiative Owner</i> : Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Anggaran c. Anggota Tim: 1. SETJEN (Kepala Pusintek); 2. DJP (Dir. DIP, Dir. TIK, Dir. IP, Dir. TPB, Dir. Gakkum, Dir. P2, Dir. PKP); 3. DJBC (Dir. P2, Dir. IKC, Dir. PPS, Dir. Audit KC, Dir. Teknis Kepabeanan); 4. DJA (Dir. SP, Dir. PNBK SDA-KND, Dir. PNBK K/L, DJA); 5. LNSW (Dir. PM); 6. ITJEN (Inspektur I, II, V, VII).	

58



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

11. Joint Program Optimalisasi Penerimaan – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif Mengoptimalkan penerimaan negara melalui perbaikan proses bisnis dan penegakan hukum di bidang pajak, kepabeanan cukai, dan PNB			
Latar belakang		Terobosan	Output
a. Optimalisasi penerimaan menjadi kunci utama pemenuhan sumber anggaran dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. b. Terdapat irisan proses bisnis dan informasi antara UE I Kemenkeu yang dapat disinergikan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan terkait penerimaan negara. c. Potensi peningkatan negara dan PNB melalui sinergi antara UE I Kemenkeu – Kementerian/Lembaga (K/L) – pemerintah daerah (Pemda) - Pihak Lain. d. Potensi peningkatan penerimaan perpajakan atas belanja pemerintah: 1. Kepatuhan perpajakan Bendahara belum optimal; 2. Data keuangan pemerintah pusat dan Daerah belum terintegrasi.		a. Kolaborasi dan <i>compatibility business process</i> antar unit melalui <i>scaling up</i> program sinergi DJP-DJBC, menjadi sinergi antar UE I Kemenkeu (penerimaan perpajakan, cukai, PNB, dan pajak belanja pemerintah pusat dan Daerah), mencakup <i>joint analysis-joint audit-joint collection-joint investigation-joint intelligence-joint</i> proses bisnis-secondment b. Sinergi data, pemanfaatan <i>data analytics</i> , dan pengawasan bersama antara UE I Kemenkeu-K/L-Pemda-Pihak Lain terhadap WP/Pengguna Jasa/Wajib Bayar untuk optimalisasi penerimaan negara. c. <i>Integrated Analysis System</i> di Kemenkeu.	a.Terciptanya harmonisasi dan sinergi tata kelola terkait pelayanan serta pengawasan di bidang penerimaan perpajakan dan PNB. b.Terintegrasinya proses bisnis pengawasan bersama atas komoditas SDA, barang modal hulu migas, layanan K/L dsb. c.Menurunnya persentase piutang macet yang meliputi pajak, bea, dan cukai. d.Realisasi <i>cost recovery</i> tidak melebihi dari yang ditargetkan. e.Meningkatnya kepatuhan perpajakan dan pelaporan informasi keuangan daerah dari bendahara Pemda. f. Kemenkeu akan memiliki data & informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi atas harmonisasi dan sinergi tata kelola penerimaan perpajakan dan PNB.
Pendukung Kesuksesan		Milestones	Outcomes
a. Perlu <i>alignment</i> antara tujuan peningkatan tata kelola penerimaan negara dan tata kelola sesuai dengan tugas dan fungsi UE I Kemenkeu, K/L dan Pemda. b. KMK yang mengatur pelaksanaan program sinergi. c. Komitmen pimpinan di UE I Kemenkeu, K/L, dan Pemda dalam implementasi sinergi <i>scale up joint program</i> . d. Penyelerasan peraturan terkait <i>scale up Joint Program</i> . e. Alokasi Anggaran dan SDM <i>dedicated</i> unit. f. Dukungan IT di masing-masing UE I Kemenkeu. g. Dukungan penyelesaian <i>Unified Revenue Account Management (URAM)</i> . h. Dukungan <i>Data Analytics</i> di Unit Eselon I Kemenkeu.		2019: 1. Joint Analysis (2019-2021dst); 2. Joint Audit (2019-2021dst); 3. Secondment & Peningkatan Kapasitas SDM (2019-2021dst); 4. <i>Joint Endorsement</i> di Kawasan Bebas/FTZ Batam, Bintan, Karimun & Sabang) (2019-2021dst) 5. Joint Investigasi (2019-2021dst); 6. Joint Collection (2019-2021dst); 7. Joint Proses Bisnis Kegiatan Impor (2019-2021dst); 8. Joint Proses Bisnis Kegiatan Ekspor (2019-2021dst); 9. Joint Proses Bisnis Kegiatan Cukai (2019-2021dst); 10. <i>Joint Proses Bisnis TPB</i> (2019-2021dst) 11. Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan framework EA ke dalam ORBUS iServer; 12. Membangun database bendahara Satker/SKPD yang terkoneksi antara DJPb-DJPB-DJP; 13. Kerjasama dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah (2019-2021dst) 2020: 14. Joint Proses Bisnis terkait pengawasan PNB Batubara (SIMBARA) (2020-2021dst); 15. Perluasan Provisi Pengawasan PNB SDA (Minerba/Migas/ Perikanan/Kebutuhan/Aset Hulu Migas, dsb) dan layanan K/L dengan melibatkan unit kerja di luar Kemenkeu (lintas Kementerian/Lembaga dan Pemda) (2020-2022); 2021: 16. Joint Intelligence (2021-2022dst), 17. Joint Provisi & TI: Pembangunan Integrasi Dokumen di KEK (2021-2025).	a.Peningkatan tata kelola penerimaan negara dalam rangka mendukung peningkatan <i>tax ratio</i> & mengurangi kebocoran penerimaan negara. b.Peningkatan tata kelola pemberian insentif fiskal. c.Meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak, Wajib Bayar, & Pengguna Jasa Kepabeanan & Cukai
			Risiko
			Tingginya kompleksitas koordinasi lintas Unit Eselon I Kemenkeu, K/L dan Pemda.
			Unit Pengelola
			a. <i>Initiative Champion</i> : Wakil Menteri Keuangan b. <i>Initiative Owner</i> : Dirjen Pajak, Dirjen BC, Dirjen Anggaran c. Anggota Tim: 1.SA (Bidang OBTI, Kebijakan PN, PPHP, Pengawasan Pajak, dan Kepatuhan Pajak), Ka.LNSW, SETJEN (Kepala Pusintek), 2.DJP (SesditJEN, Dir. PKP, Dir. Intelijen Perpajakan, Dir. Pemeriksaan dan Penagihan, Dir. Penegakan Hukum, Dir. DIP, Dir. Peraturan Perpajakan I, Dir. TPB, Dir. TIK, Dir. KITSDA), 3.DJBC (SesditJEN, Dir. Audit KC, Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Fasilitas Kepabeanan, Dir. Teknis dan Fasilitas Cukai, Dir. Penindakan dan Penyidikan, Dir. PPS, Dir. IKC, Tenaga Pengkaji PKKO, Tenaga Pengkaji PPHKC), 4.DJA (Dir. PNB SDA-KND, Dir. PNB K/L, Dir. SP, Tenaga Pengkaji PNB), 5.LNSW (Dir. EPB, Dir. PM, dan Dir. TI), 6.DJPB (Dir. SITP), 7.DJPK (Dir. ESI, Dir. KPT), 8.DJKN (Dir. PNKNL, Dir. PKNSI), 9.ITJEN (Inspektur I, II, III, IV, dan V), 10.BPPK (Ses. BPPK, Ka. Pusdiklat Pajak, Ka. Pusdiklat BC, Kapusdiklat Anggaran)

58



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

12. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Tersedianya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (<i>Core Tax Administration System</i>) yang terintegrasi, dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.		
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
a. Pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan tingginya ekspektasi Wajib Pajak terhadap penyediaan layanan perpajakan berbasis teknologi. b. Ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap sistem informasi dengan teknologi terbaru, terintegrasi, mencakup seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan (<i>decision support system</i>), andal, dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara. c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak belum berfokus kepada pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>core tax administration system</i>).	Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>Core Tax Administration System</i>) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara. Milestones 2019: 1. Pengadaan Agen Pengadaan. 2020: 2. Pengadaan <i>System Integrator</i> . 3. Jasa Konsultansi <i>Project Management and Quality Assurance</i> . 4. Jasa Konsultansi <i>Change Management</i> . 2021: 5. Penyelesaian seluruh arsitektur BDAT sesuai <i>framework</i> EA ke dalam ORBUS iServer (<i>proses bisnis existing</i>). 6. <i>Planning and Scoping</i> . 7. <i>High Level Design</i> . 8. <i>Detailed Design (2021-2022)</i> . 9. <i>Build (Solution Development) (2021-2022)</i> . 10. <i>Test and Quality Assurance (2021-2024)</i> . 2022: 11. Penyelesaian seluruh arsitektur BDAT sesuai <i>framework</i> EA ke dalam ORBUS iServer selesai (<i>proses bisnis to be</i>). 2023: 12. <i>Deploy and Support (2023-2024)</i> .	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru yang handal dan terintegrasi dengan proses bisnis inti administrasi perpajakan, serta memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara. Risiko a. Kegagalan migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru. b. Tidak terjaminnya ketersediaan anggaran selama proses Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (<i>core tax administration system</i>). c. Kegagalan proses lelang. d. Kegagalan proses interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.	a. Proses bisnis inti administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara bertahap. c. Mendukung peningkatan <i>tax ratio</i> secara bertahap.
Pendukung Kesuksesan	Unit Pengelola a. <i>Initiative Champion</i> : Wakil Menteri Keuangan b. <i>Initiative Owner</i> : Dirjen Pajak, Dirjen BC, Dirjen Anggaran c. Anggota Tim: 1. Sahli OBTI; 2. SETJEN (Karo Manajemen BMN dan Pengadaan, Pusintek, Karo Advokasi, Karo Perencanaan dan Keuangan, Karo Hukum, CTO, Karo SDM); 3. ITJEN (Inspektorat 1, Inspektorat 5, Inspektorat 7); 4. DJBC (Dir. IKC, Dir. Teknis dan Fasilitas, Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Fasilitas Kepabeanan); 5. DJPB (Dir. SITP, Dir. PKN, Dir. PA, Dir. SP, Dir. APK, Kepala KPPN KP (Khusus Penerimaan)).		

68



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

13. Pengembangan *National Logistics Ecosystem* – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Membangun ekosistem logistik nasional guna memperbaiki performa logistik Indonesia dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah.		
Latar belakang	Terobosan	Output	
a. Kinerja logistik Indonesia masih berada di peringkat 5 (lingkup ASEAN). b. Tingkat kemudahan berusaha (EODB) khususnya pada indikator <i>Trading Across Border (TAB)</i> belum ada peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. c. Biaya logistik Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 23,5% dari GDP (2016/2017). d. Proses perizinan impor ekspor masih membebani pelaku usaha.	a. Pengembangan Sistem NLE untuk mengolaborasi platform <i>logistics</i> berbasis ekosistem. b. Penyusunan Transformasi Probis Logistik, misal dengan SSm untuk mengurangi redundansi. c. Penyusunan regulasi dan aturan terkait NLE. d. Pendekatan intensif dan strakom yang tepat. e. Pembentukan tim kerja lintas sektor (K/L dan private)	a. Terhubungnya seluruh siklus logistik nasional (Pelayaran, <i>Kepelabuhanan, Trucking, Warehousing</i> , dan pembayaran) melalui kolaborasi platform-platform pemerintah dan swasta. b. Terciptanya sistem dan tata ruang kepelabuhanan yang mendorong efisiensi proses bisnis logistik di Pelabuhan. c. Terciptanya kemudahan akses ke sistem pemerintah melalui: 1. Tersedianya sistem SSm (Single Submission) Pengangkutan, sistem SSm Perizinan. 2. Tersedianya sistem SSm Pabean-Karantina dan berjalannya probis pemeriksaan bersama pabean-karantina. 3. Tersedianya API SSm di NLE yang dapat dimanfaatkan oleh platform logistics.	
	Milestones		
	2020: 1. Pembangunan <i>system single submission</i> (SSm) Pabean-Karantina. 2. Kolaborasi system-system pemerintah di bidang kegiatan logistics (2020-2023). 3. Kolaborasi platform-platform <i>trucking</i> (2020-2021). 4. Kolaborasi platform-platform <i>delivery order (D/O)</i> secara <i>online</i> . 5. Kolaborasi platform-platform pemesanan tempat di kapal secara online. 6. Kolaborasi platform-platform layanan penyerahan peti kemas secara <i>online</i> . 7. Kolaborasi platform-platform layanan pergudangan (2020-2021). 8. Kolaborasi platform-platform layanan depo penimbunan peti kemas (2020-2021). 9. Penerapan satu siklus <i>inbound</i> dalam platform NLE. 10. Kolaborasi platform-platform pembayaran secara online (2020-2021). 11. Menyederhanakan proses bisnis pembayaran penerimaan negara (2020-2021). 2021: 12. Terlaksananya sistem pembayaran tunggal dan pengoperasian tunggal operator terminal peti kemas. 13. Penerapan system pengoperasian tunggal oleh operator terminal peti kemas (<i>one gate and one system</i>). 2022: 14. Penerapan satu siklus outbound melalui platform kolaborasi. 15. Penerapan satu siklus outbound dan inbound melalui platform kolaborasi di 5 pelabuhan utama. 2023 – 2024: 16. Zonasi terminal peti kemas berdasarkan jenis kegiatan dan fungsi. 17. Sinkronisasi jalur kereta api peti kemas.		
Pendukung Kesuksesan		Outcomes	
a. Kapasitas IT dan anggaran yang memadai b. Partisipasi dan dukungan stakeholder (K/L, pengguna jasa, dan pelaku/penyedia jasa logistik) c. Penyelesaian integrasi probis dan peraturan terkait (K/L) d. Keberhasilan Change Management dan Strategi Komunikasi yang tepat kepada K/L, pengguna jasa, dan pelaku/penyedia jasa logistic.		a. Terciptanya transparansi sistem logistik dengan bergabungnya platform pembayaran dengan NLE. b. Peningkatan kemudahan akses layanan logistik oleh pengguna jasa. c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan logistic. d. Peningkatan peringkat EODB di Indonesia.	
Risiko		Unit Pengelola	
a. Hambatan koordinasi lintas sektor (antar-K/L). b. Resistensi pelaku usaha. c. Ketersediaan anggaran dan SDM.		a. <i>Initiative Champion</i> : Menteri Keuangan b. <i>Initiative Owner</i> : Dirjen Bea dan Cukai dan Ka. LNSW c. Anggota Tim: 1.DJBC (Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Informasi Kepabeanan dan Cukai, Dir. PPS, TP PPKC); 2.LNSW (Dir. Efisiensi Proses Bisnis, Dir. Penjaminan Mutu, Dir. Teknologi Informasi).	

88



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

14. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran – Tema Belanja

Tujuan Inisiatif	Meningkatkan efektivitas serta efisiensi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara.		
Latar belakang	Terobosan	Output	
a. Masih terdapat siklus perencanaan dan penganggaran APBN yang dilakukan secara manual, tidak efisien, dan tidak terintegrasi. b. Terdapat beberapa aplikasi dalam proses pengelolaan keuangan negara (KRISNA, RKA KL, SPAN Custom Web, SAKTI, Satu DJA). c. PP Nomor 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pasal 34.	a. Restrukturisasi 12 program menjadi 5 program di Kemenkeu dan di K/L dan belanja TKDD untuk menajamkan fokus program yang lebih koheren antar UE I dengan <i>impact</i> yang masif. b. Integrasi antara perencanaan dan sistem anggaran untuk memastikan data dari sistem penganggaran memberikan umpan balik ke sistem perencanaan dan sebaliknya. c. Memperkuat SAKTI sebagai sistem anggaran tunggal di Kemenkeu. d. Perampingan aplikasi untuk pemantauan realisasi anggaran. e. Reformasi proses anggaran melalui pembentukan program tata kelola COA dan kementerian lintas lini dalam rangka meningkatkan proses peninjauan belanja.	Aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.	
	Milestones	Outcomes	
	2019: 1. Desain integrasi <i>planning</i> dan <i>budgeting</i>. 2. Peraturan penggunaan KPJM sebagai <i>baseline</i> penyusunan Renja K/L. 3. Reviu atas aspek-aspek pelaksanaan revisi anggaran (TSP). 4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi <i>Outcome</i> Anggaran (2019 - 2020). 5. Otomasi penyusunan KEM PPKF. 6. Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan <i>framework</i> EA ke dalam ORBUS iServer. 2020: 7. Rancangan redesign sistem penganggaran baru khususnya program belanja K/L dan TKDD. 8. Implementasi modul anggaran SAKTI untuk seluruh satker K/L. 9. Tersedianya data dalam SLDK (termasuk penggunaan SAKTI) untuk penyusunan KEM PPKF. (2020 - 2021). 10. Perbaikan sistem monev kinerja anggaran melalui implementasi <i>Single Budget Monitoring System</i> sebagai <i>Single Source Of Truth</i> untuk monitoring di internal Kemenkeu. 11. Evaluasi mekanisme KPJM sebagai bahan penyusunan pagu indikatif. 12. Penyesuaian arsitektur BDAT sesuai dengan <i>framework</i> EA ke dalam ORBUS iServer. 2021: 13. Desain dan implementasi sistem penganggaran baru (<i>New Planning Based Budgeting</i>) di Kemenkeu, K/L, dan belanja TKDD (DAK).	a. Deviasi rumusan kinerja antara perencanaan dan penganggaran dengan gap kurang dari 5% tahun 2023. b. Pengurangan jumlah program secara nasional dengan rumusan nomenklatur yang lebih mencerminkan outcome yang dihasilkan (tidak berbasis struktur unit organisasi). c. Meningkatkan pencapaian kinerja aspek manfaat K/L sebesar 10% dalam mendukung program prioritas nasional pada tahun 2023 (dibanding sebelum implementasi redesign/2020).	
Pendukung Kesuksesan		Risiko	
a. Komitmen internal Kemenkeu. b. <i>Change management</i> dan sosialisasi yang intensif ke K/L. c. Kualitas SDM secara nasional untuk mendukung implementasi PBK (Perencanaan-Penganggaran, Pelaksanaan, dan Monev). d. Dukungan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi.		a. Kurangnya kesiapan dan pemahaman K/L dalam proses redesign dan proses penerapan SAKTI. b. Perbedaan pandang atas simplifikasi struktur di Unit Kemenkeu yang saat ini menangani revisi anggaran. c. Ketidakepakatan Bappenas dan KemenPAN-RB.	
		Unit Pengelola	
		a. <i>Initiative Champion</i>: Menteri dan Wakil Menteri Keuangan b. <i>Initiative Owner</i>: Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kepala BKF c. Anggota Tim: 1. DJA (Dir. Anggaran Bid Ekontim, Dir. Anggaran Bid PMK, Dir. Anggaran Bid Polhukam dan BA BUN, Dir. Sistem Penganggaran, dan Dir. Penyusunan APBN); 2. DJPK (Dir. Dana Transfer Khusus dan Dir. Evaluasi & Sistem Informasi); 3. DJPB (Dir. SITP dan Dir. Pelaksanaan Anggaran); 4. BKF (Kapus APBN dan Kapus KEM); 5. SETJEN (Kapusintek).	

88



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

15. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program Pensiun – Tema Belanja

Tujuan Inisiatif		Program pensiun dan THT yang lebih efektif dan efisien				
Latar belakang		Terobosan		Output		Outcome
a. Potensi beban APBN yang tinggi dari skema pensiun yang <i>existing (pay as you go)</i>: 1. Adanya keterbatasan anggaran. 2. Data menunjukkan belanja pensiun semakin meningkat dari tahun ke tahun. 3. Pengelolaan iuran pensiun belum optimal. b. Berdasarkan perhitungan dari PT ASABRI masih terdapat potensi <i>unfunded THT</i> yang perlu dikaji lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. c. UU ASN mengindikasikan perlunya reformasi di bidang pengelolaan program pensiun PNS. d. Amanat UU 12 Tahun 1980 yang memberikan ruang adanya overlapping pemberian pensiun. Beberapa orang mendapatkan pensiun dari jabatan berbeda. e. Meningkatnya <i>life expectancy</i> masyarakat		a. Pengelolaan Program Pensiun ASN dengan skema yang mendukung <i>fiscal sustainability</i>. b. Adanya kebijakan terkait lembaga pengelola, lembaga pendukung dan infrastruktur terkait pengelolaan skema pensiun yang baru (lembaga BUMN di bawah Kementerian Keuangan). c. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang memayungi program pensiun PNS yang baru.		a. Perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun PNS b. Perbaikan kelembagaan penyelenggara program pensiun Pegawai Negeri c. Peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun		a. Peningkatan kesejahteraan ASN setelah purna tugas. b. <i>Sustainability</i> pengelolaan dana pension.
		Milestones 2019: 1. Penyusunan regulasi skema pensiun dan JHT yang baru. (2019-2020) 2. Penyusunan regulasi kelembagaan penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru. (2019-2020) 2021: 3. Persiapan dan Pelaksanaan Ratas. 4. Penetapan regulasi program pensiun dan JHT yang baru. 5. Penetapan regulasi kelembagaan penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru. 6. Persiapan Implementasi sistem JP dan JHT PNS yang baru (2021-2022). 2022: 7. Persiapan implementasi sistem dan operasional lembaga penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru.		2020 2021 2022 2023 1,48T 12T 12,5T 12,85T 13,2T		
		Risiko a. Dinamika pembahasan reformasi pensiun di tingkat nasional. b. Tingginya resistensi dari lembaga penyalur dana pensiun saat ini (PT Taspen). c. Adanya resistensi dari pejabat/pegawai yang telah menikmati manfaat pensiun lebih dari satu jabatan. d. Beban anggaran Pemerintah, khususnya Pemda dalam memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja untuk ikut membayar iuran.				
		Unit Pengelola a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Staf Ahli Menkeu bidang Pengeluaran Negara b. <i>Initiative Owner</i>: Direktur Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c. Anggota Tim: 1.DJA; 2.DJKN; 3.BKF; 4.DJPB; 5.DJPK; 6.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum).				
Pendukung Kesuksesan a. RPP turunan UU ASN pengelolaan program pensiun; b. Kesepahaman antara Kementerian Keuangan , Bappenas, Men-PAN RB, BKN dan KASN terkait skema pengelolaan pensiun.						

68



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

16. Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Negara – Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif		Penguatan pengelolaan aset negara untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial melalui peningkatan PNBPN dan <i>cost saving</i>				
Latar belakang		Terobosan		Output	Outcomes	
a. Kebijakan pemindahan ibukota membutuhkan kebijakan pengelolaan aset. b. Aplikasi yang ada belum dapat berperan sebagai <i>single source of truth</i> yang mampu menyajikan informasi <i>up to date</i> terkait aset negara dan mendukung pengelolaan aset negara secara <i>end to end</i>. c. Belum optimalnya proses pada pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan aset negara. d. Masih terdapat aset negara yang status kepemilikannya belum jelas. e. Kurangnya insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara f. Adanya PP 46 yang menetapkan tugas penyusunan neraca SDA dilakukan oleh BPS dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu (cq. DJKN) untuk penilaian aset SDA.		a. Percepatan penyusunan portofolio aset negara untuk mendukung penerapan <i>capital charge mechanism</i>. b. Penguatan SIMAN agar dapat mengakomodasi pengelolaan aset negara secara <i>end to end</i> meliputi penyediaan <i>data master</i> aset, perencanaan aset, persediaan dan revaluasi, <i>underlying</i> aset pada SBSN, dan portofolio aset negara. c. Perbaikan tata kelola pengelolaan aset negara dalam lingkup pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan aset d. Sentralisasi pengelolaan aset di Kemenkeu sebagai Pengguna Barang. e. Penguatan standarisasi biaya pemeliharaan aset negara secara nasional. f. Utilisasi aset Kemenkeu meliputi efektifitas penggunaan ruang kerja dan komersialisasi ruang untuk meningkatkan PNBPN. g. Penilaian aset sumber daya alam dalam rangka mendukung penyusunan neraca SDA. h. Pemberian insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi aset.		SIMAN versi 2 yang mendukung penguatan proses bisnis pengelolaan aset negara.	a.Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pengelolaan aset negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	
				Risiko		b.Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari aset.
				Resistensi K/L lain untuk mendukung penyusunan informasi mengenai aset sumber daya alam.		
				Unit Pengelola		
Pendukung Kesuksesan		Milestones		a. <i>Initiative Champion</i> : Direktur Jenderal Kekayaan Negara		
a. Komitmen dan dukungan pimpinan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang terkait dengan pengelolaan aset negara. b. Dukungan K/L lain dalam penyediaan data aset dan data aset sumber daya alam yang akurat serta dukungan dalam pengambilalihan kembali aset negara yang masih dikuasai pihak lain. c. Sarana dan prasarana TIK. d. Implementasi SAKTI oleh seluruh K/L yang memigrasikan penggunaan SIMAK.		2020:		b. <i>Initiative Owner</i> : Direktur Jenderal Kekayaan Negara		
		2021:		c. Anggota Tim:		
		2024:				
		2025:				
		2026:				
		2027:				
		2028:				
		2029:				
		2030:				
		2031:				
		2032:				
		2033:				
		2034:				
		2035:				
		2036:				
		2037:				
		2038:				
		2039:				
		2040:				
		2041:				
		2042:				
		2043:				
		2044:				
		2045:				
		2046:				
		2047:				
		2048:				
		2049:				
		2050:				
		2051:				
		2052:				
		2053:				
		2054:				
		2055:				
		2056:				
		2057:				
		2058:				
		2059:				
		2060:				
		2061:				
		2062:				
		2063:				
		2064:				
		2065:				
		2066:				
		2067:				
		2068:				
		2069:				
		2070:				
		2071:				
		2072:				
		2073:				
		2074:				
		2075:				
		2076:				
		2077:				
		2078:				
		2079:				
		2080:				
		2081:				
		2082:				
		2083:				
		2084:				
		2085:				
		2086:				
		2087:				
		2088:				
		2089:				
		2090:				
		2091:				
		2092:				
		2093:				
		2094:				
		2095:				
		2096:				
		2097:				
		2098:				
		2099:				
		2100:				
		2101:				
		2102:				
		2103:				
		2104:				
		2105:				
		2106:				
		2107:				
		2108:				
		2109:				
		2110:				
		2111:				
		2112:				
		2113:				
		2114:				
		2115:				
		2116:				
		2117:				
		2118:				
		2119:				
		2120:				
		2121:				
		2122:				
		2123:				
		2124:				
		2125:				
		2126:				
		2127:				
		2128:				
		2129:				
		2130:				
		2131:				
		2132:				
		2133:				
		2134:				
		2135:				
		2136:				
		2137:				
		2138:				
		2139:				
		2140:				
		2141:				
		2142:				
		2143:				
		2144:				
		2145:				
		2146:				
		2147:				
		2148:				
		2149:				
		2150:				
		2151:				
		2152:				
		2153:				
		2154:				
		2155:				
		2156:				
		2157:				
		2158:				
		2159:				
		2160:				
		2161:				
		2162:				
		2163:				
		2164:				
		2165:				
		2166:				
		2167:				
		2168:				
		2169:				
		2170:				
		2171:				
		2172:				
		2173:				
		2174:				
		2175:				
		2176:				
		2177:				
		2178:				
		2179:				
		2180:				
		2181:				
		2182:				
		2183:				
		2184:				
		2185:				
		2186:				
		2187:				
		2188:				
		2189:				
		2190:				
		2191:				
		2192:				
		2193:				
		2194:				
		2195:				
		2196:				
		2197:				
		2198:				
		2199:				
		2200:				
		2201:				
		2202:				
		2203:				
		2204:				
		2205:				
		2206:				
		2207:				
		2208:				
		2209:				
		2210:				
		2211:				
		2212:				
		2213:				
		2214:				
		2215:				
		2216:				
		2217:				
		2218:				
		2219:				
		2220:				
		2221:				
		2222:				
		2223:				
		2224:				
		2225:				
		2226:				
		2227:				
		2228:				
		2229:				
		2230:				
		2231:				
		2232:				
		2233:				
		2234:				
		2235:				
		2236:				
		2237:				
		2238:				
		2239:				
		2240:				
		2241:				
		2242:				
		2243:				
		2244:				
		2245:				
		2246:				
		2247:				
		2248:				
		2249:				
		2250:				
		2251:				
		2252:				
		2253:				
		2254:				
		2255:				
		2256:				
		2257:				
		2258:				
		2259:				
		2260:				
		2261:				
		2262:				
		2263:				
		2264:				
		2265:				
		2266:				
		2267:				
		2268:				
		2269:				
		2270:				
		2271:				
		2272:				
		2273:				
		2274:				
		2275:				
		2276:				
		2277:				
		2278:				
		2279:				
		2280:				
		2281:				
		2282:				
		2283:				
		2284:				
		2285:				
		2286:				
		2287:				
		2288:				
		2289:				
		2290:				
		2291:				
		2292:				
		2293:				
		2294:				
		2295:				
		2296:				
		2297:				
		2298:				
		2299:				
		2300:				
		2301:				
		2302:				
		2303:				
		2304:				
		2305:				
		2306:				
		2307:				
		2308:				
		2309:				
		2310:				
		2311:				
		2312:				
		2313:				
		2314:				
		2315:				
		2316:				
		2317:				
		2318:				
		2319:				
		2320:				
		2321:				
		2322:				
		2323:				
		2324:				
		2325:				
		2326:				
		2327:				
		2328:				
		2329:				
		2330:				
		2331:				
		2332:				
		2333:				
		2334:				
		2335:				
		2336:				
		2337:				
		2338:				
		2339:				
		2340:				
		2341:				
		2342:				
		2343:				
		2344:				
		2345:				
		2346:				
		2347:				
		2348:				
		2349:				
		2350:				
		2351:				
		2352:				
		2353:				
		2354:				
		2355:				
		2356:				
		2357:				
		2358:				
		2359:				
		2360:				
		2361:				
		2362:				
		2363:				
		2364:				
		2365:				
		2366:				
		2367:				
		2368:				
		2369:				
		2370:				
		2371:				
		2372:				
		2373:				
		2374:				
		2375:				
		2376:				
		2377:				
		2378:				
		2379:				
		2380:				
		2381:				
		2382:				
		2383:				
		2384:				
		2385:				
		2386:				
		2387:				
		2388:				
		2389:				
		2390:				
		2391:				
		2392:				
		2393:				
		2394:				
		2395:				
		2396:				
		2397:				
		2398:				
		2399:				
		2400:				
		2401:				
		2402:				
		2403:				
		2404:				
		2405:				
		2406:				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

17. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*) – Tema
Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif		Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital.	
Latar belakang	Terobosan	Outputs	
a. Administrasi pelaksanaan anggaran masih berdasar <i>hardcopy</i> sehingga membebani pejabat perbendaharaan di satker. b. Satker sulit memenuhi norma waktu dan jadwal pembayaran. c. Sistem informasi pelaksanaan anggaran masih terpisah dengan berbagai sistem elektronik pendukung.	a. Melaksanakan sertifikasi sistem elektronik dan dokumen elektronik yang dipergunakan dalam pelaksanaan anggaran. b. Mewujudkan administrasi keuangan <i>full</i> elektronik, yang legal, dan aman. c. menginterkoneksi SAKTI dengan berbagai sistem pendukung sehingga jadwal pembayaran dapat dilakukan lebih akurat. d. Membentuk unit pengelola untuk kanal elektronik yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan pengguna SAKTI. e. Melakukan simplifikasi dan otomasi validasi terhadap pelaksanaan belanja di Satker. f. Mewujudkan infrastruktur <i>data analytic</i> yang lebih akurat pada pelaksanaan anggaran.	Tersedianya regulasi, sistem, dan unit pengelola pelaksanaan anggaran yang mengakomodasi transaksi <i>full</i> elektronik	
	Milestones	Outcomes	
	2019: 1. Penyelesaian Desain <i>Shared Service Center</i> (SSC) dan <i>Government Platform</i> . 2. Penyusunan dan penyelesaian regulasi (2019-2020). 3. Pembangunan Sistem SSC. 4. Pembentukan Unit Pengelola SSC (2019-2020). 5. Penyelesaian kajian pembayaran gaji <i>fortnightly</i> . 6. Pengembangan Aplikasi untuk KKP (Penyesuaian Sistem Aplikasi SAS, SILABI, SAIBA, dan SAKTI untuk entry data kartu kredit pemerintah/KKP). 7. Penyelesaian arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi terkait <i>Shared Service</i> sesuai dengan <i>framework Enterprise Architecture</i> ke dalam <i>Orbus iServer</i> . 8. Implementasi penuh KKP (<i>full implementation</i>) oleh seluruh K/L. 2020: 9. Implementasi SSC Payroll di Kemenkeu. 10. Implementasi SSC Non-Payroll (2020-2021). 11. Sertifikasi sistem pembayaran pemerintah. 12. Pembangunan interkoneksi sistem pengujian transaksi KKP dengan SAKTI. 2021: 13. Pengkajian dan implementasi sertifikasi sistem dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. 14. Reviu pelaksanaan dan perluasan piloting PPP tahap I (2021-2022). 15. Perencanaan Piloting PPP Tahap II dan III (2021-2022). 16. Pelaksanaan <i>change management and communication</i> . 17. Penguatan implementasi KKP (2021-2022). 18. Implementasi <i>Digital Payment-Marketplace</i> (DigiPay) (2021-2022). 19. Pembentukan unit <i>dedicated</i> pengelola platform (2021-2024).....bersambung	a. Administrasi pelaksanaan anggaran secara digital, sehingga terjadi penurunan <i>clerical works</i> pada K/L/Satker. b. Data pelaksanaan anggaran pada Kemenkeu lebih akurat dan detil sehingga <i>data analytics</i> dapat dijalankan oleh Kantor Pusat DJPb, KPPN, dan Kanwil DJPb. c. Kepastian pembayaran belanja pemerintah melalui jadwal pembayaran. d. Berkurangnya norma waktu pemrosesan belanja negara (<i>common expenses</i>).	
Pendukung Kesuksesan		Risiko	
a. Ditetapkannya payung hukum pelaksanaan anggaran berbasis digital. b. Tersedianya <i>IT Infrastructure</i> yang memadai. c. SAKTI diimplementasikan di seluruh K/L. d. Dikembangkannya Platform Pembayaran Pemerintah dan unit pengelolanya. e. Sertifikasi Sistem Elektronik pada Pelaksanaan Anggaran. f. Implementasi <i>Digital Signature</i> untuk mendukung otomasi validasi.		a. Kesiapan regulasi pelaksanaan anggaran dalam ekosistem digital. b. Kesiapan sistem elektronik dan infrastruktur jaringan IT. c. Ketidakpatuhan pengguna sistem sehingga jadwal pembayaran tidak berhasil.	
		Unit Pengelola	
		a. <i>Initiative Champion</i> : Menteri & Wakil Menteri Keuangan b. <i>Initiative Owner</i> : Direktur Jenderal Perbendaharaan c. Anggota Tim: 1. Staf Ahli Bidang OBTI; 2. Staf Ahli Bidang Pengeluaran; 3. DJPb (Sekretaris DITJEN, Dir. SP, Dir. SITP, Dir. PA, Dir. PKN, Ka. Kanwil DJPb DKI Jakarta); 4. SETJEN (Ka. Pusintek, Ka. Biro Hukum, Ka. Biro SDM, Ka. Biro Cankeu, Ka. Biro Organta, Ka. CTO); 5. ITJEN (Ir III, Ir IV, Ir VII); 6. Pejabat setingkat Es 2 terkait pada BKF, DJPPR, DJA, DJPK, DJKN, Kemkominfo, BPPT, BSSN, BI, PLN, Himbara dan Telkom; 7. EY.	

5



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

17. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*) – Tema
Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital.	
Milestones (lanjutan)	
2022: 20. Perluasan piloting PPP tahap I. 21. Persiapan dan implementasi piloting PPP tahap II. 22. Reviu pelaksanaan piloting PPP tahap I dan II. 23. Pelaksanaan <i>change management and communication</i> .	2023: 24. <i>Roll out</i> pembayaran gaji Kemenkeu. 25. Perluasan piloting PPP tahap II. 26. Persiapan dan implementasi piloting PPP tahap III. 27. Reviu pelaksanaan piloting PPP tahap I, II, dan III. 28. Pelaksanaan <i>change management and communication</i> .

68



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

18. Harmonisasi Belanja APBN dengan Belanja APBD Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional – Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan mendorong belanja pemerintah daerah yang efisien dan produktif serta penyediaan data pemerintah daerah hingga level data transaksi yang lengkap, andal dan tepat waktu untuk mendukung penyesuaian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan fiskal secara nasional.		
Latar belakang	Terobosan	Output	
a. Pemanfaatan alokasi TKDD belum dapat dipantau secara optimal. b. Terdapat kebutuhan data Pemda hingga level transaksi untuk mengetahui penggunaan dana alokasi yang disalurkan pemerintah pusat dan untuk penyusunan konsolidasi informasi keuangan Pusat dan Daerah serta statistik keuangan pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal secara nasional. c. Banyaknya variasi aplikasi sistem keuangan Pemda yang belum terintegrasi dan belum menggunakan Bagan Akun yang standar. d. Peningkatan Pengawasan kewajiban pemotongan dan pemungutan Perpajakan oleh Pemda.	a. Penyediaan data Pemda pada level transaksi dengan mengedepankan kualitas data. b. Menyelaraskan Bagan Akun Pemda dengan Bagan Akun pemerintah pusat. c. Mewujudkan konsolidasi informasi keuangan pusat dan di daerah pada level data transaksi berdasarkan Bagan Akun Standar. d. Menjadikan SIKD sebagai <i>Single Source of Truth</i> data keuangan daerah di level Nasional, yang juga menjadi sumber data bagi GFS-SIKRI.	a. Penetapan regulasi dalam rangka peningkatan kualitas belanja pemda (SHSR, sistem insentif berbasis kinerja) – 2020. b. Ketersediaan data transaksi pemda (70%) – 2020. c. Ketersediaan data transaksi pemda (100%) – 2021. d. SIKD sebagai <i>Single Regional Report</i> – 2021. e. Laporan konsolidasi pusat dan daerah – 2022.	
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Outcomes	
a. Komitmen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan disiplin pelaporan pemda. b. Tersedianya peraturan yang mendorong pemda menyediakan data hingga level transaksi. c. Tersedianya aplikasi yang dapat mengintegrasikan data di level transaksi dari pemda dengan akun yang standar. d. SDM pemda yang memadai dan kompeten. e. Penetapan kode unik satker dalam rangka pengawasan perpajakan.	2019: 1. Pengembangan SIKD (core, agen, dan ikonsol), Tahap I untuk menyediakan informasi keuangan keuangan Pemda, yang mencakup semua jenis data transaksi harian maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 2. Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan framework EA ke dalam ORBUS iServer. 3. Piloting beberapa Pemda dalam penyediaan informasi keuangan pada level data transaksi. 2020: 4. Penetapan SIKD sebagai <i>single source of truth data</i> keuangan pemda. 5. Peningkatan kualitas belanja pemda. 2021: 6. Pengembangan SIKD dalam rangka penguatan evaluasi desentralisasi fiskal dan simplifikasi pelaporan. 7. Implementasi peningkatan kualitas belanja pemda. 2022: 8. Konsolidasi data keuangan pemerintah pusat dan daerah melalui GFS-SIKRI.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan daerah.	
		Risiko	
		a. Resistensi pemda terhadap perubahan kebijakan (BAS dan penggunaan aplikasi SIKD). b. Kualitas data dari pemda bervariasi.	
		Unit Pengelola	
		a. <i>Initiative Champion</i> : Menteri dan Wamenkeu b. <i>Initiative Owner</i> : Dirjen Perimbangan Keuangan c. Anggota Tim: 1.DJPK (Sekretaris DJPK, Dir. ESI, Dir. DTU, Dir. DTK, Dir. KPT & JF AKPD); 2.DJPB (Dir. DSP, Dir. APK, Dir. PKN, & Dir. SITP); 3.DJP (Dir. PKP & Dir. DIP); 4.DJA (Dir. DSP & Dir. HPP); 5.SETJEN (Karo Hukum dan Kapusintek); dan 6.BPPK (Sekretaris BPPK dan Kapusdiklat KNPK)	

58



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

19. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara - Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan terintegrasinya informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta <i>business intelligence</i> pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang komprehensif, serta meningkatkan sinergi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.		
Latar belakang	Terobosan	Output	
a. Hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal menyatakan perlunya pemerintah menyajikan informasi fiskal integrasi posisi fiskal nasional (gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah), sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan dapat terlihat. b. Rekomendasi DPR kepada pemerintah melalui UU P2 APBN 2013 agar pemerintah mengkonsolidasikan LKPP dan LKPD, serta menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah/ <i>Government Finance Statistics</i> secara berkala. c. Pemanfaatan data keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkonsolidasi dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal nasional dan regional yang komprehensif. d. Peningkatan sinergi dan harmonisasi pengelolaan keuangan pusat dan daerah untuk mewujudkan efektivitas penggunaan alokasi anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan.	a. Penyelarasan dan pembakuan struktur data keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka sinergi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan. b. Tersedianya <i>one source data</i> (data transaksi keuangan dan data laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkonsolidasi yang dapat dimanfaatkan sebagai <i>business intelligence</i> untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal tingkat nasional dan regional. c. Penyusunan konsolidasi data/informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada level bagan akun standar, level laporan keuangan, dan level transaksi melalui interkoneksi SPAN dan SIKD. d. Sinergi pengelolaan keuangan dan pemanfaatan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	a. Produk Hukum SIKRI sebagai Platform SIKRI integrasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (2021). b. Data neraca keuangan pusat dan daerah untuk analisis fiskal (2021). c. BAS Konsolidasian (2022). d. Konsolidasi Data Transaksi pemerintah pusat dan Daerah (2022). e. <i>Data Analytics</i> (2023). f. <i>Business Intelligence</i> Keuangan Pemerintah (2024).	
		Outcomes	
		a. Peningkatan sinergi pengelolaan keuangan melalui integrasi informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. b. Mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang inklusif dan terkonsolidasi.	
	Milestones	Risiko	
Pendukung Kesuksesan	2020: 1. Pengusulan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (termasuk penetapan dan penyelarasan BAS pemerintah daerah dengan BAS pemerintah pusat) (2020 - 2024). 2021: 2. Penetapan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (termasuk penetapan dan penyelarasan BAS pemerintah daerah dengan BAS pemerintah pusat) (2021 - 2022). 3. Pengembangan SIKRI (2021-2024). 2022: 4. Peningkatan kualitas sinergi pengelolaan keuangan melalui integrasi informasi keuangan pemerintah pusat dan pemda.	a. Terjadinya perubahan kebijakan dan/atau tertundanya peraturan yang melandasi standardisasi pengelolaan keuangan daerah. b. Variasi bagan akun standar, kebijakan akuntansi, kualitas, format, dan kelengkapan data/informasi keuangan pemerintah daerah. c. Tertundanya penyelesaian sistem informasi yang menyediakan data/informasi keuangan pemerintah daerah pada level transaksi.	
		Unit Pengelola	
a. Koordinasi dan komitmen seluruh stakeholder internal dan eksternal Kementerian Keuangan untuk penyediaan data/informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang andal, lengkap dan tepat waktu; b. Tersedianya sistem informasi yang dapat menyediakan data keuangan pemerintah daerah pada level transaksi yang dapat memenuhi kebutuhan integrasi informasi keuangan dan penyusunan laporan konsolidasian dan statistik keuangan Pemerintah secara, lengkap, andal dan tepat waktu.		a. <i>Initiative Champion</i>: Menteri dan Wakil Menteri Keuangan b. <i>Initiative Owner</i>: Direktur Jenderal Perbendaharaan c. Anggota Tim: 1.Staf Ahli OBTI; 2.DJPb (Dir. APK, Dir. SITP, Dir. SP, Dir. PA, Dir. PKN); 3.DJPK (Dir. ESI); 4.SETJEN (Kepala Pusintek); 5.BKF (Kepala PAPBN, Kepala PKEM); 6.DJA (Dir. Penyusunan APBN).	

58



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

20. Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara – Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif		Tersedianya kerangka kerja sebagai acuan (<i>guideline</i>) pengelolaan Risiko Keuangan Negara (RKN) yang terstruktur, antisipatif, efektif, komprehensif, dan terintegrasi.	
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
a. Jenis dan kompleksitas risiko yang dikelola sangat beragam, sehingga diperlukan suatu kerangka kerja (<i>framework</i>) sebagai panduan dan wujud akuntabilitas dalam pengelolaan risiko keuangan negara. b. Pengelolaan risiko keuangan negara perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga mitigasi risiko yang dilakukan lebih antisipatif (<i>pre-emptive</i>), efektif, dan komprehensif. c. Tindak lanjut rekomendasi BPK RI untuk menyusun kerangka kerja pengelolaan risiko Keuangan Negara. d. Kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara perlu diinstitutionalkan dan diformalkan.	a. Peningkatan integrasi <i>framework</i> RKN dengan ALCO dan ERM Kemenkeu secara proporsional, sehingga masing-masing <i>framework</i> tetap efektif, saling memperkuat, namun tidak memunculkan duplikasi dalam prosesnya. b. Penyusunan kajian <i>framework</i> RKN bersama ADB. c. Peningkatan kualitas analisis dan pelaporan RKN yang bersifat periodik, <i>pre-emptive</i> , terintegrasi dan holistik, termasuk menyediakan <i>early warning system</i> yang efektif. d. Penyusunan strategi pengelolaan RKN sebagai pedoman operasionalisasi pengelolaan RKN dan komunikasi kepada <i>stakeholders</i> , sekaligus upaya integrasi dengan dokumen perencanaan lain misal MTBEF, KEMPPKF, dan Strategi Pembiayaan. e. Pengembangan sistem aplikasi dan basis data pendukung pengelolaan RKN (antara lain: <i>dashboard</i> MR BUMN, <i>dashboard</i> move penjaminan PEN, sistem monitoring penjaminan BUPI, sistem informasi penatausahaan tuntutan hukum, <i>risk register</i> , <i>early warning system</i>).	a. Legal basis kerangka kerja risiko keuangan negara. b. Legal basis strategi pengelolaan risiko keuangan negara. c. Laporan dan rekomendasi risiko secara <i>ad hoc</i> maupun periodik yang komprehensif dan terintegrasi, sekaligus berfungsi sebagai <i>early warning system</i> . d. Sistem aplikasi dan basis data pengelolaan RKN.	a. Risiko keuangan negara yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal. b. Peningkatan kepercayaan dari <i>stakeholders</i> terhadap pengelolaan RKN (peningkatan nilai transparansi fiskal).
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Risiko	
a. <i>Framework</i> ERM dan ALCO Kemenkeu telah diterapkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, dimana kedua hal tersebut memiliki kaitan erat dengan RKN. b. Terdapat <i>dedicated unit</i> pengelola risiko keuangan negara (Dit. PRKN, DJPPR). c. Secara umum pengelolaan RKN saat ini sudah sejalan dengan praktek di beberapa negara (a.l. UK, Australia, NZ, Brazil) serta rujukan internasional (WB, IMF, OECD). d. Tersedia TA dari ADB untuk penyusunan <i>framework</i> RKN.	2021: 1. Penyusunan legal basis untuk kerangka kerja risiko keuangan negara. 2. Penerapan kerangka kerja risiko keuangan negara termasuk penyusunan laporan risiko keuangan negara. 3. Penyusunan Strategi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. 4. Penyusunan KMK Komite RKN. 5. Penyusunan sistem aplikasi dan basis data terkait penerapan kerangka kerja risiko keuangan negara. 2022: 6. Penerapan sistem aplikasi monitoring risiko keuangan negara dalam rangka mendukung implementasi pengelolaan risiko keuangan negara. 7. Reviu kerangka kerja risiko keuangan negara. 8. Reviu Strategi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.	a. Resistensi dari unit pemilik risiko dan/atau area lain yang terkait RKN, khususnya mengenai <i>confidentiality</i> dan/atau independensi. b. Target transisi ke integrasi yang holistik memerlukan <i>effort</i> dan sumber daya yang memadai.	
		Unit Pengelola	
		a. <i>Initiative Champion</i> : Direktur Jenderal PPR b. <i>Initiative Owner</i> : Direktur Jenderal PPR c. Anggota Tim: 1. DJPPR (Direktur PRKN, Sekretaris DITJEN PPR, Direktur SPP); 2. SETJEN (Kepala Biro Cankeu, Kepala Biro Hukum).	

86



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

21. Sustainable Development Goals Bond - Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif		Penerbitan <i>Sustainable Development Goals Bond</i> (SDGs Bond)	
Latar belakang	Terobosan		Output
a. Keberhasilan penerbitan <i>thematic bond</i> sebelumnya yaitu <i>Global Green Sukuk</i> dan perlunya perluasan cakupan <i>thematic</i> dengan menambahkan <i>social projects</i>. b. Perlunya penyelarasan pembiayaan APBN dengan pencapaian tujuan SDGs sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Presiden dalam Nawacita serta RPJMN 2020-2024. c. Terdapat potensi permintaan dari investor untuk penempatan dana di <i>thematic bond</i>. d. Perlunya memperkuat persepsi internasional terhadap komitmen Indonesia dalam pencapaian <i>sustainable goals</i>. e. Perlunya memperluas basis investor Surat Berharga Negara khususnya <i>socially responsible investors</i>.	a. Peningkatan kolaborasi dengan Bappenas dan K/L terkait dalam penentuan proyek SDGs dan <i>Annual Report SDGs Bonds</i>. b. Perluasan basis investor melalui pengembangan <i>framework</i> dan cakupan proyek <i>underlying</i> dengan penambahan <i>social project</i>. c. Peningkatan <i>awareness</i> K/L terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).		a. <i>SDGs Bond/Sukuk Framework</i>. b. Transaksi <i>SDGs Bond/Sukuk</i>. c. <i>Annual Report SDGs Bond</i>.
	Outcomes		a. Perluasan basis investor SBN. b. Diversifikasi instrumen pembiayaan APBN. c. Tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). d. Memperkuat persepsi internasional terhadap komitmen Indonesia dalam pencapaian SDGs.
	Milestones		Risiko
	2021: - Pembentukan Tim Koordinasi Penerbitan <i>SDGs Bonds</i>. - Penyusunan <i>SDGs Bond/Sukuk Framework</i>. - Penerbitan <i>SDGs Bonds</i>-tahun 2021. - Penyusunan <i>Annual Report SDGs Bonds (2021-2022)</i>. 2022: - Penerbitan <i>SDGs Bonds</i> tahun 2022.		a. Kurangnya <i>awareness</i> dan komitmen K/L untuk melakukan <i>budget tagging</i> dan kontribusi dalam penyusunan <i>annual report</i> terkait <i>SDGs Bonds</i>. b. <i>External reviewer/ SPO (Second Party Opinion)</i> memberikan rekomendasi/reviu yang tidak sesuai sehingga <i>SDGs Bonds</i> tidak dapat diterbitkan.
Pendukung Kesuksesan		Unit Pengelola	
a. RPJMN 2020-2024 dan dokumen <i>Roadmap of SDGs Indonesia: A Highlight</i>. b. Komitmen K/L untuk melakukan <i>budget tagging</i> proyek SDGs dan kontribusi K/L dalam penyusunan <i>Annual Report</i> terkait <i>SDGs Bonds</i>.		a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko b. <i>Initiative Owner</i>: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. Anggota Tim: 1.DJPPR (Direktur Surat Utang Negara, Direktur Pembiayaan Syariah, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan); 2.DJA (Direktur Sistem Penganggaran); 3.DJPB (Direktur Pelaksanaan Anggaran); 4.BKF (Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral).	

64



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

22. *Data Analytics* Tema Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien (Sentral)

Tujuan Inisiatif Pemanfaatan <i>data analytics</i> untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien			
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
a. Perlunya analisis atas informasi SDM pada HRIS sebagai sistem informasi manajemen SDM untuk mendukung pengambilan keputusan terkait manajemen SDM di lingkungan Kemenkeu. b. Adanya kebutuhan untuk peningkatan pengalaman pembelajaran serta pengembangan kapasitas SDM peserta pelatihan BPPK. c. Adanya kebutuhan optimalisasi aset mengingat masih terdapat aset BMN dengan status <i>idle</i> , <i>underutilized</i> , atau aset yang dapat dimanfaatkan untuk komersil namun tidak dikelola dengan baik. d. <i>Dwelling time</i> sebagai indikator kinerja Indonesia di bidang logistik memerlukan analisis yang dalam dan akurat untuk menunjang pengambilan keputusan.	a. Mendapatkan aliran data kompetensi pegawai. b. Menyediakan aliran data kebutuhan pelatihan pegawai. c. Menyediakan aliran data terkait pengembangan kapasitas SDM. d. Menyediakan aliran data BMN Kemenkeu. e. Menyediakan aliran data terkait <i>dwelling time</i> .	a. Tersedianya <i>dashboard Association Rule</i> kompetensi pegawai. b. Tersedianya fitur rekomendasi pelatihan untuk pegawai pada aplikasi KLC. c. <i>Dashboard</i> pengembangan kapasitas SDM bagi seluruh UE I. d. Tersedianya sistem/ <i>tools data analytics</i> rekomendasi optimalisasi dan utilisasi BMN Kemenkeu guna mendukung pelaksanaan manajemen BMN. e. Deskripsi dan prediksi angka <i>dwelling time</i> dalam jangka pendek (tahunan).	a. Peningkatan kualitas kebijakan dan pengelolaan SDM Kemenkeu yang cepat, akurat, dan akuntabel. b. Peningkatan pengalaman dan <i>performance</i> pembelajaran peserta pelatihan c. Pengambilan keputusan terkait pengembangan SDM melalui pelatihan menjadi lebih berkualitas d. Peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan BMN Kemenkeu. e. Potensi penerimaan PNBP dari aset BMN Kemenkeu f. Angka <i>dwelling time</i> yang terkontrol dan perbaikan kinerja logistik K/L dan <i>stakeholder</i> yang terlibat.
Pendukung Kesuksesan	Milestones (2021)		Risiko
	1. Analisis <i>Association Rule</i> untuk rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai (SETJEN) 2. <i>Data Analytics to Improve Learning Process</i> (BPPK) 3. Data Analitik Pengembangan Kompetensi SDM Melalui Pembelajaran (BPPK) 4. Sistem Rekomendasi Optimalisasi dan Utilisasi BMN Kemenkeu (SETJEN) 5. Analisis <i>Dwelling Time</i> (LNSW) (2021-2022).		Kesiapan kapasitas pengetahuan SDM dan infrastruktur TI dalam pembangunan Data Analytics
			Unit Pengelola
a. Dukungan dan komitmen pimpinan. b. Pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM serta infrastruktur TI. c. Ketersediaan data pendukung.			a. <i>Initiative Champion</i> : Sekretaris Jenderal, Kepala BPPK, Kepala LNSW b. <i>Initiative Owner</i> : Sekretaris Jenderal, Kepala BPPK, Kepala LNSW

68



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

23. *Data Analytics* Tema Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

Tujuan Inisiatif Pemanfaatan <i>data analytics</i> untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.			
Latar belakang	Terobosan	Output	Outcome
a. Kebutuhan sistem peringatan dini untuk mendeteksi perubahan kondisi ekonomi dan keuangan yang dapat berimplikasi lebih lanjut pada stabilitas ekonomi, sektor keuangan, dan fiskal. b. Perlunya analisis dampak kebijakan secara sistematis untuk menyempurnakan kebijakan dana desa 5 tahun ke depan. c. <i>Logistic Performance Indeks</i> (LPI) yang masih rendah karena ketepatan waktu dan keandalan (<i>reliability</i>) dalam mobilitas logistik masih menjadi masalah utama.	a. Mendapatkan aliran data <i>macro-finance</i> , seperti <i>global economy</i> , <i>macro stability</i> , pasar keuangan, risiko kredit, moneter, dan ekspektasi investor. b. Integrasi data administratif terkait dana desa dan data sekunder dari OMSPAN dan BPS (Potensi Desa, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan Survei Angkatan Kerja Nasional). c. Mendapatkan aliran data terkait <i>Logistics Costs</i> dari LNSW, DJBC, dan Eselon I terkait (2012-terkini).	a. Laporan deteksi dini sektor keuangan, dan <i>Dashboard</i> Ekonomi dan Keuangan (<i>High Frequency Information</i>). b. <i>Policy paper</i> yang berisi evaluasi peningkatan infrastruktur desa, evaluasi peningkatan kualitas SDM, simulasi perubahan kebijakan anggaran (<i>machine learning</i>), dan rekomendasi kebijakan dana desa. c. <i>Policy paper</i> yang berisi simulasi penghitungan biaya logistik, evaluasi atas ekosistem logistik di Indonesia saat ini, serta rekomendasi kebijakan terkait logistik.	a. Meningkatnya kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi perubahan yang terjadi pada indikator ekonomi dan keuangan yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan keuangan. b. Kebijakan dana desa yang lebih baik dan efektif untuk meningkatkan infrastruktur desa dan kualitas SDM. c. Meningkatnya <i>Logistics Performance Indeks</i> (LPI).
			Risiko
			a. Ketersediaan UE I untuk <i>sharing</i> data. b. Tingkat pemahaman mengenai <i>data analytics</i> yang tidak sama.
Pendukung Kesuksesan	Milestones (2021)		Unit Pengelola
a. Dukungan dan komitmen pimpinan. b. Aliran data dari berbagai pihak.	1. <i>Early Warning System – Macro Financial</i> (BKF). 2. Evaluasi Program Dana Desa dan Dana Kelurahan Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKF). 3. <i>Logistics Costs Analysis</i> (BKF).		a. <i>Initiative Champion</i> : Ka BKF b. <i>Initiative Owner</i> : Ka BKF

66



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

24. *Data Analytics* Tema Penerimaan Negara yang Optimal

Tujuan Inisiatif		Peningkatan kepatuhan wajib bayar dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dengan memanfaatkan <i>data analytics</i> .	
Latar Belakang		Terobosan	Output
a. Kebutuhan akan <i>Data Analytics Tools</i> yang dapat menguji kepatuhan WP dengan pemanfaatan data internal dan eksternal DJP. b. Pengawasan WP belum optimal dalam kaitannya dgn transaksi hubungan istimewa, hubungan antara WP Orang Pribadi Kaya (<i>High Net Worth Individual</i> / HNWI) dengan perusahaan dalam grupnya, dan transaksi lainnya. c. Indonesia terindikasi menjadi tempat transit komoditi <i>trade circumvention</i>. d. Tantangan perubahan proses bisnis perdagangan internasional yang semakin dinamis membutuhkan kebijakan yang tepat dan akurat terutama di bidang ekspor dan impor, serta ketidakstabilan perekonomian internasional berdampak dalam pengambilan kebijakan ekspor dan impor yang cepat dan akurat menjadi suatu keharusan sehingga membutuhkan pemanfaatan otomasi. e. Banyaknya jumlah jenis dan tarif PNBPN yang banyak dibutuhkan alat bantu analisis yang efektif untuk mendukung pengelolaan PNBPN dan evaluasi, penyusunan, dan / atau penetapan jenis dan tarif PNBPN f. Adanya indikasi pembayar royalti batubara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku		a. Terciptanya Peta Risiko Kepatuhan WP dan penyandingan data dalam bentuk <i>use-case</i> di <i>Data Analytics Tools</i> yang dapat digunakan dalam menguji kepatuhan WP. b. Modernisasi pemantauan hubungan pemilik, pengurus, pemegang saham perusahaan impor dan ekspor untuk analisa mengenai kemungkinan aktifitas <i>trade circumvention</i> dengan merujuk pada negara asal impor dan negara tujuan ekspor. c. Pemanfaatan data untuk kinerja ekspor impor dan dampak kebijakan melalui optimalisasi <i>data analytics</i>, statistika dan teknologi informasi d. Tersedianya alat bantu analisis untuk mendukung evaluasi, penyusunan dan / atau penetapan jenis dan tarif PNBPN. e. <i>Analytics tools</i> untuk Relasi Data dan Entitas Pelaku Usaha Komoditi Batubara.	a. Peta Risiko Kepatuhan WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa. b. Data pemicu dan data penguji pada aplikasi APPROWEB. c. Aplikasi SMARTWEB untuk pengawasan HNWI beserta grupnya. d. <i>Graph</i> keterkaitan antar perusahaan/individu yang menjadi suspek <i>trade circumvention</i> dan daftar perusahaan/entitas lain yang memiliki pola <i>trade circumvention</i> yang mirip dengan suspek. e. Terbentuknya <i>dashboard</i> pemantauan kinerja ekspor impor, serta <i>alert system</i> terkait dengan utilisasi FTA, penurunan tarif efektif, lartas, harga komoditas, pemberian insentif perpajakan pada kinerja ekspor impor dengan memanfaatkan <i>data analytics</i>. f. Terbentuknya profil jenis dan tarif PNBPN. g. Tersedianya <i>dashboard</i> Relasi Data dan Entitas Pelaku Usaha dalam rangka mendeteksi indikasi potensi penerimaan negara dari sektor Komoditi Batubara.
		Milestones	Outcomes
Pendukung Kesuksesan		2021: 1. <i>Peta Risiko Kepatuhan WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa</i> (DJP) 2. <i>Data Analytics</i> Pada Aplikasi Profile WP Berbasis Web (DJP). 3. <i>Data Analytics</i> Pengawasan WP HNWI Beserta Grup Usahanya (DJP). 4. <i>Graph Analytics</i> untuk Mendeteksi <i>Trade Circumvention</i> di Indonesia (DJBC, 2021-2023). 5. <i>Data Analytics</i> kinerja, proyeksi, dan dampak kebijakan ekspor, impor, serta penerimaan negara terkait (DJBC, 2021-2023). 6. <i>Data Analytics</i> untuk mendukung evaluasi, penyusunan dan / atau penetapan jenis dan tarif PNBPN (DJA). 7. <i>Data analytics</i> Relasi Entitas Pelaku Usaha Komoditi Batubara (LNSW).	a. Optimalisasi penerimaan negara. b. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa/wajib pajak/wajib bayar.
			Risiko
			a. Kesiapan kapasitas pengetahuan SDM dan infrastruktur TI dalam pembangunan <i>data analytics</i>. b. Ketersediaan data dari K/L atau unit terkait c. Ketersediaan anggaran dalam peralatan dan pelatihan
			Unit Pengelola
			a. <i>Initiative Champion</i>: DJP, DJBC, DJA, LNSW b. <i>Initiative Owner</i>: DJP, DJBC, DJA, LNSW

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

25. *Data Analytics* Tema Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

Tujuan Inisiatif		Pemanfaatan <i>data analytics</i> dalam pengelolaan belanja negara yang berkualitas.		
Latar belakang		Terobosan	Output	
a. Pertumbuhan aset BLU yang semakin besar, sehingga perlu peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BLU berbasis <i>big data</i>. b. Analisis pengelolaan keuangan daerah terkendala Bagan Akun Standar pada Pemda yang berbeda-beda. c. Perlu peningkatan sinkronisasi alokasi belanja K/L dengan alokasi TKDD. d. Perlu secara berkelanjutan memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pengalokasian anggaran K/L, termasuk terus memastikan proses bisnis RSPP telah mendukung efektivitas belanja K/L. e. Sesuai PMK 78/PMK.02/2020, dalam rangka menjaga ketepatan pembayaran bantuan iuran pemerintah atas tagihan bantuan iuran peserta PBPU dan BP kelas III oleh BPJS kesehatan, ITJEN melakukan revidi atas pembayaran bantuan iuran tersebut setiap tiga bulan sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan selisih lebih atau selisih kurang atas pembayaran Dana Bantuan Iuran kepada BPJS Kesehatan.		a. Memprediksi dampak belanja pemerintah terhadap layanan yang diberikan BLU kepada masyarakat. b. Mengembangkan model <i>financial advisor</i> bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. c. Membangun model analisis bersama evaluasi belanja K/L dengan DAK Fisik. d. Tersedianya analisis efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran belanja K/L. e. Penerapan <i>data analytics</i> berupa <i>continuous audit</i> untuk memperoleh anomali data yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam menghasilkan tagihan bantuan iuran kepada pemerintah.	a. Efisiensi belanja dan tarif berkualitas dalam peningkatan layanan BLU kepada masyarakat. b. <i>Dashboard</i> penyediaan <i>financial advisor</i> secara otomatis dan harian bagi pemerintah daerah. c. Model <i>data analytics</i> untuk evaluasi pendanaan terintegrasi dan tumpang tindih pendanaan antara Belanja K/L dengan DAK Fisik. d. Analisis informasi kinerja anggaran K/L dan analisis alokasi anggaran K/L terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro, dan ketepatan strategi pengalokasi anggaran di beberapa sektor pariwisata. e. Peningkatan efektivitas pengawasan (reviu) terhadap pembayaran Dana Bantuan Iuran Pemerintah kepada BPJS Kesehatan..	
		Milestones	Outcome	
		2021: 1. <i>Big Data Analytics</i> BLU (DJPB). 2. Model <i>Financial Advisor</i> Bagi pemerintah daerah Berdasarkan Data Transaksi (DJPK). 3. Model Analisis Belanja K/L dengan DAK Fisik (Sektor Pendidikan dan Jalan) (DJPK). 4. Analisis informasi kinerja anggaran K/L dan alokasi anggaran K/L yang berkualitas (tematik) (DJA). 5. <i>Continuous audit</i> ketepatan pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan oleh KPA (ITJEN).	a. Tercapainya pengelolaan belanja negara yang berkualitas. b. Meningkatnya layanan pemerintah kepada masyarakat.	
Pendukung Kesuksesan			Risiko	
a. Ketersediaan sistem informasi yang mendukung ketersediaan data b. Kualitas SDM dalam melaksanakan data analytics belanja negara			a. Terdapat isu terkait dengan regulasi (kerahasiaan data). b. Kualitas data yang tersedia.	
			Unit Pengelola	
			a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, Inspektur Jenderal b. <i>Initiative Owner</i>: Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, Inspektur Jenderal	

58



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

26. *Data Analytics* Tema Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali

Tujuan Inisiatif				Mewujudkan efisiensi penganggaran dan pembiayaan, memperkuat pengelolaan risiko, serta meningkatkan kinerja investasi pemerintah.					
Latar belakang		Terobosan		Output		Outcome			
a. Program bantuan pemerintah kepada masyarakat masih tumpang tindih antar K/L/I/D, sehingga terdapat potensi program tidak tepat sasaran atau terjadi <i>overlapping</i> program. b. <i>Integrated tools analysis</i> semakin diperlukan dalam pelaksanaan analisis biaya dan risiko portofolio utang. c. <i>Predictive tools analysis</i> semakin diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas monev dan pengelolaan risiko pinjaman pemerintah. d. <i>Management tools analysis</i> semakin diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan investasi pemerintah pemerintah dan dampaknya terhadap peningkatan/penurunan <i>risk</i> dan <i>return</i> portofolio investasi pemerintah. e. Proses audit terhadap pelaksanaan lelang harus menyesuaikan dengan platform yang digunakannya (internet).		a. Pembangunan <i>modelling</i> pengukuran ketepatan sasaran bansos, banper, dan pembiayaan pemerintah kepada UMKM. b. Tersedianya <i>database</i> yang standar dan terintegrasi dalam mendukung analisis biaya dan risiko utang. c. Tersedianya asset profiling terkait bencana gempa dan potensi kerugiannya. d. Penyempurnaan <i>tools analysis</i> Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Kegiatan. e. Pembangunan <i>modelling</i> sebagai salah satu <i>tools</i> untuk mengevaluasi kebijakan investasi pemerintah dan dampaknya terhadap peningkatan/penurunan <i>risk</i> dan <i>return</i> portofolio investasi pemerintah. f. <i>Continuous audit</i> atas pelaksanaan layanan lelang melalui internet.		a. Tersedianya <i>modelling</i> pengukuran ketepatan sasaran bansos, banper, dan pembiayaan pemerintah kepada UMKM. b. <i>Dashboard</i> yang menampilkan data dan informasi pengelolaan utang, <i>market update</i> dan <i>macro-economic conditions</i> yang standar dan terintegrasi serta sesuai dengan kebutuhan, untuk analisis biaya dan risiko yang lebih akurat. c. Asset profiling terkait risiko bencana (gempa) dan proyeksi biaya rekonstruksi akibat gempa. d. Tersedianya <i>predictive analysis tools</i> untuk penarikan pinjaman kegiatan. e. Tersedianya model pengukuran <i>risk</i> dan <i>return</i> portofolio investasi pemerintah. f. Tersedianya model CA/CM atas pelaksanaan layanan lelang melalui internet.		a. Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat penerima bansos, banper, dan pembiayaan pemerintah. b. Tersedianya hasil analisis biaya dan risiko portofolio utang yang lebih akurat dan efisien. c. Pemerintah mengetahui prioritas aset yang perlu diasuransikan. d. Kualitas perencanaan dan penganggaran pinjaman kegiatan semakin meningkat sehingga dapat meminimalisir timbulnya biaya tambahan. e. Mendorong kebijakan investasi pemerintah didasarkan pada perspektif yang terukur dan terbukti (<i>evidence based</i>) dalam mengoptimalkan alokasi investasi pemerintah.			
								Milestones	
								2021:	
Pendukung Kesuksesan		1. <i>Data Analytics</i> pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan pembiayaan pemerintah kepada UMKM. 2. <i>Data Analytics</i> modernisasi kegiatan analisis biaya dan risiko portofolio utang. 3. <i>Data Analytics</i> prediktif potensi biaya rekonstruksi gedung perkantoran yang ada di daerah rawan gempa. 4. <i>Data Analytics</i> prediktif kualitas pinjaman kegiatan. 5. <i>Data Analytics</i> government investment portfolio analysis. 6. <i>Data Analytics continuous audit</i> atas pelayanan lelang melalui internet.		Risiko					
				a. Kualitas dan keamanan data serta resistensi <i>data sharing</i>. b. Tingkat pemahaman mengenai <i>sata analytics</i> tidak sama					
				Unit Pengelola					
				a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Perbendaharaan, Dirjen KN, Dirjen PPR, Inspektur Jenderal b. <i>Initiative Owner</i>: Dirjen Perbendaharaan, Dirjen KN, Dirjen PPR, Inspektur Jenderal					

56



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

I. Penggunaan Piagam (*Charter*) IS RBTK

1. Piagam (*Charter*) dari masing-masing IS RBTK dijadikan acuan dalam implementasi IS RBTK, baik pada Tema Penerimaan, Tema Belanja, Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Pembiayaan, dan Tema Sentral.
2. Dengan diimplementasikannya 26 (dua puluh enam) IS RBTK tersebut diharapkan misi Kementerian Keuangan, yaitu:
melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:
 - a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
 - b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
 - c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
 - d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
 - e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi dapat dicapai untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik serta Indonesia yang adil dan makmur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

96
ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703-1-001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/KMK.01/2021 TENTANG IMPLEMENTASI
INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

20 (DUA PULUH) INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG MULAI DIIMPLEMENTASIKAN SEJAK TAHUN 2017

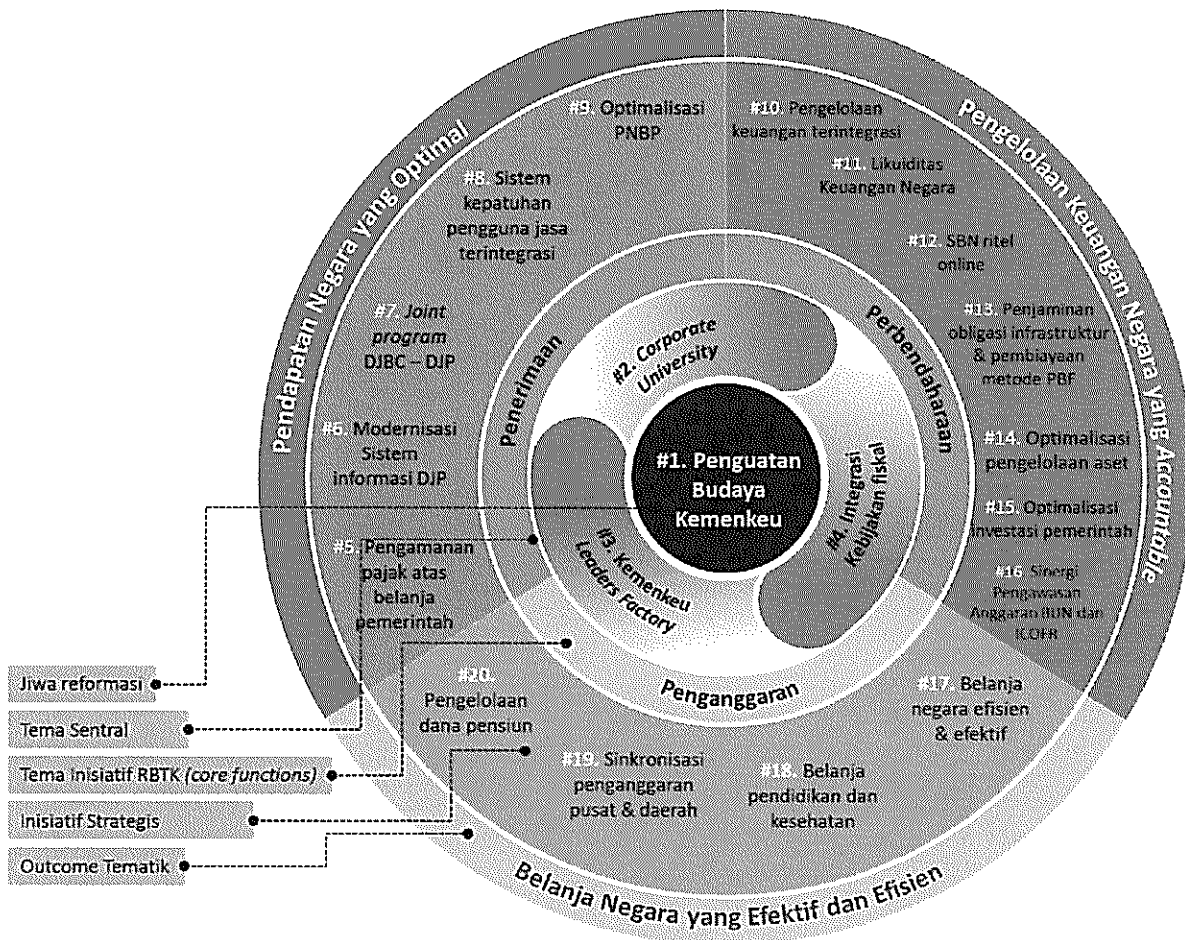
A. Penjelasan Umum

1. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Keuangan dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, untuk itu Kementerian Keuangan telah menetapkan *strategic outcome* Kementerian Keuangan yaitu “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan *sustainable*”.
2. Dalam upaya mencapai *strategic outcomes* tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam beberapa Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.
3. Perumusan IS RBTK tersebut didasarkan pada analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, and threats*) untuk melihat dan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
4. Kriteria yang digunakan untuk merumuskan IS RBTK meliputi:
 - a. berdampak langsung pada pencapaian *strategic outcomes* melalui optimalisasi peran Kementerian Keuangan;
 - b. merupakan terobosan nasional dan memerlukan perhatian khusus Menteri Keuangan; dan
 - c. memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L (*Connecting the dots*).
5. *Strategic Outcomes* Kemenkeu pada prinsipnya terbagi dalam 3 (tiga) *outcomes* tematik yaitu tema penerimaan “Pendapatan negara yang optimal”, tema perbendaharaan “Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel”, dan tema penganggaran “Belanja Negara yang Efektif dan Efisien”.
6. Untuk mewujudkan 3 (tiga) *outcomes* tematik tersebut, selain dilakukan melalui IS RBTK yang bersifat substantif juga didukung oleh IS RBTK tema sentral yang menjiwai, mensupport, dan menggerakkan pencapaian IS RBTK tema penerimaan, tema perbendaharaan, dan tema penganggaran dalam rangka pencapaian *Strategic Outcomes* Kementerian Keuangan.
7. Gambaran ringkas mengenai Peta Inisiatif-Inisiatif pada keempat tema tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



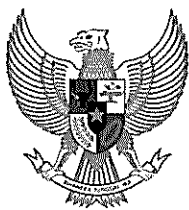
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -



B. Tema Sentral

1. IS RBTK Tema Sentral ditujukan untuk mendukung pencapaian *outcome-outcome* pada tema penerimaan, tema penganggaran, dan tema perpajakan.
2. Tema Sentral akan menjiwai dan menjadi penggerak ketiga tema lainnya.
3. Adapun IS RBTK Tema Sentral terdiri atas 4 (empat) Inisiatif, sebagai berikut:
 - a. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan;
 - b. Penyelarasan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Strategi Kemenkeu melalui *Corporate University*;
 - c. Optimalisasi Kemenkeu *Leaders Factory* untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel; dan
 - d. Integrasi Perumusan Kebijakan Fiskal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

C. Tema Penerimaan

1. IS RBTK Tema Penerimaan ditujukan untuk mencapai *outcome* “Pendapatan Negara yang Optimal” baik dari bidang Pajak, Kepabeanan, Cukai, maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak.
2. Adapun IS RBTK Tema Penerimaan terdiri atas 5 (lima) Inisiatif, sebagai berikut:
 - a. Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah;
 - b. Modernisasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak;
 - c. *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan;
 - d. Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk Optimalisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai; dan
 - e. Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

D. Tema Perbendaharaan

1. IS RBTK Tema Perbendaharaan ditujukan untuk mencapai *outcome* “Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel” baik di bidang pengelolaan kas negara, pembiayaan, dan kekayaan negara.
2. Adapun IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 7 (tujuh) Inisiatif, sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi;
 - b. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara dengan Instrumen Keuangan Modern;
 - c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur Distribusi Surat Berharga Negara Ritel secara *Online*;
 - d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Penjaminan Obligasi;
 - e. Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional;
 - f. Optimalisasi Investasi Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan; dan
 - g. Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara dan Implementasi Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara) (*Internal Control Over Financial Reporting* – ICOFR).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

E. Tema Penganggaran

1. IS RBTK Tema Penganggaran ditujukan untuk mencapai *outcome* “Belanja Negara yang efektif dan efisien” baik pada belanja pemerintah pusat maupun pada belanja transfer ke daerah.
2. Adapun IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 4 (empat) Inisiatif, sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektifitas Belanja Negara;
 - b. Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Standar Kesehatan Masyarakat;
 - c. Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah; dan
 - d. Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun.

F. Piagam (*Charter*) IS RBTK

Gambaran detil 20 (dua puluh) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf B sampai dengan huruf E tercantum pada masing-masing piagam (*charter*) IS RBTK sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan perbaikan budaya organisasi Kementerian Keuangan guna mendorong reformasi birokrasi dan menjadi <i>branding</i> Kemenkeu secara nasional melalui pengelolaan APBN yang kredibel, berkeadilan, dan berkelanjutan.		
Latar belakang	Terobosan		Outcomes
	a. Menetapkan kebijakan efisiensi birokrasi sebagai trigger perubahan budaya. b. Menetapkan budaya Kemenkeu serta menjadikan budaya Kemenkeu sebagai <i>branding</i> perubahan budaya di lingkungan Pemerintahan. c. Budaya Kemenkeu mendorong kebijakan efisiensi belanja Negara dan sinergi nasional antar instansi pemerintah.		a. Meningkatnya Indeks Efisiensi Birokrasi b. Meningkatnya Nilai Pembangunan Integritas (Indeks Persepsi Korupsi) c. Terwujudnya inspirasi program budaya Kemenkeu untuk instansi pemerintah lainnya d. Meningkatnya Indeks Persepsi Kesehatan Organisasi (MOFIN/ SFO) e. Meningkatnya Indeks Persepsi Publik
	Milestones		Risiko
	a. 2017-2018: Revitalisasi Program Budaya Kemenkeu 1. Penetapan kebijakan efisiensi birokrasi Kemenkeu. 2. Diagnostik Budaya: <i>Assessment current culture</i> 3. Penetapan program budaya baru Kemenkeu: a) <i>Leadership role model</i> b) <i>Rebranding values</i> Kementerian Keuangan c) Penguatan implementasi kode etik pegawai d) Internalisasi budaya dalam perilaku (stakeholder internal dan eksternal) 4. Review oleh UKI atas pelaksanaan efisiensi birokrasi 5. Integrity Framework b. 2018: Living the values melalui: 1. Implementasi <i>culture quality management</i> 2. Implementasi kebijakan efisiensi belanja 3. Sinergi dengan program reformasi birokrasi nasional		a. Potensi resistensi dari Pegawai b. Tidak terjaganya kesinambungan program budaya
Pendukung Kesuksesan			Unit Pengelola
a. Dukungan pimpinan untuk: 1) Memberikan contoh dan dorongan perbaikan budaya kepada pegawai 2) Persetujuan penguatan UKI b. Change Agent Kemenkeu c. Program engagement untuk pegawai baru			a. <i>Initiative Champion</i>: Menkeu & Wamenkeu b. <i>Initiative Owner</i>: Seluruh Pejabat Eselon I c. Anggota Tim: 1) Anggota Tim Pengelola CTO 2) Biro Organta, Biro Hukum, Biro Cankeu, Biro SDM (Setjen) 3) DJA 4) Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan Unit Eselon I cq UKI UE I



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Penguatan SDM melalui Kementerian Keuangan *Corporate University* – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang mampu mencapai target kinerja organisasi melalui proses pembelajaran yang relevan, aplikatif, mudah diakses, dan berdampak nyata (<i>impactful</i>)				
Latar belakang	Terobosan		Outcomes		
a. Dalam rangka mendorong perubahan organisasi, diperlukan program pengembangan SDM yang mampu mentransformasikan SDM sebagai agen perubahan. b. Pengembangan SDM belum fokus terhadap pencapaian target kinerja organisasi sehingga diperlukan strategi pengembangan SDM berbasis perencanaan strategis organisasi. c. Dalam rangka menyelaraskan pengembangan SDM dengan perencanaan strategis organisasi, diperlukan proses bisnis pengembangan SDM yang lebih aplikatif, relevan/adaptif, mudah diakses, dan berdampak tinggi melalui penerapan <i>CorpU</i> .	a. <i>Knowledge Management</i> (KM) untuk mengoptimalkan proses pembelajaran menggantikan metode pembelajaran klasikal. b. Implementasi <i>Corporate University</i> sebagai model <i>high impact learning</i> sebagai dukungan strategi pencapaian kinerja Kemenkeu. c. <i>Corporate University</i> merupakan <i>upgrading learning process</i> yang bertitik tolak pada peningkatan kompetensi SDM sebagai <i>enabler</i> pencapaian sasaran strategis Kemenkeu. d. Kemenkeu <i>CorpU</i> merupakan bentuk <i>CorpU</i> yang pertama di sektor publik di Indonesia.		a. <i>Competency Gap Index</i> Pegawai Kementerian Keuangan	2017 -	2018 3 (skala 4)
			b. Ketercapaian <i>target</i> Inisiatif Strategis seluruh tema.	100%	100%
			c. Ketercapaian target kinerja seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu	100%	100%
Pendukung Kesuksesan	Milestones		Risiko		
	a. Tahun 2017: 1) Melakukan perbaikan mekanisme Identifikasi Kebutuhan Diklat. 2) Menyusun <i>Instructional System Design</i> (ISD). 3) Menyempurnakan evaluasi pembelajaran. 4) Menyusun pola pembelajaran untuk <i>critical job</i> . 5) Membangun KMS dan infrastruktur lainnya. 6) Membentuk <i>Communities of Practice</i> (CoP). 7) Membangun <i>smart classroom</i> .		b. Tahun 2018: 1) Menerapkan struktur <i>governance</i> Kemenkeu <i>CorpU</i> sebagai <i>learning organization</i> 2) Menyelaraskan (terkait regulasi) peraturan SDM yang lain guna mendukung implementasi HCM melalui <i>CorpU</i> . 3) Menetapkan <i>Learning Quality System</i> . 4) Melakukan perbaikan dalam metode penyelenggaraan pembelajaran. 5) Menginisiasi <i>retire faculty program</i> dan <i>leader as teacher</i> . 6) Membangun <i>Learning Organization</i> .		a. Resistensi perubahan kultur dalam proses pembelajaran. b. Ketidakselarasan antara strategi pengembangan SDM dengan strategi pembelajaran. c. Belum semua daerah memiliki infrastruktur penunjang KM yang memadai. d. Mitigasi : 1) <i>Change management program</i> ; 2) Mewujudkan <i>learning organization</i> ; 3) Menyusun mekanisme dan strategi komunikasi antar unit terkait; 4) Pengadaan infrastruktur penunjang KM.
				Unit Pengelola	
				a. Initiative Champion: BPPK b. Initiative Owner : BPPK c. Tim: Biro SDM, Unit Eselon I Kemenkeu	

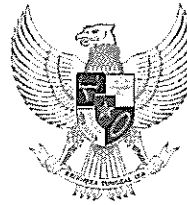


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. Optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif		Mengoptimalkan peran SDM Kementerian Keuangan sebagai <i>Talent / Leaders</i> dalam bidang keuangan negara			
Latar belakang		Terobosan		Outcomes	
a. Komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan kompetitif sebagai pilar ke-2 Reformasi Birokrasi b. Kementerian Keuangan perlu lebih proaktif dalam mendukung pengelolaan keuangan Negara yang kredibel di K/L/D/I dengan mengoptimalkan peran SDM Kemenkeu yang kompeten dan berintegritas tinggi.		a. Mempersiapkan grand design dan infrastruktur <i>leaders factory</i> dan mengembangkan jabatan fungsional, program <i>tour of duty</i> lintas unit b. Menempatkan <i>Leader</i> Kementerian Keuangan yang kompeten dan kompetitif untuk mengisi jabatan di Kementerian Keuangan maupun di K/L/D/I lain		a. Distribusi <i>Leaders</i> lingkup internal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Kemenkeu yang akuntabel b. Tingkat kepuasan <i>user</i> unit internal Kemenkeu c. Distribusi <i>Leaders</i> lingkup eksternal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang akuntabel d. Tingkat kepuasan <i>user</i> unit eksternal Kemenkeu	
				2017 2018 2019 100% 3 3,5 (skala 5) (skala 5) 100% 3 (skala 5)	
Pendukung Kesuksesan		Milestones		Risiko	
a. Dukungan Regulator Nasional (KASN, MenPAN, BKN, LAN) b. Perbaikan kebijakan remunerasi untuk pegawai yang ditugaskan ke K/L/D/I lain. c. Ketersediaan jumlah <i>kader</i> yang berkualitas untuk memenuhi peluang dalam mengikuti seleksi terbuka jabatan strategis di K/L/D/I Lainnya d. Peningkatan teknologi Informasi HR yang terintegrasi (HRIS)		a. 2017: 1. Penyusunan <i>Grand Design Leaders Factory</i> . 2. Penyiapan Infrastruktur <i>Leaders Factory: Talent Management, Reward Management, Leadership Framework</i> . 3. Pelaksanaan Program mutasi <i>leaders</i> lintas unit Eselon I Kemenkeu. 4. Implementasi jabatan fungsional. b. 2018: 1. <i>Piloting Leaders Factory</i> Kemenkeu (eksternal) 2. Penetapan aturan <i>Leaders Factory</i> 3. Penyiapan Infrastruktur <i>Leadership and Culture Academy</i> 4. Pelaksanaan Program mutasi <i>leaders</i> lintas unit Eselon I Kemenkeu		a. Berkurangnya minat <i>Leader</i> apabila ditugaskan ke K/L/D/I lainnya karena perbedaan penghasilan b. Ketidaktersediaan formasi jabatan pada saat kader kembali ke Kemenkeu. c. Tidak tersedianya jabatan kosong pada K/L/D/I lainnya	
				Unit Pengelola	
				a. <i>Initiative Champion</i> : Sekretariat Jenderal b. <i>Initiative Owner</i> : Biro SDM c. Tim: 1) Biro SDM 3) Biro Cankeu 3) DJA 2) Biro Organta 4) BPPK 4) Bagian SDM dan Ortala Eselon I Kemenkeu	

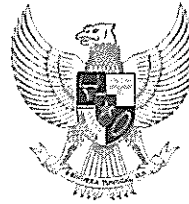


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif		Menghasilkan rumusan kebijakan fiskal dan penganggaran yang optimal sebagai dasar penyusunan APBN yang berkelanjutan dan berdampak nyata dengan tetap menjaga iklim perekonomian yang kondusif	
Latar belakang	Milestones	Outcomes	
a. Perumusan kebijakan fiskal tersebar di beberapa unit eselon I dan belum mempertimbangkan sinergi antar kebijakan b. Protokol koordinasi penyusunan kebijakan fiskal antar unit eselon I belum konsisten c. Kebutuhan peningkatan kualitas analisis dan evaluasi atas suatu kebijakan berdasarkan <i>knowledge</i> d. Perumusan kebijakan fiskal dan penganggaran membutuhkan pemahaman yang terintegrasi. e. Adanya keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya di dalam postur APBN (misal: besaran penerimaan negara dengan <i>mandatory spending</i>) f. Peningkatan pendapatan negara tidak selalu dapat digunakan untuk menambah kapasitas fiskal g. Adanya belanja wajib amanat konstitusi (20% untuk pendidikan, DAU, DBH, Dana Otsus; dana desa; 5% untuk dana kesehatan) h. Kebutuhan penguatan Kementerian Keuangan sebagai <i>interface</i> dengan K/L dan DPR dalam rangka penyusunan kebijakan fiskal	a. 2017 1) Sinergi penyusunan kebijakan fiskal dan penganggaran a) <i>Refinement</i> protokol mengenai tata kelola perumusan kebijakan (penyusunan SOP Link, KMK sinergi penyusunan APBN) : (1) Penataan mandat perumusan kebijakan (kejelasan mandat setiap UE.1); (2) Akses data (permintaan data reguler dan spesifik); (3) Perancangan <i>knowledge management system</i> b) Penyusunan KEM-PPKF yang kredibel menjadi acuan penyusunan APBN Penetapan kebijakan dan standar dokumen KEM-PPKF (Keputusan bersama antara BKF, DJA, dan Bappenas) c) Penyusunan <i>roadmap</i> kebijakan optimalisasi penerimaan negara (termasuk <i>tax expenditure analysis</i>) d) Sinergi Penyempurnaan kebijakan APBN: (1) Memperkuat <i>Medium Term Fiscal Framework</i> (MTFF) sebagai instrumen <i>aggregate control</i> untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah; (2) Penambahan sumber pendapatan atau pembiayaan yang baru; (3) Strategi peningkatan ruang fiskal pemerintah yang memadai untuk membiayai program prioritas di bidang infrastruktur; dan (4) Optimalisasi Peran Indonesia pada Kerja Sama Internasional melalui peningkatan strategi pembiayaan infrastruktur, pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,	investasi di forum kerja sama internasional, dan pemanfaatan peluang.pendanaan 2) Implementasi National Integrated <i>Spending Review</i> a) Penetapan pedoman & metodologi <i>spending review</i>, b) <i>Piloting</i> pelaksanaan <i>Spending review</i> pemerintah yang terintegrasi atas pelaksanaan APBN di Kemenkeu: (1) Kajian terkait penggunaan dana pendidikan dan dana kesehatan (2) Kajian terkait subsidi c) Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian dari <i>national integrated spending review</i> 3) Peningkatan kapasitas SDM melalui : a) mutasi pegawai antar UE.1, b) <i>Secondment program</i> BKF dengan UE1 lain c) <i>technical assistance</i>	a. Kebijakan fiskal yang optimal 1) Menjaga <i>sustainability</i> pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kriteria pada tahun 2018, sbb: a) Pertumbuhan ekonomi 6,1% b) <i>Tax ratio</i> arti sempit 11,5% c) Anggaran infrastruktur Rp440 T d) <i>Primary balance</i> positif -Rp100 T e) Defisit APBN terhadap PDB 2,2% f) <i>Debt to GDP ratio</i> 28,4% 2) Meningkatnya ruang fiskal pemerintah dengan indikator: a) <i>Growth</i> belanja investasi lebih besar dari belanja konsumsi b) Turunnya defisit anggaran pemerintah c) Efisiensi belanja melalui pengurangan belanja birokrasi (honor tim, peradilan, dll) d) Peningkatan anggaran pendapatan negara dan hibah yang tidak terikat dengan <i>mandatory spending</i>. b. Target penerimaan negara yang kredibel: minimalisasi deviasi antara realisasi dengan potensi penerimaan
Pendukung Kesuksesan	Risiko		
a. Akses data dan informasi pada sumber-sumber tertentu di UE.1 lain b. <i>Knowledge management system</i> yang andal c. Kolaborasi dengan UE.1 lain d. kewenangan menyelenggarakan penelitian dengan melibatkan UE.1 terkait e. Pengalaman <i>spending review</i> yang telah dilaksanakan DJA dan DJPB f. Mekanisme <i>reward and punishment</i> bagi K/L/Pemda g. Dukungan kelembagaan: organisasi, anggaran, SDM, dan infrastruktur	a. Kemungkinan adanya proses birokrasi yang lebih kompleks b. Kemungkinan adanya <i>competency gap</i> terkait perumusan kebijakan pada fase awal implementasi c. Rekomendasi Kajian sangat terkait dengan unit kementerian/ lembaga lainnya (potensi resistensi dari K/L). d. Memuat unsur-unsur politis dalam kebijakan fiskal pemerintah.		
Terobosan	Unit Pengelola		
a. Sinergi penyusunan kebijakan fiskal dan penganggaran 1) protokol yang kuat dalam penyusunan kebijakan fiskal 2) dokumen KEM-PPKF menjadi acuan penyusunan pagu indikatif 3) strategi peningkatan ruang fiskal pemerintah yang memadai untuk membiayai program prioritas di bidang infrastruktur b. Sinergi pelaksanaan <i>spending review</i> (termasuk efektivitas program <i>mandatory spending</i>) serta evaluasi besaran proporsi <i>mandatory spending</i> c. Peningkatan kapasitas SDM melalui mutasi antar UE1 dan <i>secondment program</i>	a. <i>Initiative Champion</i>: Kepala Badan Kebijakan Fiskal b. <i>Initiative Owner</i> : Sekretariat BKF c. Tim: 1) BKF (PKAPBN, PKEM, PKPN, PKRB,PKPPIM); 2) DJP (Dit PP I, Dit PP II) 3) DJBC (Dit PPS, Dit Fasilitas Kepabeanaan, Dit Teknis Kepabeanaan, Dit Cukai) 4) DJA (Dit. PNBPI) 5) DJPB (Dit PA) 6) DJPK (Dit DAPER) 7) Setjen (Biro SDM)		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. Pengamanan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara		
Latar belakang	Terobosan		Outcomes
a. Kepatuhan perpajakan Bendahara belum optimal; b. <i>Management</i> data keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah belum terintegrasi; c. Redundansi penyampaian laporan dari Pemda ke Kemenkeu. d. Pemahaman atas perilaku kepatuhan Bendahara belum optimal. e. Pengawasan Kepatuhan Bendahara belum efektif.	a. Penyempurnaan peraturan mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak Bendahara; b. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Data Keuangan (SIMDK) Pemerintah Pusat dan Daerah yang terintegrasi, komprehensif, dan end-to-end; dan c. Sinergi pengawasan internal antara Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L) dan Pemerintah Daerah untuk pengawasan penerimaan pajak atas belanja pemerintah.		a. Menurunnya <i>tax gap</i> atas belanja APBN; dan b. Menurunnya <i>tax gap</i> atas belanja APBD
	Milestones		Risiko
	a. 2017 1. Penyempurnaan peraturan terkait Bendahara dan dasar hukum baru yang diperlukan; 2. Pembangunan SIMDK Pusat dan Daerah yang terintegrasi; dan 3. Pembentukan forum asistensi dan konsultasi pengawasan penerimaan negara. b. 2018 1. Pembentukan basis data Bendahara dan Belanja yang terpusat; 2. Penetapan Instruksi Presiden terkait pengawasan penerimaan oleh APIP K/L dan Pemerintah Daerah (termasuk pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Bendahara Umum Negara); 3. Koordinasi pelaksanaan Inpres terkait pengawasan oleh APIP K/L; dan 4. Implementasi forum asistensi dan konsultasi pengawasan penerimaan negara. c. 2019 Penyusunan modul <i>dashboard</i> penganggaran, realisasi, pelaporan dan penerimaan pajak terpadu. d. 2020 1. Penyusunan mekanisme pemotongan pajak di depan atas belanja tertentu; 2. SIMDK Pusat dan Daerah terintegrasi; dan 3. <i>Prepopulated</i> SPT Bendahara via SIMDK.		a. Keterbatasan sumber daya; dan b. Resistensi dari <i>stakeholders</i>
Pendukung Kesuksesan			Unit Pengelola
a. Pembenahan basis data bendahara. b. Komitmen dan kerja sama intra-Kemenkeu, Kementerian /lembaga lain, dan Pemerintah Daerah terkait.			a. <i>Initiative Champion</i> : Direktur Jenderal Pajak b. <i>Initiative Owner</i> : Direktorat PKP, DJP; Pengkaji Bidang EIP, DJP c. Tim: 1) Pusintek, Setjen 2) Dit. TIP dan Dit TTKI, DJP 3) Dit A1, A2, A3 dan Dit. SP, DJA 4) Dit. SP dan Dit. APK DJPB 5) Dit. EPIKD dan Dit. Daper, DJPK 6) Inspektorat I-VII, Itjen 7) PK-APBN dan PKEM, BKF d. K/L terkait: 1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2) Kementerian Dalam Negeri

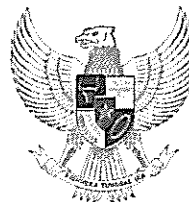


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

6. Modernisasi Sistem Informasi DJP Untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif		a. Tersedianya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (<i>core tax system</i>) yang terintegrasi b. Peningkatan jumlah layanan, keamanan, kehandalan, stabilitas dan kemudahan akses layanan elektronik DJP																										
Latar belakang		Terobosan		Outcomes																								
a. Telah tersedia berbagai layanan berbasis elektronik untuk memudahkan WP memenuhi kewajiban perpajakan b. Pengguna <i>e-service</i> meningkat sehingga tuntutan kenyamanan, keamanan, stabilitas, dan kapasitas semakin tinggi c. Perkembangan TIK menciptakan kesempatan baru dalam pemberian pelayanan kepada WP d. Pola hubungan layanan DJP kepada WP bergeser dari interaksi <i>face to face</i> dan <i>paperbased</i> menjadi melalui <i>channel services</i> (online & mobile) e. Kondisi Sistem Informasi DJP saat ini: Performa basis data belum optimal, sinkronisasi data yang rumit, penggunaan teknologi out of date ,belum mencakup keseluruhan <i>core business</i> , <i>decision support system</i> belum memadai untuk pelayanan dan pengawasan WP, dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem yang ada. f. Inisiatif pengembangan TIK di DJP belum fokus kepada pengembangan <i>core tax system</i> g. Pentingnya perbaikan <i>core tax system</i> terhadap upaya peningkatan kinerja penerimaan pajak		a. Penambahan infrastruktur dan pembangunan <i>core tax system</i> secara selektif b. Pengembangan multichannel <i>e-services</i> melalui Penggunaan Smartcard untuk kemudahan dan keamanan akses layanan DJP dan integrasi ke layanan publik lainnya, Layanan mandiri di tempat-tempat umum bagi WP melalui Kiosk Pajak, Layanan <i>e-service</i> versi mobile dengan M-Pajak, Offline electronic form untuk <i>e-filing</i> dalam mengantisipasi permasalahan koneksi internet, TPT online (pelayanan dan pelaporan), <i>Taxpayer account</i> , Single Portal Internal (SSO Platform) c. Kerjasama dengan perbankan melalui pembayaran pajak melalui kartu kredit		<table><tr><th></th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr><tr><td>a. Kepuasan WP terhadap layanan (skala 5)</td><td>3</td><td>3,5</td><td>4</td></tr><tr><td>b. Peningkatan jumlah WP pengguna layanan</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td></tr><tr><td>c. Peningkatan kepatuhan formal WP pengguna layanan</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td></tr><tr><td>d. Penurunan <i>unplanned downtime</i></td><td colspan="3">sesuai standar Pusintek</td></tr><tr><td>e. Kepuasan pengguna sistem <i>core tax</i> (skala 5)</td><td>3</td><td>3,5</td><td>4</td></tr></table>		2017	2018	2019	a. Kepuasan WP terhadap layanan (skala 5)	3	3,5	4	b. Peningkatan jumlah WP pengguna layanan	10%	10%	10%	c. Peningkatan kepatuhan formal WP pengguna layanan	10%	10%	10%	d. Penurunan <i>unplanned downtime</i>	sesuai standar Pusintek			e. Kepuasan pengguna sistem <i>core tax</i> (skala 5)	3	3,5	4
	2017	2018	2019																									
a. Kepuasan WP terhadap layanan (skala 5)	3	3,5	4																									
b. Peningkatan jumlah WP pengguna layanan	10%	10%	10%																									
c. Peningkatan kepatuhan formal WP pengguna layanan	10%	10%	10%																									
d. Penurunan <i>unplanned downtime</i>	sesuai standar Pusintek																											
e. Kepuasan pengguna sistem <i>core tax</i> (skala 5)	3	3,5	4																									
Pendukung Kesuksesan		Milestones		Risiko																								
a. Kemampuan adaptasi sistem terhadap kebijakan DJP secara cepat dan akurat b. Ketersediaan anggaran c. Penambahan kapasitas/kemampuan SDM d. Ketersediaan perangkat yang sesuai, termasuk jaringan dan koneksi antar perangkat e. Perubahan RUU KUP selesai di tahun 2017 f. Tersedianya aturan yang memayungi fleksibilitas pengadaan g. Ketersediaan data pihak ketiga (eg. ILAP) yang berkualitas		2017 1. Pengembangan <i>multichannel e-services</i>; 2. Penyusunan AD <i>core business</i> process; 3. Pengembangan enabler <i>integrated system</i>; 4. Capacity building (SDM) terkait persiapan enable <i>integrated system</i>; 5. Pembayaran pajak dan penerimaan negara lainnya dengan kartu kredit ke rekening bendahara penerimaan; dan 6. Kajian pembayaran pajak dengan kartu kredit ke rekening kas negara pada bank persepsi 2018 1. Tersedianya <i>multichannel e-services</i>; dan 2. Kontrak pengadaan <i>integrated core tax system</i> (I). 2019 1. Kontrak pengadaan <i>integrated core tax system</i> (II). 2020 1. <i>Hardware Bidding</i>; 2. <i>Business Process Development</i> ; dan 3. <i>Information & Technology Development</i>. 2021 1. <i>User Acceptance Testing</i>. 2022 1. <i>Integrated Core Tax System Deployment</i>.	a. Kesulitan dalam prosedur pengadaan, waktu, dan biaya serta kegagalan proses lelang b. Hasil audit terhadap investasi sistem yang sudah ada atau pengembangan sementara tidak mendukung c. Perubahan peraturan yang menyebabkan perlunya perubahan sistem baik yang sudah terbangun maupun sedang dalam tahap pengembangan yang akan berdampak pada <i>milestone</i> dan biaya investasi																									
				Unit Pengelola																								
				a. <i>Initiative Champion</i> : Direktur Jenderal Pajak b. <i>Initiative Owner</i> : Direktorat TTKI, DJP c. Tim: (1) Dit.TIP dan Dit. TPB, DJP; (2) Pusintek, Setjen (3) Dit. PKN, DJPB																								



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

7. Joint Program Optimalisasi Penerimaan – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif			Mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan dan/atau cukai		
Latar belakang		Terobosan		Outcomes	
a. Optimalisasi penerimaan menjadi kunci utama pemenuhan sumber anggaran dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. b. Terdapat irisan pekerjaan/proses bisnis antara DJP dengan DJBC dalam optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penerimaan yang terkait kegiatan impor/ekspor/cukai c. Masih banyak potensi penerimaan yang hanya dapat digali secara optimal dengan sinergi antara DJP dengan DJBC (hasil joint audit DJP-DJBC tahun 2014 sebesar Rp 234 M dan Tahun 2015 sebesar Rp 576 M *, dan Tahun 2016 sebesar Rp 204 M **, dengan program ini kerja sama akan diperluas tidak sekedar joint audit menjadi joint operation. d. Inisiasi kebijakan maupun penguatan implementasi program-program bersama (joint program) antara DJBC dan DJP diperlukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Negara *) Tahun 2014 tiga Laporan Joint Audit (LJA), dan tahun 2015 sebanyak 15 LJA **) s.d. bulan September tahun 2016 (sebelum implementasi Tax Amnesty), 8 LJA		<i>Joint Program Optimalisasi Penerimaan meliputi program:</i> a. Sinkronisasi regulasi terhadap irisan proses bisnis terkait kegiatan impor/ekspor/cukai (joint proses bisnis) b. <i>Joint Data -Joint Analysis, dan Joint Operation</i> (DJBC dan DJP memiliki data yang lebih komprehensif dari hulu-hilir atas bisnis proses kepabeanan dan cukai maupun perpajakan) c. <i>Integrated Analysis System</i> DJBC dan DJP		a. Tambahan penerimaan negara dari joint operation DJP dan DJBC: 1) Tahun 2017: Rp 750 M 2) Tahun 2018: Rp 1 T 3) Tahun 2019: Rp 1,5 T b. Menurunnya persentase piutang macet	
		Milestones		Risiko	
		a. 2017: Penerapan program audit tematik b. 2018 1) <i>Fully Dedicated</i> tim Joint Analysis 2) Pembuatan dan Implementasi Joint analysis tools 3) Kebijakan Penagihan Bersama: Sistem control (regulasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain. 4) Penyusunan Konsep Awal Sistem control (aplikasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain. c. 2019 1) Konsep Paper sinkronisasi regulasi irisan proses bisnis terkait kegiatan di Tempat Penimbunan Berikat 2) Sinkronisasi regulasi tindak lanjut konsep paper irisan proses bisnis terkait kegiatan di Tempat Penimbunan Berikat 3) Pelaksanaan Penagihan Bersama (menyatukan pelaksanaan penyitaan bersama dan pelaksanaan <i>gijzeling</i>) 4) Penyusunan Aplikasi Sistem control (aplikasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain. d. 2020 : Implementasi Aplikasi Sistem control (aplikasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain.		a. ketentuan perpajakan terkait kerahasiaan data WP / auditee mitigasi b. Dukungan Menteri Keuangan dan kesepakatan bersama DJBC - DJP	
Pendukung Kesuksesan				Unit Pengelola	
a. Komitmen pimpinan DJBC dan DJP dalam mplementasi Joint Program b. Penyelerasan peraturan terkait Joint Program c. Alokasi Anggaran d. SDM dedicated unit e. Dukungan IT DJBC-DJP f. Perkiraan Kebutuhan Anggaran: Rp 1,15 M				a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Bea dan Cukai b. <i>Initiative Owner</i> : Dit. Audit Kepabeanan dan Cukai DJBC c. Tim 1) Dit. Pemeriksaan dan Penagihan DJP 2) Dit. IKC DJBC 3) Dit. Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP 4) Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC 5) Pusintek, Setjen 6) PKPN, BKF	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

8. Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan yang handal di bidang kepabeanaan dan cukai untuk percepatan pelayanan, dan perluasan fasilitasi serta optimalisasi penerimaan					
Latar belakang	Terobosan		Outcomes			
a. DJBC belum memiliki basis data profil pengguna jasa yang merepresentasikan seluruh kegiatan pelayanan kepabeanaan dan cukai b. Dari tahun 2003 tidak ada penambahan pengguna jasa prioritas secara signifikan c. Pelayanan dan pengawasan dikembangkan secara parsial dalam platform yang tidak selaras dalam manajemen risiko yang terintegrasi d. Hit rate impor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan negara masih lebih rendah dibanding benchmark e. Belum terdapat mekanisme monitoring yang berkelanjutan pengguna jasa prioritas di bidang kepabeanaan dan cukai f. Setiap unit manajemen risiko membutuhkan data yang tersebar di unit lain dan belum terintegrasi satu sama lain,	a. Membangun sistem manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan handal untuk menyeimbangkan pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai dalam mendukung perluasan fasilitasi dan optimalisasi penerimaan Negara, antara lain mencakup: 1) Single identity DJP dan DJBC (integrasi identitas kepabeanaan dan cukai dengan NPWP) 2) Single profile pengguna jasa untuk pengembangan Indonesia Single Risk Management (ISRM) b. Membangun sistem database yang terintegrasi sehingga dapat menjadi enabler seluruh proses bisnis kepabeanaan dan cukai		2017	2018	2019	
			a. Meningkatnya jumlah pengguna jalur Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dan Authorized Economic Operator(AEO)	300 MITA 75 AEO	500 MITA 150 AEO	n/a
			b. Menurunnya temuan audit (berdasarkan rata-rata data audit tahun 2014 dan 2015 ≈ Rp 7,49 M per perusahaan) c. Peningkatan hit-rate (tahun 2015 <25,21%)	n/a	n/a	Kurang dari Rp. 1 M per perusahaan ≥25%
Pendukung Kesuksesan	Milestones		Risiko			
a. Komitmen Pimpinan Unit b. Sistem IT yang handal c. Alokasi anggaran yang cukup untuk membangun sistem d. SDM untuk mengoperasikan sistem dengan kemampuan analisis, teknis, dan administrasi e. Peraturan baru untuk memformal-kan risk engine dan desain database f. Kebutuhan Anggaran: Rp 2,2 M	a. 2016: 1) Framework/Desain Sistem Kepatuhan 2) Penyelesaian regulasi tentang Pengguna Jasa Prioritas (MITA dan AEO) 3) Integrasi NIK dengan NPWP b. 2017: 1) Finalisasi Ketentuan tentang Sistem Kepatuhan 2) Pembuatan Risk Engine Pengguna Jasa Prioritas 3) Piloting Risk Engine Pengguna Jasa Prioritas 4) Desain sistem database yang terintegrasi 5) Integrasi NPPBKC dengan NPWP		a. Reaksi negatif pengguna jasa yang tidak memahami perubahan sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai b. Sistem IT yang tidak stabil Mitigasi a. Membangun <i>engagement</i> Pengguna Jasa terhadap sistem yang dibangun. b. Sosialisasi kepada pengguna jasa tentang sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang baru c. Perencanaan sistem IT yang komprehensif			
	c. 2018: 1) Finalisasi ketentuan tentang Sistem Kepatuhan 2) Single Profile Pengguna Jasa 3) Pembuatan Risk Engine Pengguna Jasa Reguler 4) Piloting Risk Engine Pengguna Jasa Reguler 5) Database yang terintegrasi 6) Integrasi NPPBKC dengan NPWP		Unit Pengelola			
	d. 2019 1) Implementasi Sistem Manajemen Risiko Baru 2) Pemanfaatan single profile untuk stakeholder eksternal DJBC		a. <i>Initiative Champion</i> : Direktur Jenderal Kepabeanaan dan Cukai b. <i>Initiative Owner</i> : Dit. PPS, DJBC c. Tim 1)Dit. PPS, DJPC 2)Dit. Penindakan dan Penyidikan, DJBC 3)Dit. Teknis Kepabeanaan dan Cukai 4)Dit. Informasi Kepabeanaan dan Cukai			5)TP Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi 6)Pusintek 7)Dit. PKP, DJP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

9. Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan PNBPN melalui Penyederhanaan Penetapan Jenis dan Tarif, Pemberian Insentif Pengelola PNBPN dan Pemetaan Potensi PNBPN, Monev Minerba dan peningkatan efisiensi dan kualitas biaya operasi KKKS migas		
Latar belakang	Terobosan		Outcomes
a. Banyaknya KL yang enggan melakukan evaluasi dan menggali potensi serta mengusulkan jenis dan tarif PNBPN karena penetapan jenis dan tarif PNBPN dengan PP membutuhkan proses yang panjang dan belum adanya insentif yang memadai untuk para pengelola PNBPN, mengakibatkan hilangnya potensi PNBPN. b. Realisasi PNBPN SDA non migas sektor mineral dan batubara selama tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan (rata-rata 77,29%) c. Terdapat kecenderungan pengembalian biaya operasi biaya melampaui pagu APBN/P setiap tahunnya. Setiap kenaikan US\$1 milyar berdampak pada penurunan penerimaan migas Rp10 trilyun. Pengendalian biaya operasi diperlukan untuk menjaga penerimaan migas dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap investasi sektor hulu migas	a. Optimalisasi PNBPN K/L Lainnya: 1) Penyederhanaan mekanisme penetapan tarif PNBPN K/L sesuai hasil pembahasan perubahan RUU PNBPN; 2) Kajian Pemberian insentif kepada pengelola PNBPN; 3) Pemetaan potensi PNBPN. b. Optimalisasi PNBPN Migas (<i>cost recovery</i>) Target biaya operasi migas dalam APBN/P menjadi acuan SKK Migas dan KKKS dalam menyusun <i>Work Program and Budget</i> (WP&B).		a. Meningkatnya kontribusi PNBPN tahun 2018: 1) 10 % dari target PNBPN Lainnya (PNBPN KL) dalam APBN Tahun 2017 2) 10 % dari target PNBPN sektor Minerba dalam APBN Tahun 2017 b. Realisasi <i>Cost recovery</i> tidak melebihi dari yang ditargetkan
	Milestones		Risiko
	a. 2016 1) Penyelesaian pemetaan potensi PNBPN K/L serta PNBPN SDA non migas sektor mineral dan batubara 2) Pagu <i>cost recovery</i> sebagai acuan SKK Migas dan KKKS dalam menyusun <i>Work Program and Budget</i> (WP&B). 3) Rekonsiliasi dan verifikasi data piutang PNBPN SDA sektor Minerba 4) Penyederhanaan mekanisme penetapan tarif PNBPN K/L sesuai hasil Pembahasan Perubahan RUU PNBPN; b. 2017 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN; 2) Penyelesaian aturan pemberian insentif kepada pengelola PNBPN; 3) Interkoneksi sistem pembayaran PNBPN melalui SIMPONI dengan sistem pemungutan PNBPN SDA Non Migas sektor mineral dan batubara melalui Minerba One Data Indonesia (MODI); 4) Terimplementasinya pengendalian biaya operasi (<i>cost recovery</i>) migas; 5) Ditetapkannya dasar hukum penyelesaian piutang PNBPN SDA sektor Minerba; 6) Membentuk forum asistensi dan konsultasi pengawasan penerimaan (termasuk PNBPN); c. 2018 1) Pemberian insentif pengelola PNBPN; 2) Implementasi pengendalian <i>cost recovery</i>; 3) koordinasi pelaksanaan inpres pengawasan oleh APIP K/L. 4) Penetapan Inpres terkait pengawasan PNBPN oleh APIP K/L (termasuk pengawasan pajak belanja pemerintah dan anggaran BUN) serta koordinasi pelaksanaan inpres pengawasan oleh APIP K/L.		a. Tidak disetujuinya aturan penyederhanaan pengelolaan PNBPN dan pemberian insentif b. Resistensi dari K/L dan pengusaha minerba c. Ketidakpatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap penetapan kesepakatan pagu <i>cost recovery</i>
Pendukung Kesuksesan			Unit Pengelola
a. Kapasitas SDM yang memadai b. Regulasi yang mendukung pelaksanaan terobosan c. Dukungan pendanaan dan Infrastruktur d. Koordinasi yg baik antar KL, unit dan sektor.			a. <i>Initiative Champion</i>: Direktur Jenderal Anggaran b. <i>Initiative Owner</i> : Dit. PNBPN, DJA c. Tim 1) Dit PNBPN, Dit. SP, DJA 2) Biro Hukum, Setjen 3) Itjen 4) PKPN, PKEM dan PKAPBN, BKF 5) Kemenkumham (Ditjen PP) 6) Setneg 7) Kementerian/Lembaga 8) SKK Migas, Komite Pengawas SKK Migas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

10. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi – Tema Perbendaharaan

Tujuan Inisiatif		Membangun Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, mempermudah pembayaran bagi wajib pajak/wajib bayar/ wajib setor, dan memperkuat akuntabilitas pelaporan	
Latar belakang		Terobosan	Outcomes
a. FMIS yang dibangun, Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara (SPAN) telah mendukung transaksi belanja untuk 23.693 satker dan sistem penerimaan negara (MPNG2) telah mendukung 90.71% transaksi penerimaan b. Penyerahan & verifikasi SPM dari satker masih bersifat tatap muka dan proses komitmen & pembayaran belanja rutin yg belum efisien c. Basis data keuangan yang belum terhubung dengan K/L dan belum optimalnya pemanfaatan data terpusat SPAN d. Pencatatan dan Pengelolaan Aset yang belum terintegrasi e. Multi <i>sign-on</i> atas beberapa bentuk Penerimaan Negara f. Beberapa kejadian <i>fraud & irregularities</i> oleh pengelola keuangan		a. <i>Streamlining</i> proses transaksi penerimaan negara dan transaksi belanja rutin & belanja bantuan b. <i>Back office</i> K/L atas transaksi belanja pegawai dipusatkan di Kemenkeu c. Pertukaran data dengan sistem dari pemangku kepentingan di luar Kemenkeu d. Laporan Keuangan K/L berbasis akrual melalui sistem aplikasi terintegrasi e. Pengelola keuangan BUN dan KL yang profesional dan bersertifikasi	a. Efisiensi dan Efektivitas proses pengadaan dan pembayaran Belanja Pemerintah 2017 Tingkat Kepuasan Penerima belanja Bantuan (kepala sekolah & penyuluh) 3 dari skala 5 2018 Meningkatnya penghematan Biaya Operasional Satker K/L untuk keperluan belanja rutin b. Kemudahan pembayaran bagi wajib pajak/wajib setor/wajib bayar 2017 100% penggunaan MPN G-2 2018 Tingkat Kepuasan WP/WS/WB atas layanan MPN G2 3 dari skala 5 c. Ketersediaan informasi pada LKKL untuk akuntabilitas & pengambilan keputusan 2017 Simplifikasi penyusunan LKKL satker piloting SAKTI (75%) 2018 Peningkatan akurasi LKKL satker pengguna SAKTI (75%)
		Milestones	Risiko
Pendukung Kesuksesan			Unit Pengelola
a. Dukungan Pimpinan untuk hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya b. Pengembangan Sistem IT dengan mengadopsi teknologi terkini		a. 2017: 1) Simplifikasi proses bisnis pertanggungjawaban belanja (SPJ); 2) Simplifikasi proses bisnis pertanggungjawaban keuangan Satker Piloting SAKTI 3) Piloting SAKTI 4) Roll out implementasi pembayaran gaji terpusat di Ditjen Perbendaharaan dan kajian <i>shared services</i> 5) Integrasi RKA-KL ke dalam SAKTI b. 2018 1) Portal <i>Single sign-on</i> Penerimaan Negara 2) Interkoneksi SPAN dengan sistem LKPP (data vendor) 3) Integrasi Aplikasi KPJM ke dalam SAKTI 4) Interkoneksi SIMAN dengan SAKTI 5) Penerapan SAKTI ke seluruh Satker Kementerian Keuangan 6) Interkoneksi SPAN dengan portal program K/L 7) Penyiapan dan Penyempurnaan Sistem Pembayaran Gaji KPPN Terpusat a. 2019 1) Penyiapan dan Penyempurnaan Sistem Pembayaran Gaji KPPN Terpusat untuk TNI/POLRI 2) Piloting SAKTI ke beberapa satker K/L lainnya b. 2020 : Penyiapan dan Penyempurnaan Aplikasi Gaji Satker Terpusat (PNS) Lingkup Eselon I DJPb c. 2021 : Penyiapan dan Penyempurnaan Aplikasi Gaji Satker Terpusat (PNS) Lingkup Kemenkeu dan Piloting satker K/L lainnya	a. Penyesuaian Perundang-undangan dan Peraturan b. Penggunaan Teknologi berdampak terhadap SDM & Organisasi a. <i>Initiative champion</i>: Direktur Jenderal Perbendaharaan b. <i>Initiative owner</i>: Dit. SITP, PA, SP, PKN, APK, DJPB c. Tim: 1) Kemenkeu (Pusintek; Setjen; DJP, DJPBC, DJA) 2) LKPP

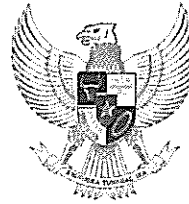


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

11. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara Dengan Instrumen Keuangan Modern – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya pengelolaan likuiditas (<i>cash shortage</i>) jangka pendek yang terpadu dan mendorong terciptanya suku bunga pasar yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi				
Latar belakang	Terobosan	Outcomes			
		a. Tersedianya pendanaan yang cukup untuk pembayaran beban APBN melalui berbagai opsi pembiayaan jangka pendek b. Penurunan <i>cost of fund</i> c. <i>Money market</i> yang likuid			
	Milestones	Risiko			
		a. Instrumen pembiayaan jangka pendek kurang diminati pasar. b. Risiko refinancing yang dapat mengancam kesinambungan fiskal.			
Pendukung Kesuksesan			Unit Pengelola		
			a. <i>Initiative champion</i>: 1) Dirjen Perbendaharaan 2) Dirjen PPR b. <i>Initiative owner</i>: 1) Direktur PKN - DJPB 2) Direktur SPP-DJPPR c. Tim: 1) DJPB (Dit PA, Dit SP, Dit. SITP, Dit. PPK BLU) 2) DJPPR (Dit SUN, Dit PS) 3) BKF (PKEM) 4) BI 5) OJK		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

12. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur Distribusi SBN Ritel secara Online – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif		Mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi di SBN Ritel, memperluas basis investor domestik, dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif		
Latar belakang	Terobosan		Outcomes	
			2018	2019
	a. Perancangan framework dan sistem distribusi SBN Ritel b. Perluasan basis investor domestik (<i>market deepening</i>) c. Pemerataan distribusi penjualan SBN Ritel		Jumlah investor SBN ritel baru bertambah	6000 7000
	Milestones		Risiko	
Pendukung Kesuksesan	a. 2017 1) Penyelesaian Rancangan Peraturan Pendukung 2) Perancangan Proses Bisnis Sistem SBN Ritel 3) Pembangunan jalur distribusi SBN Ritel secara online 4) Perancangan rencana kegiatan dalam rangka Public Outreach		Kurangnya koordinasi dalam hal regulasi pendukung dan perancangan sistem informasi yang terintegrasi	
	b. 2018 1) Uji coba 2) Peluncuran (<i>Go Live</i>)		Unit Pengelola	
			a. Initiative Champion: Dirjen PPR b. Initiative Owner: Dit. SUN dan Dit. PS, DJPPR c. Tim: 1) DJPPR 2) Pusintek 3) PKSK, BKF	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

13. Penjaminan Obligasi Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tercapai pemenuhan layanan publik yang baik dengan biaya yang efisien dan risiko fiskal yang minimal								
Latar belakang	Terobosan	Outcomes							
a. Berdasarkan RPJM 2015-2019 kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur diperkirakan Rp5.452 Triliun. Diperkirakan yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar 22% atau Rp1.178 Triliun, dan berasal dari BUMN sebesar 6 % atau Rp350 Triliun. b. Sebesar 72% atau Rp3.924 Triliun diharapkan dipenuhi dari swasta c. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mendorong pembiayaan dari sumber non APBN untuk pembiayaan infrastruktur terutama pembiayaan oleh badan usaha.	Memberikan penjaminan obligasi infrastruktur dari badan usaha yang berinisiatif membiayai proyek infrastruktur, untuk meningkatkan rating dan mengurangi <i>cost of fund</i> badan usaha	Jumlah dan nilai proyek infrastruktur yang terealisasi dengan skema penjaminan obligasi infrastruktur	<table><tr><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>Proyek</td><td>Proyek</td></tr></table>	2018	2019	1	2	Proyek	Proyek
2018	2019								
1	2								
Proyek	Proyek								
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Risiko							
a. Adanya Perpres dan Inpres untuk mensukseskan Proyek Strategis Nasional b. Adanya PT PII sebagai BUMN yg tugas dan fungsi nya memberikan penjaminan untuk proyek infrastruktur c. Terdapat instrumen pembiayaan untuk proyek : 1) Project Financing Sukuk. 2) WB dan ADB telah merapkan konsep <i>Performance Base Budgeting</i> 3) Availibility Payment dalam KPBU	a. 2016 – 2017 1) Penyelesaian Skema Penjaminan Obligasi Infrastruktur (termasuk benchmark lembaga keuangan internasional) 2) Perumusan kebijakan penjaminan obligasi infrstruktur b. 2018 Implementasi penjaminan obligasi infrastruktur	a. Menambah alokasi dana kewajiban penjaminan Pemerintah b. Risiko default BUMN selaku pihak Terjamin							
		Unit Pengelola							
		a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen PPR b. <i>Initiative Owner</i>: Dit. SPP dan Dit. PRKN, DJPPR c. Tim: 1) DJPPR (Dit. SPP, PRKN, PDPPI) 2) BKF (PKAPBN, PKEM, PKPPIM)							



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

14. Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif		Melakukan pemberdayaan aset untuk mendorong perekonomian nasional													
Latar belakang		Terobosan	Outcomes												
a. Pengelolaan aset yang ada saat ini belum dapat dilakukan secara optimal, dikarenakan: 1) Belum dilakukan IP menyeluruh terhadap aset misalnya aset eks-BPPN, aset BMN <i>idle</i>. 2) Terdapat aset yang secara fisik tidak berada di bawah penguasaan pengelola. 3) Permasalahan aset-aset eks-BPPN yang sulit diselesaikan (misalnya barang jaminan diambil alih). b. Adanya arahan Presiden untuk menyiapkan lahan guna mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). c. Belum optimalnya <i>database</i> portofolio aset. d. Terdapat potensi pemanfaatan aset melalui skema KSPI. e. Belum optimalnya penerimaan negara dari pengelolaan aset. f. Belum adanya potret potensi fiskal SDA sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal terkait SDA.		a. Kebijakan-kebijakan baru untuk mendorong <i>zero idle, cost saving</i>, PNBPN dan ketahanan ekonomi melalui optimalisasi aset. b. Integrasi perencanaan dan penganggaran aset. c. Integrasi IT untuk pengelolaan aset. d. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai operator pengelola barang. e. Penilaian SDA dalam rangka penyusunan Neraca SDA dan laporan potensi fiskal SDA.	<table><tr><td></td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>a. Optimalisasi Aset <i>Idle</i> Utilisasi terhadap</td><td>Utilisasi terhadap</td><td>Utilisasi terhadap</td></tr><tr><td></td><td>70%</td><td>80%</td></tr><tr><td></td><td><i>Cost saving</i> Rp 100M (subjek hasil inventarisasi)</td><td><i>Cost saving</i> s.d.Rp 200M (subjek hasil inventarisasi)</td></tr></table>		2017	2018	a. Optimalisasi Aset <i>Idle</i> Utilisasi terhadap	Utilisasi terhadap	Utilisasi terhadap		70%	80%		<i>Cost saving</i> Rp 100M (subjek hasil inventarisasi)	<i>Cost saving</i> s.d.Rp 200M (subjek hasil inventarisasi)
	2017	2018													
a. Optimalisasi Aset <i>Idle</i> Utilisasi terhadap	Utilisasi terhadap	Utilisasi terhadap													
	70%	80%													
	<i>Cost saving</i> Rp 100M (subjek hasil inventarisasi)	<i>Cost saving</i> s.d.Rp 200M (subjek hasil inventarisasi)													
Pendukung Kesuksesan		Milestones													
a. Sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelesaian inisiatif, termasuk: 1) Anggaran: a) Penilaian menyeluruh terhadap aset (tanah dan bangunan serta SDA prioritas mineral timah. b) Untuk infrastruktur penyelesaian pengembangan dan pemeliharaan SIMAN dan Modul KNL. 2) SDM: Untuk penilaiandapat melibatkan kantor vertikal dan bekerja sama dengan P2PK. b. Prasyarat yang dibutuhkan dari unit/inisiatif lain: 1) <i>Database</i> nilai aset dan portofolio aset yang terbangun 2) Penyelesaian status hukum (Dukungan untuk penyusunan RPP/PMK/Nota kesepemahaman sehingga bila HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah telah berakhir tetap dapat diurus oleh Kemenkeu, tidak ke pihak lain dan kerjasama dengan institusi terkait)		a. 2017 1) Inventarisasi dan penatausahaan aset negara. 2) Penyusunan/simplifikasi peraturan terkait pengelolaan aset (pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan aset dan KSPI). 3) Menyusun mekanisme dalam perencanaan aset sebagai bahan efisiensi penganggaran belanja modal. 4) IT <i>based</i> dalam pengelolaan aset. 5) Optimalisasi aset : dengan utilisasi aset <i>idle</i> dan penerapan strategi pengelolaan aset. b. 2018 1) Inventarisasi dan penilaian aset untuk tanah dan bangunan. 2) Terbentuknya Laporan Potensi Fiskal SDA untuk akun Timah 3) IT <i>based</i> dalam pengelolaan aset. 4) Implementasi evaluasi portofolio aset. 5) Optimalisasi aset : dengan utilisasi aset <i>idle</i> dan penerapan strategi pengelolaan aset.	b. Terutilisasinya aset PNBPN melalui pemanfaatan aset Rp 0,741 T PNBPN s.d. Rp 1,7 T (sewa) c. Kontribusi Lahan untuk pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional 22 ruas tol, 4 infrastruktur transportasi, 24 bendungan.												
		Risiko	a. Banyaknya masalah hukum yang dihadapi dalam upaya memperjelas status hukum aset. b. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dan BPN.												
		Unit Pengelola	a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Kekayaan Negara b. <i>Initiative Owner</i>: c. Tim: 1) DJKN (Dit. BMN, Dit. PNKNL, Dit. PKNSI, LMAN, Dit. Penilaian) 2) BKF (PKPPIM, PKEM)												

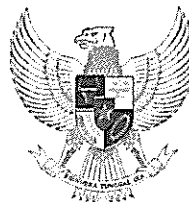


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

15. Optimalisasi Investasi Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif		Mendorong Penyelarasan Pembiayaan Pembangunan Nasional Melalui Optimalisasi Investasi Pemerintah	
Latar belakang	Terobosan	Outcomes	
a. Tingginya <i>logistic cost</i> di Indonesia dibandingkan negara lain, yang menghambat pertumbuhan ekonomi. b. Adanya kebutuhan pendanaan yang besar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. c. Adanya <i>financing gap</i> dalam pembangunan infrastruktur. d. Belum optimalnya penerimaan negara dari portofolio investasi yang dimiliki pemerintah. e. Belum optimalnya penilaian kinerja hasil investasi pemerintah pada KND. f. BUMN mempunyai potensi untuk mendukung pembiayaan pembangunan.	a. Penyelarasan pembiayaan proyek melalui <i>leverage</i> BUMN dan manajemen portofolio investasi b. Implementasi prinsip-prinsip investasi melalui Revisi PP 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah c. Transformasi PT SMI menjadi LPPI d. Pembentukan <i>holding</i> BUMN	a. Mengurangi <i>exposure</i> APBN untuk pembiayaan pembangunan b. Meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari portofolio investasi pemerintah	
	Milestones	IKU	
	a. 2017 1) Forum penyelarasan pembiayaan proyek (Kemenkeu, Kemeneg BUMN, Bappenas) untuk menetapkan kebijakan 2) Kajian optimalisasi potensi pendanaan pembangunan <i>leverage</i> BUMN dan manajemen portofolio investasi 3) Tersedianya infrastruktur <i>system</i> informasi untuk interkoneksi data dengan <i>stakeholder</i> terkait. 4) Draf Revisi PP Nomor 1 / 2008. 5) Kajian pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur (dalam jangka panjang: integrasi lembaga pembiayaan yang ada) 6) Terbentuknya holding BUMN 7) <i>Monitoring</i> terkait efektivitas investasi pemerintah. b. 2018 1) Regulasi terkait dengan manajemen portofolio investasi telah ditetapkan. 2) Terbangunnya interkoneksi data antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. 3) Penyempurnaan Modul KND terkait integrasi fungsi perencanaan investasi, kinerja keuangan, analisis dan proyeksi, penatausahaan KND, serta penilaian kinerja hasil investasi pemerintah pada KND (aplikasi EWS Kinerja BUMN versi 3.0). 4) Mulai melaksanakan kegiatan <i>monitoring</i> terkait efektivitas pelaksanaan <i>holding</i> BUMN	a. Persentase dukungan pemerintah terhadap pembiayaan pembangunan (ditargetkan menurun) b. Peningkatkan Penerimaan Negara yang berasal dari investasi pemerintah sebesar Rp 1,6 T (Target 2017 untuk kinerja 2016: 716 M, Target 2018 untuk kinerja 2017: 906,8 M)	
		Risiko	
	a. Risiko politis apabila terdapat resistensi dari Menteri lain. b. Risiko tidak tercapainya target		
Pendukung Kesuksesan		Unit Pengelola	
Ketersediaan : a. Regulasi b. SDM c. Anggaran d. Sinergi e. Teknologi Informasi f. SOP <i>link</i>		a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Kekayaan Negara b. <i>Initiative Owner</i>: Dit. KND, DJKN c. Tim: 1) Perwakilan DJPB 2) Perwakilan BKF (PKEM, PKAPBN) 3) Perwakilan DJPPR 4) Perwakilan DJA 5) Kementerian BUMN 6) Kementerian teknis pengelola BLU	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

16. Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BUN dan Implementasi Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada LKPP (K/L dan BUN)
(Internal Control Over Financial Reporting – ICOFR) – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Implementasi dan penilaian terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan APIP K/L dan BUN untuk mendukung pencapaian opini WTP dari BPK atas seluruh LK Pemerintah.							
Latar belakang	Terobosan				Outcomes			
a. Temuan BPK RI pada LKPP 2015 dan Temuan BPK RI pada audit Kinerja ICOFR 2015 menyatakan belum ada dasar manajemen untuk menjamin adanya pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangannya. b. Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP belum memiliki dasar. c. Pedoman penilaian terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan baik instansi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L lain belum disusun.	a. Menetapkan kebijakan implementasi ICOFR kepada K/L b. Melaksanakan transfer of knowledge dan menyediakan asistensi dalam implementasi ICOFR				a. Opini BPK atas LKBUN dan LKPP	2017	2018	2019
	Milestones				b. Opini BPK atas LK KemenPUPera dan Kemensos.	WTP	WTP	WTP
	a. 2016 1) Penetapan PMK mengenai ICOFR dan <i>public hearing</i> ke seluruh KL 2) Penyusunan petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan anggaran BUN; b. 2017 1) Uji coba pelaksanaan Reviu ICOFR pada LKBUN, BA 15 dan LKPP (LK tahun 2016 2) Penyusunan <i>Risk Control Matrix (RCM)</i> LK BUN, LK BA 15 dan LKPP. 3) Sosialisasi PMK tentang Penerapan, Penilaian, dan Reviu ICOFR pada seluruh K/L 4) Penerapan dan penilaian ICOFR LK BUN, LK BA 15, dan LKPP (LK 2017) 5) Asistensi penerapan, penilaian, dan reviu ICOFR pada Kemen PUPR, Kemensos, dan BPKP.				6) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BUN. 7) Asistensi dan konsultasi pengawasan pelaksanaan anggaran BA BUN kepada kementerian diluar Kementerian Keuangan. 8) Pengawasan bersama pelaksanaan anggaran BA BUN. c. 2018 1) Pelaksanaan reviu ICOFR pada LKBUN, BA 15 dan LKPP (LK tahun 2017). 2) TOT penerapan, penilaian, dan reviu ICOFR untuk seluruh APIP K/L. 3) Asistensi penerapan, penilaian, dan reviu ICOFR pada seluruh K/L. 4) Uji coba pelaksanaan reviu ICOFR pada seluruh K/L	Risiko a. Resistensi Manajemen maupun APIP K/L; b. Irisan fungsi dengan BPKP c. Kesulitan dalam memberikan pemahaman mengenai ICOFR kepada K/L baik pada sisi manajemen maupun APIP		
	Pendukung Kesuksesan a. Komitmen dan dukungan dari Pimpinan Kemenkeu dan K/L lain b. Komitmen dan dukungan Ditjen terkait c. Dukungan APIP K/L				Unit Pengelola a. <i>Initiative Champion</i> : Inspektur Jenderal Kemenkeu b. <i>Initiative Owner</i> : Inspektur III, Itjen c. Tim: 1) DJPB (Dit. APK) 2) Seluruh Eselon I Kemenkeu 3) Seluruh APIP K/L 4) Seluruh penyusun LK pada K/L			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

17. Mewujudkan APBN Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektifitas Belanja Negara – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif		Terwujudnya efisiensi dan efektifitas belanja negara guna mendukung pengelolaan APBN yang berkualitas			
Latar belakang	Terobosan	Milestones	Outcomes		2017 2018
a.Melebarnya Defisit Anggaran Negara disertai dengan <i>trend</i> realisasi yang dibawah Pagu Belanja memberikan indikasi awal adanya kondisi <i>overbudget</i> pada beberapa aspek. b.Sejalan dengan trend peningkatan belanja, alokasi belanja untuk birokrasi terus meningkat. c.Tekanan defisit anggaran baik yang diakibatkan dari tidak tercapainya target pendapatan negara maupun dengan terus meningkatnya kebutuhan belanja negara memerlukan upaya efisiensi atas belanja eksisting	a. Efisiensi 1) Kerangka analisis biaya: a) Kontrol atas input yang berkaitan dengan biaya birokrasi, termasuk tentang perjalanan dinas, honorarium tim, dan biaya rapat; b) Benchmarking Belanja K/L sebagai langkah <i>Mapping</i> potensi pemborosan belanja c) Penurunan biaya pendukung atas output serta penggunaan biaya standar 2) biaya birokrasi/aparatur: a) Penyederhanaan Satker Pengelola Anggaran b) Protokol koordinasi terkait proses reorganisasi & <i>rightsizing</i> dengan Kemenpan-RB b. Efektifitas: 1) Mengalihkan belanja konsumtif ke belanja yang lebih produktif; 2) memperbaiki sistem penyaluran subsidi dan bantuan sosial; 3) Perumusan pagu: Peningkatan kualitas KPJM; Penajaman rumusan <i>reviu base line</i> ; Penilaian proposal penambahan pagu;	a.2017 1) Kajian kebijakan alokasi belanja pusat dan daerah yang inefisien; 2) Penyusunan dan penelaahan KPJM; 3) Penyusunan database K/L yang terintegrasi serta mapping potensi inefisiensi belanja K/L; 4) Perumusan pagu memanfaatkan hasil <i>Reviu base line</i> , analisis KPJM, dan penilaian proposal penambahan pagu serta sinkronisasi alokasi DK/TP dengan transfer; 5) Penyederhanaan Satker Pengelola Anggaran; 6) Revisi peraturan Perjadin/honortim/biaya rapat yang berlaku; 7) <i>Reviu</i> penataan organisasi & <i>rightsizing</i> dengan Kemenpan-RB; 8) Penyusunan Benchmark Belanja K/L; 9) <i>Piloting</i> efisiensi dan efektivitas belanja Birokrasi BA 015 melalui penyusunan profil belanja Kemenkeu/ <i>Spending Review</i> . b.2018: 1) merumuskan sistem penyaluran subsidi dan bantuan sosial untuk menggunakan basis data terpadu TNP2K (tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan); 2) Mengalihkan belanja konsumsi ke belanja yang lebih produktif; 3) Integrasi Pengaturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Negara; 4) Pembandingan biaya birokrasi pada tiap level pemerintahan; 5) Standardisasi Biaya bersifat generik; 6) Sinkronisasi standar biaya kantor vertikal internal yang disusun Biro Cankeu dengan Standar Biaya yang disusun DJA	a.Berkurangnya belanja K/L dalam rangka penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dengan output yang sama (<i>strategic cost saving</i>) 5% 5% b.Belanja K/L dan belanja subsidi yang tepat sasaran n/a 100%	Risiko	
Pendukung Kesuksesan			a.Resistensi atas Kewenangan Pengaturan pengelolaan keuangan di daerah b.Resistensi atas Penyederhaan satker terutama untuk Dekon dan TP c.Mitigasi dengan: 1) Koordinasi intensif atas terobosan yang akan bersinggungan dengan pihak eksternal 2) Dukungan dari Kabinet guna mendorong belanja yang lebih efektif dan efisien		
			Unit Pengelola		
			a. <i>Initiative Champion</i> : Dirjen Anggaran b. <i>Initiative Owner</i> : Dit. Anggaran Bid PMK, DJA c.Tim: 1) Internal: DJA, DJPK, DJPb, BKF (PKEM, PKAPBN), Itjen 2) Eksternal :K/L/Pemda, KemenPAN-RB (Kelembagaan)		

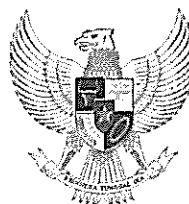


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

18. Meningkatnya Kualitas SDM dan Standar Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif		Terciptanya kebijakan perencanaan penganggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan yang terpadu berdasarkan tools, arsitektur dan informasi kinerja anggaran dan Monev yang handal (<i>reliable</i>)								
Latar belakang		Terobosan		Outcomes						
a. Anggaran pendidikan dan kesehatan terus meningkat, sejalan dengan penerapan mandatory spending anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 5%; dimana sebesar 64% anggaran pendidikan dan 21% anggaran kesehatan dialokasikan melalui mekanisme transfer ke daerah. b. Kinerja anggaran yang belum optimal dalam mendukung peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan (baik sisi <i>supply</i> dan <i>demand</i>), karena: 1) Belum terintegrasinya data anggaran dan kinerja ditingkat pusat dan daerah sampai dengan kabupaten/kota. 2) Belum terdefinisiannya dengan baik target output dan <i>outcome</i> dari tingkat pusat dan daerah sampai dengan kab/kota; 3) Belum terintegrasinya perencanaan dan monev ditingkat pusat dan daerah.		a. Menyusun peta anggaran (<i>Budget Map</i>) dan capaian kinerja pada Menyusun peta anggaran (<i>Budget Map</i>) dan capaian kinerja pada bidang pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan <i>dashboard</i> pengawasan b. Meredesain arsitektur dan informasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan yang berfokus pada <i>outcomes</i>; c. Mempertajam aspek monev kinerja anggaran bidang pendidikan dan kesehatan; d. Menyajikan rekomendasi <i>spending policy</i> pada bidang pendidikan dan kesehatan pada <i>policy forum</i>; e. Memastikan bekerjanya <i>task force</i> untuk mendukung implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di K/L dan daerah bidang pendidikan dan kesehatan dengan pola <i>project-based</i>; f. Sinkronisasi terminologi <i>output/outcome</i> dalam dokumen penganggaran (Kemenkeu) dan perencanaan pembangunan nasional.		<table><tr><td>a. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan pada pusat dan daerah, terutama dengan indikator proporsi anggaran untuk non-operasional/non aparatur.</td><td>2017 5% (pagu In-dikatif TA 2018)</td><td>2018 5% (pagu In-dikatif TA 2019)</td></tr><tr><td>b. Meningkatnya total anggaran bidang pendidikan dan anggaran bidang kesehatan pada daerah tertentu/ pinggiran</td><td>n/a</td><td>10%</td></tr></table>	a. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan pada pusat dan daerah, terutama dengan indikator proporsi anggaran untuk non-operasional/non aparatur.	2017 5% (pagu In-dikatif TA 2018)	2018 5% (pagu In-dikatif TA 2019)	b. Meningkatnya total anggaran bidang pendidikan dan anggaran bidang kesehatan pada daerah tertentu/ pinggiran	n/a	10%
a. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan pada pusat dan daerah, terutama dengan indikator proporsi anggaran untuk non-operasional/non aparatur.	2017 5% (pagu In-dikatif TA 2018)	2018 5% (pagu In-dikatif TA 2019)								
b. Meningkatnya total anggaran bidang pendidikan dan anggaran bidang kesehatan pada daerah tertentu/ pinggiran	n/a	10%								
Pendukung Kesuksesan		Milestones		Risiko						
a. SDM: dukungan penuh dari pimpinan unit eselon I selaku <i>dean</i>, pejabat yang menangani pengembangan SDM di unit selaku <i>coordinator skill group owner</i> (SGO), dan seluruh jajaran yang memiliki kompetensi teknis untuk berpartisipasi aktif melakukan <i>knowledge sharing</i> sebagai SGO. b. Anggaran: Diperlukan untuk memperbaiki proses bisnis yang telah ada dan untuk mengembangkan infrastruktur terkait teknologi dan informasi.		a. 2017 : 1) <i>Prototype</i> rumusan arsitektur dan informasi kinerja anggaran, tool monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, <i>dashboard</i> dan <i>Budget Map</i> bidang pendidikan dan kesehatan; 2) Sinkronisasi terminologi output/outcome dalam dokumen penganggaran (Kemenkeu) dan perencanaan pembangunan nasional; 3) Arsitektur dan informasi kinerja anggaran 100%; 4) Terintegrasinya data anggaran dan kinerja ditingkat pusat dan daerah sampai dengan kabupaten/kota; 5) <i>Tools</i> monitoring dan evaluasi kinerja anggaran mencakup 70% satker input; 6) <i>Dashboard</i> dan <i>Budget Map</i> 70% wilayah Indonesia; 7) Bekerjanya <i>task force</i> untuk mendukung implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). b. 2018: 1) rumusan arsitektur dan informasi kinerja anggaran, tool monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, <i>dashboard</i> dan <i>Budget Map</i> bidang pendidikan dan kesehatan <i>fully running and published</i>; 2) Komunikasi dan koordinasi penggunaan dan pemanfaatannya (<i>spending policy intervention</i>); 3) Bekerjanya <i>task force</i> untuk mendukung implementasi PBK (lanjutan).		a. Cara pandang K/L hanya terfokus pada WTP tapi tidak/kurang menekankan ketercapaian outcomes dari kebijakan belanjanya; b. Lemahnya komitmen bersama para <i>stakeholder</i> (atas keterbukaan informasi dan fokus orientasi pada kinerja anggaran) ; c. Gesekan kewenangan antar <i>stakeholder</i> yang menghambat indikator keterpaduan arsitektur dan kinerja anggaran dan perbedaan <i>policy setting</i>; d. Mitigasi dengan: 1) Perubahan carapandang K/L untuk tidak hanya berfokus pada WTP tapi juga dengan menekankan ketercapaian outcomes dari kebijakan belanjanya; 2) Meningkatkan keterbukaan informasi; 3) Meningkatkan kualitas koordinasi.						
				Unit Pengelola						
				a. <i>Initiative Champion</i>: Dirjen Anggaran b. <i>Initiative Owner</i>: Dit. PAPBN, DJA c. Tim: 1) DJA, DJPK, DJPb 2) PKEM, PKAPBN - BKF						

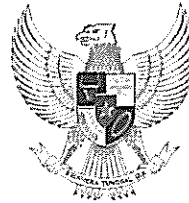


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

19. Menghadirkan Pemerintah pada Seluruh Wilayah Indonesia melalui Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif	Meningkatkan efektivitas TKDD dalam mendorong percepatan penyediaan layanan publik dasar yang berstandar nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah		
Latar belakang	Terobosan	Outcomes	
a. Arahan Presiden agar pendekatan penganggaran lebih fokus pada program/ kegiatan (<i>money follows program</i>) yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. b. Penganggaran program/kegiatan di daerah yang bersumber dari TKDD sering kali belum sinkron dengan penganggaran K/L di daerah, banyak daerah yang membiayai urusan pusat dan sebaliknya c. Masih rendahnya kualitas belanja daerah yang terlihat dari: 1) Ketimpangan antar daerah dan keterbatasan layanan publik dasar bagi masyarakat miskin. 2) Kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat usia produktif karena porsi belanja modal lebih kecil daripada belanja lainnya (rasio belanja modal APBD 2016 23,95%) 3) Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap total belanja daerah tahun 2015 sebesar 7,97%	a. Mengintegrasikan mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja K/L dan transfer ke daerah dengan memperhatikan <i>money follows program</i>. b. Menyusun rambu-rambu penggunaan dana <i>block grant</i>. c. Pemanfaatan hasil movev transfer spesifik dalam kebijakan pemberian <i>reward and punishment</i>.	2018 a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 1) Rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal 7,21% 2) Local Tax Ratio 2,2 b. Meningkatkan kesejahteraan & pemerataan kualitas layanan dasar public 1) Indeks Pembangunan Manusia 70,37 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,39 - 5,19% 3) Tingkat Kemiskinan 7,05% c. Meningkatkan kesehatan fiskal 1) Rasio Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD : a) Rata-rata kab/kota 28% b) Rata-rata provinsi 27% 2) Rasio belanja infrastruktur 23,11% 3) Rasio SiLPA terhadap belanja 7,00%	
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Risiko	
a. PMK 48/2016 mengenai pengelolaan TKDD. b. PMK 112/2016 tentang Movev. c. DAK berbasis proposal. d. Telah dikembangkan <i>web based reporting system</i>. e. DJPK sebagai penyelenggara SIKD nasional. f. Kerjasama pelaksanaan <i>in-house training</i> antara DJPK dengan daerah. g. DJPK sebagai pembina Jabatan Fungsional AKPD nasional. h. DJPK berada dalam satu tema inisiatif strategis dengan DJA dan BKF. i. Ketentuan 25% dari Dana Transfer Umum dalam APBN untuk belanja infrastruktur (belanja modal) dalam UU APBN 2017	a. 2017 1) Revisi PMK 48/2016 pada bagian rambu-rambu penggunaan dana <i>block grant</i> 2) Perumusan <i>reward and punishment</i> pelaksanaan aturan <i>block grand</i> dalam RUU HKPD dan UU APBN b. 2018 1) Sinkronisasi DAK berbasis proposal dengan program-program belanja K/L yang dihimpun dari Musrenbang a) Adanya kesepakatan para pihak (payung hukum) b) Penyusunan Aplikasi yang terintegrasi c) Tahapan Implementasi 2) Penerapan <i>web based reporting system</i> dalam laporan Transfer Spesifik 3) Pembangunan <i>Executive Information System</i> (EIS) SIKD. 4) Pengembangan peran fungsional analisis keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan/penyusunan anggaran.	a. Ketidaksepahaman antar K/L serta Bappenas terhadap perencanaan dan penganggaran TKDD. b. Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan TKDD yang ditetapkan pemerintah pusat c. Rencana mitigasi: 1) Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi dengan K/L dan Bappenas dalam perencanaan dan penganggaran TKDD 2) Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah.	
		Unit Pengelola	
		a. Initiative Champion: Dirjen Permbangan Keuangan b. Initiative Owner: Dit. Daper, DJPK c. Tim: 1) DJPK : Dit. Daper, Dit. PTNDP, Dit. EPIKD, Dit. PKKD 2) DJA: Dit. PAPBN, Dit. Anggaran Bidang Ekontim, Dit. Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA-BUN 3) BKF : PK APBN, PKEM	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

20. Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif	Program pensiun dan THT yang lebih efektif dan efisien					
Latar belakang	Terobosan	Outcomes				
		2018	2019	2020		
	a. Potensi beban APBN yang tinggi dari skema pensiun yang <i>existing</i> (<i>pay as you go</i>): 1) Adanya keterbatasan anggaran 2) Data menunjukkan belanja pensiun semakin meningkat dari tahun ke tahun 3) Pengelolaan iuran pensiun yang belum optimal b. Berdasarkan perhitungan terakhir tagihan unfunded THT mencapai Rp29 triliun c. UU ASN mengindikasikan perlunya reformasi di bidang pengelolaan program pensiun PNS d. Amanat UU 12 Tahun 1980 yang memberikan ruang adanya overlapping pemberian pensiun. Beberapa orang mendapatkan pensiun dari jabatan berbeda. e. Meningkatnya life <i>expectancy</i> masyarakat Indonesia.	a. Pengelolaan Program Pensiun PNS dengan skema yang mendukung <i>fiscal sustainability</i> ; b. Adanya kebijakan terkait lembaga pengelola, lembaga pendukung dan infrastruktur terkait pengelolaan skema pensiun yang baru (lembaga BUMN di bawah Kementerian Keuangan); c. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang memayungi program pensiun PNS yang baru.	▪ Perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun PNS yang ▪ Perbaikan lembaga penyelenggara program pensiun Pegawai Negeri ▪ Peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun			
		Milestones				
			Skema dana pensiun yang komprehensif a. 2017: Kajian mengenai perubahan skema pensiun PNS yang sesuai dan mendukung keberlangsungan fiskal b. 2018 1) Penentuan skema pensiun yang akan dilaksanakan 2) Penyusunan regulasi skema pensiun dan JHT yang baru 3) Penyiapan regulasi kelembagaan penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru c. 2019 1) Penetapan regulasi skema pensiun dan JHT yang baru 2) Penetapan regulasi kelembagaan penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru d. 2020 1) Implementasi penuh skema pensiun dan JHT yang baru 2) Operasional lembaga penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru	Risiko a. Tingginya resistensi dari lembaga penyalur dana pensiun saat ini (PT Taspen) b. Adanya resistensi dari pejabat/pegawai yang telah menikmati manfaat pensiun lebih dari satu jabatan		
Pendukung Kesuksesan		Unit Pengelola				
a. RPP turunan UU ASN pengelolaan program pensiun; b. Kesepahaman antara Kementerian Keuangan , Bappenas, Men-PAN RB, BKN dan KASN terkait skema pengelolaan pensiun.		Initiative Champion: Direktur Jenderal Anggaran, Sahli Kebijakan Regulasi Pasar Modal & Keuangan Initiative Owner: Dit. HPP, DJA Tim: DJA, DJPB, BKF				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

G. Penggunaan Piagam (*Charter*) IS RBTK

1. Piagam (*Charter*) dari masing-masing IS RBTK tersebut di atas merupakan acuan dalam implementasi IS RBTK, baik pada Tema Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral.
2. Dengan diimplementasikannya 20 IS RBTK tersebut diharapkan *strategic outcome* Kemenkeu yaitu “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan *sustainable*” dapat dicapai untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik serta Indonesia yang adil dan makmur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703-1-001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7 (TUJUH) IS RBTK PENDUKUNG 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) IS RBTK SEBAGAIMANA
DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/KMK.01/2014

Dalam rangka mendukung implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, ditetapkan 7 (tujuh) IS RBTK Pendukung dalam Tema Penganggaran dan Tema Kepabeanaan dan Cukai, yaitu:

A. Tema Penganggaran

1. Reformulasi Kebijakan Pengalokasian Transfer Ke Daerah;
2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Tax Ratio*);
3. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
4. Peningkatan Efektivitas Monitoring Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan; dan
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.

B. Tema Kepabeanaan dan Cukai

1. Pusat Logistik Berikat Sebagai Alternatif Solusi Logistik Nasional; dan
2. Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut.

C. Piagam (*Charter*) IS RBTK

Gambaran detail 7 (tujuh) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dan huruf B tercantum pada masing-masing piagam (*charter*) IS RBTK sebagai berikut:



8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Tax Ratio*) - Tema Penganggaran

Tujuan	Mendukung peningkatan rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (<i>Tax and Levy Ratio</i>)		
Latar belakang	Perubahan dalam model operasional	Dampak dan IKU	
a. <i>Tax Ratio</i> relatif masih rendah yaitu sekitar 1,8. Hal ini menyebabkan pajak daerah dipungut jauh dibawah potensi sebenarnya.	a. Pelaksanaan evaluasi Raperda dan monev pungutan PDRD;	2017 2018 2019 2020 <i>Tax Ratio</i> 2,1 2.2 2.3 2.5	
b. Hal tersebut disebabkan oleh basis pajak yang masih rendah dan upaya optimalisasi pemungutan masih terbatas	b. Pengembangan model analisis penghitungan potensi pajak daerah;	Struktur tata kelola	
	c. Variabel potensi pajak daerah sebagai bagian dari kapasitas daerah dalam rangka kebijakan HKPD		
	d. Pelaksanaan Bimtek Optimalisasi dan Modernisasi Pajak Daerah		
Faktor keberhasilan	Ringkasan tindakan yang diajukan	Initiative champion Unit Ditjen	
a. Tersedianya Model Monev dan Model Perhitungan Potensi Pajak Daerah	a. Membuat Model Evaluasi dan Monev	▪ Dirjen Perimbangan Keuangan DJPK	
b. Tersedianya Anggaran Bimtek dan komitmen <i>Funds sharing</i> dari Pemda	b. Menyusun Model Perhitungan Potensi Pajak Daerah	Initiative owner Unit Ditjen	
c. terselesaikannya revisi UU 28/2009	c. Penetapan variabel potensi pajak daerah sebagai bagian dari kapasitas daerah dalam rangka kebijakan HKPD	▪ Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah DJPK	
	Outcome utama	Tim Unit Ditjen	
	a. Penetapan variabel perhitungan potensi Pajak Daerah	▪ DJPK- (Dit.PKKD), Kemendagri DJPK	
	b. Pengembangan model dan kajian potensi PAD		
	c. Pengembangan dan pelaksanaan Bimtek Pajak Daerah		
	d. Modernisasi Pajak Daerah		

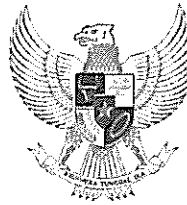


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) - Tema Penganggaran

Tujuan :		Mengoptimalkan pemanfaatan SIKD sebagai <i>one source</i> data keuangan daerah di level Nasional guna mendukung proses pengambilan kebijakan Pemerintah yang lebih baik					
Latar belakang	a. Belum terintegrasinya data keuangan daerah Data keuangan daerah tersebar (<i>scattered</i>) di beberapa instansi /unit sehingga menghambat proses penyajian data dan informasi untuk kebutuhan pimpinan dan <i>stakeholder</i> lain. b. Adanya redundansi penyampaian data 1) Penyampaian data keuangan daerah oleh Pemda ke Pusat dilakukan beberapa kali untuk instansi/unit yang berbeda. 2) Pengumpulan data untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi dilakukan berulang kali oleh unit yang berbeda. c. Penyajian data dan informasi belum didukung dengan mekanisme dan prosedur yang memadai 1) Data disajikan dari berbagai sumber sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan data 2) Diperlukan mekanisme dan prosedur kerja guna menjaga <i>data integrity</i>	Perubahan dalam model operasional		Outcome utama			
		a. Mendesain pemanfaaaan SIKD untuk mewujudkan: b. Integrasi data keuangan daerah ke SIKD c. Sinkronisasi data dan informasi untuk menjaga <i>data integrity</i> d. Otomatisasi penyediaan layanan data untuk kebutuhan level eksekutif dan <i>stakeholder</i> sesuai dengan kesepakatan		a. Implementasi pembakuan dan standar teknis penyelenggaraan SIKD b. Koordinasi, kerjasama, dan pembinaan dengan Pemda dan Instansi terkait c. Implementasi model penyajian informasi dari SIKD untuk level DJPK d. Implementasi modul konsolidasi e. Implementasi model penyajian informasi dari SIKD untuk Menteri Keuangan f. Pengembangan monitoring tren keuangan daerah g. Implementasi modul interkoneksi dengan sistem BI h. Implementasi interkoneksi SIKD dengan dashboard kepresidenan i. Implementasi modul layanan data ke GFS j. Pengembangan <i>private cloud</i> dan <i>cloud computing</i> untuk mendukung penyediaan layanan SIKD			
		Ringkasan tindakan yang diajukan					
Faktor keberhasilan	a. Menyusun dan mengimplementasikan pembakuan dan standar teknis penyelenggaraan SIKD yang meliputi pembakuan pengkodean Pemda, pembakuan Bagan Akun Standar (BAS) SIKD, pembakuan data, pembakuan prosedur, pembakuan infrastruktur pendukung, pembakuan pertukaran data, pembakuan penyajian informasi, dan pembakuan arsip SIKD b. Pengembangan aplikasi untuk mengintegrasikan aplikasi SIKD Nasional dengan aplikasi SIKD Daerah dengan menerapkan ketentuan pembakuan SIKD (agen SIKD) 1) Pembangunan <i>Executive Information System</i> (EIS) SIKD 2) Menyusun dan mengimplementasikan SOP Penyampaian data dan informasi dan SOP Penyajian dan Pemanfaatan Informasi 3) Menyusun dan mengimplementasikan modul layanan data untuk kebutuhan konsolidasi 4) Pembangunan sistem monitoring tren keuangan daerah 5) Menyusun dan mengimplementasikan interkoneksi SIKD dengan Bank Indonesia (BI) 6) Menyusun dan mengimplementasikan interkoneksi SIKD dengan <i>dashboard</i> Kepresidenan 7) Menyusun dan mengimplementasikan modul layanan data untuk kebutuhan GFS 8) Menyusun dan mengembangkan <i>private cloud</i> dan <i>cloud computing</i> SIKD untuk mendukung penyediaan layanan SIKD	Dampak dan IKU					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

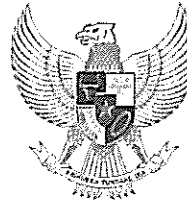
4. Peningkatan Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan - Tema Penganggaran

Tujuan	Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan di bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.							
Latar belakang	Perubahan dalam model operasional a. Metodologi monitoring dan evaluasi atas penggunaan transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan: 1) keterpaduan pelaksanaan monev, 2) tahapan pelaksanaan yang baku, 3) pengukuran indikator yang jelas, 4) memiliki target atau rencana jangka panjang yang jelas, 5) berbasis hasil. b. Pemanfaatan IT menuju <i>e-reporting</i> dan <i>e-monev</i>; 1) Pengembangan pelaporan penggunaan anggaran berbasis web 2) Penguatan <i>database</i> 3) Monitoring dan evaluasi secara <i>web (e-monev)</i>	Dampak dan IKU Persentase Pemda yang melakukan pelaporan berbasis web <table><tr><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr></table> Persentase pemda yang dilakukan <i>e-monev</i> 2020 50%	2017	2018	2019	50%	75%	100%
2017	2018	2019						
50%	75%	100%						
	Ringkasan tindakan yang diajukan a. Penyusunan metodologi monitoring dan evaluasi; b. Penyusunan payung hukum (PMK); c. <i>Capacity building</i>; d. <i>Piloting</i> dan pelaksanaan monev; e. Pengembangan menjadi <i>e-Monev</i>;							
Faktor keberhasilan	Outcome utama a. Tahun 2016 : penyelesaian metodologi dan payung hukum, <i>piloting</i> pelaksanaan monev; b. Tahun 2017: pengembangan pelaporan berbasis web secara bertahap, <i>piloting</i> lanjutan pelaksanaan monev; c. Tahun 2018: sebagian besar pemda menyampaikan laporan melalui sistem berbasis web; d. Tahun 2019 : seluruh pemda menyampaikan laporan melalui sistem berbasis web; e. Tahun 2020: pelaksanaan <i>e-monev</i>.	Unit Pengelola a. Initiative champion: Dirjen Perimbangan Keuangan b. Initiative owner: Direktur EPIKD c. Tim: 1) Dit. EPIKD 2) Dit. Daper 3) Dit. PKD						



5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah - Tema Penganggaran

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Pusat Logistik Berikat sebagai Alternatif Solusi Logistik Nasional – Tema Kepabeanaan dan Cukai

Tujuan	Tersedianya pusat logistik untuk memenuhi kebutuhan industri yang tepat sasaran, memberikan akses pemenuhan bahan baku impor dan akses ekspor pada IKM, dan menjadi hub logistic di asia pasifik pada tahun 2018.				
Latar belakang	Prinsip Design Utama			Dampak dan IKU	
a. Banyaknya barang impor yang merupakan kebutuhan industri di dalam negeri yang di timbun di Singapura dan Malaysia. b. Biaya logistik yang tinggi karena adanya biaya tambahan berupa penimbunan di Singapore atau Malaysia dan inefisiensi biaya pengangkutan. c. Peluang pengembangan <i>existing business model</i> (bursa komoditas dan VMI) melalui pemberian fasilitas/relaksasi aturan kepabeanaan. d. <i>Dwelling time</i> di pelabuhan yang tinggi dibandingkan <i>Dwelling time</i> negara tetangga. e. Akses Impor Bahan Baku dan Ekspor barang Jadi Bagi Industri Kecil dan Menengah Masih Terbatas.	a. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal : 1)Insentif fiskal - Penangguhan Bea Masuk, Pembebasan Cukai, Tidak dipungut PDRI - Tidak dipungut PPN atas penyerahan dari PLB ke TLDDP 2)Insentif non fiskal : - Belum diberlakukan pemenuhan ketentuan pembatasan dibidang impor saat masuk PLB - Relaksasi dan fleksibilitas pemasukan dan pengeluaran barang, kepemilikan barang, masa penimbunan, kegiatan yang dilakukan di dalam PLB, nilai pabean dalam rangka perhitungan BM b. Manajemen risiko dalam pelayanan/pengawasan (<i>self managed bonded</i>), dengan : 1)Memberikan izin kepada perusahaan yang premium (modern, luas, memiliki SPI handal, memiliki IT Inventory dan memasang CCTV yang dapat diakses DJBC dan DJP). 2)Pengawasan dengan analisa terhadap IT Inventory/CCTV/data pendukung lain (<i>Desk audit</i>), pemeriksaan sewaktu-waktu, audit reguler, dan monitoring/evaluasi secara periodik. c. Pemberian asistensi kepada perusahaan melalui agen fasilitas (<i>Compliance assistance</i>). d. Segmentasi penerima fasilitas untuk membantu pertumbuhan industri : 1)Dukungan terhadap industri agar tepat sasaran 2)Ramah kepada lindustri Kecil dan Menengah (<i>SME friendly</i>)			2017	2018
	Rangkuman tindakan utama yang diajukan			a. Indeks Kepuasan Layanan Pengguna Fasilitas PLB	3,8 4,2
	a. 2015: Identifikasi masalah logistik nasional terkait dengan PLB: 1. <i>Public hearing</i> dan diskusi dengan asosiasi. 2. Perumusan konstruksi masalah. b. 2015: Penyusunan dan penetapan peraturan terkait pemberian insentif fiskal dan non fiskal terkait manajemen risiko di PLB: 1. Peraturan Pemerintah terkait PLB. 2. Peraturan Menteri Keuangan terkait PLB. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait PLB. c. 2016: Pembangunan aplikasi terkait Pusat Logistik Berikat dan pengembangannya 1. Aplikasi layanan dokumen pemberitahuan pabean (BC 1.6 dan BC 2.8). 2. Aplikasi rekomendasi fasilitas yang tepat (<i>Go-Fast</i>). d. 2016: Peresmian (<i>Launching</i>) PLB oleh Presiden RI e. 2017: Promosi dan Sosialisasi terkait PLB. f. 2018: Evaluasi Kebijakan PLB.			b. Dwelling Time Barang Yang Dikeluarkan Dengan Tujuan PLB (hari)	2,5 2
Faktor keberhasilan	Hasil utama			Struktur tata kelola	
a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan. b.Sinergi yang baik antara DJBC dengan instansi pemerintah lainnya. c. Sinergi yang baik antara DJBC dengan pelaku industri. d.Dukungan dan pemahaman internal DJBC yang baik. e. Penyediaan SDM (Agen-agen Fasilitas) dalam jumlah dan kapasitas yang memadai.	a. 2015: Penetapan Aturan terkait PLB (PP, PMK, Perdirjen) b. 2016: Implementasi aplikasi PLB (BC 1.6, BC 2.8, Go Fast); Peluncuran PLB oleh Presiden;Fasilitas PLB di 30 lokasi		c. 2017: Perluasan fasilitas PLB (70 lokasi) d. 2018: Perluasan fasilitas PLB (100 lokasi)	a. Initiative champion: Direktur Fasilitas Kepabeanaan b. Initiative owner: Kasubdit TPB c. Team: 1) Kepala Seksi TPB Lainnya 2) Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Audit II 3) Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai 4) Kepala Seksi Otomasi Impor 5) Kepala Seksi Peraturan Kepabeanaan	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

7. Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut – Tema Kepabeanan dan Cukai

Tujuan Inisiatif	Penguatan fungsi pengawasan laut DJBC dalam rangka menanggulangi penyelundupan impor/ekspor dan barang ilegal/ yang dibatasi lainnya serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan negara																													
Latar belakang	Terobosan	Outcomes																												
Pengawasan laut sebagai bagian dari pengawasan DJBC masih perlu dioptimalkan: - Tingginya tingkat kerawanan penyelundupan barang impor dan ekspor serta barang ilegal/batasan lainnya seiring tingginya arus lalu lintas laut Indonesia. - Jumlah penindakan laut yang dilakukan masih jauh di bawah angka potensi kerawanan pelanggaran yang terjadi. - Organisasi, sarana pendukung, dan SDM belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan laut	a. Penyempurnaan aturan terkait patroli laut yang <i>end-to-end</i> 1) Identifikasi aturan terkait patroli laut 2) Kajian/benchmarking standar patroli laut 3) Penyusunan aturan terkait patroli laut b. Pembentukan <i>dedicated maritime unit</i> , infrastruktur, dan sarana operasi 1) Kajian penataan organisasi 2) Relokasi armada & penyiapan <i>dedicated maritime unit</i>, infrastruktur, dan sarop 3) Operasionalisasi <i>dedicated maritime unit</i>, infrastruktur, dan sarop c. Pengembangan manajemen SDM pengawasan laut 1) Penyusunan blueprint manajemen SDM Pengawasan Laut 2) Penetapan standarisasi terkait keselamatan kerja, penghargaan, serta norma dan standar Pelaut DJBC.	<table><tr><td></td><td>'17</td><td>'18</td><td>'19</td><td>'20</td></tr><tr><td>a. Peningkatan rasio aktivitas/ <i>coverage</i></td><td>n.a.</td><td>0.50</td><td>0.60</td><td>0.70</td></tr><tr><td>b. Ratio <i>hit rate</i> penindakan laut</td><td>n.a.</td><td>0.05</td><td>0.07</td><td>0.1</td></tr><tr><td>c. Rasio Insiden karena <i>human error</i></td><td>n.a.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>d. Indeks Mofin di Pangkalan</td><td>72</td><td>75</td><td>80</td><td>85</td></tr></table>					'17	'18	'19	'20	a. Peningkatan rasio aktivitas/ <i>coverage</i>	n.a.	0.50	0.60	0.70	b. Ratio <i>hit rate</i> penindakan laut	n.a.	0.05	0.07	0.1	c. Rasio Insiden karena <i>human error</i>	n.a.	0	0	0	d. Indeks Mofin di Pangkalan	72	75	80	85
			'17	'18	'19	'20																								
a. Peningkatan rasio aktivitas/ <i>coverage</i>	n.a.	0.50	0.60	0.70																										
b. Ratio <i>hit rate</i> penindakan laut	n.a.	0.05	0.07	0.1																										
c. Rasio Insiden karena <i>human error</i>	n.a.	0	0	0																										
d. Indeks Mofin di Pangkalan	72	75	80	85																										
Pendukung Kesuksesan	Milestones	Risiko																												
- Komitmen pimpinan Kemenkeu dan DJBC dalam membangun kapasitas pengawasan laut DJBC - Dukungan anggaran - Dukungan K/L terkait	a. 2017: 1)Penyusunan regulasi terkait patroli laut DJBC 2)Penyempurnaan kajian terkait <i>dedicated maritime unit</i>, infrastruktur, dan sarops 3)Penetapan perencanaan manajemen SDM Pengawasan Laut b. 2018: 1)Penetapan KMK dan Perdirjen patroli laut yang end to end 2)Penetapan <i>blueprint</i> manajemen SDM Pengawasan Laut 3)<i>Dedicated maritime unit</i>, infrastruktur, dan sarops siap beroperasi	a. Potensi terjadinya insiden diplomatic akibat tindakan hot pursuit tidak sesuai ketentuan internasional yang berlaku b. Kebijakan penerimaan PNS oleh Menpan tidak sejalan dengan rencana pemenuhan kebutuhan SDM Mitigasi a. Bilateral meeting dan patroli bersama antar negara tetangga, dan revisi ketentuan terkait patroli b. Pembentukan <i>Marine Customs Training Center</i>																												
		Unit Pengelola																												
		a. Initiative Champion: Direktur Jenderal BC b. Initiative Owner: Direktur P2 c. Anggota Tim DJBC: <table><tr><td>1) Kasubdit Patroli Laut</td><td>6) Kabag Administrasi Kepeg</td></tr><tr><td>2) Kasubdit Sarana Operasi</td><td>7) Kabag Pengembangan Kepeg</td></tr><tr><td>3) Kasubdit Peraturan</td><td>8) Biro Organta Setjen</td></tr><tr><td>4) Kasubdit PSMT</td><td>9) Biro SDM Setjen</td></tr><tr><td>5) Kabag OTL</td><td>10)BPPK</td></tr></table>				1) Kasubdit Patroli Laut	6) Kabag Administrasi Kepeg	2) Kasubdit Sarana Operasi	7) Kabag Pengembangan Kepeg	3) Kasubdit Peraturan	8) Biro Organta Setjen	4) Kasubdit PSMT	9) Biro SDM Setjen	5) Kabag OTL	10)BPPK															
1) Kasubdit Patroli Laut	6) Kabag Administrasi Kepeg																													
2) Kasubdit Sarana Operasi	7) Kabag Pengembangan Kepeg																													
3) Kasubdit Peraturan	8) Biro Organta Setjen																													
4) Kasubdit PSMT	9) Biro SDM Setjen																													
5) Kabag OTL	10)BPPK																													



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

D. Penggunaan Piagam (*Charter*) IS RBTK

Piagam (*Charter*) dari masing-masing IS RBTK dijadikan acuan dalam implementasi IS RBTK, baik pada Tema Penganggaran maupun pada Tema Kepabeanaan dan Cukai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

